

Bersatu Membangun Kuasa

Pengembangan Strategi Gerakan Rakyat
Pasca Politik Elektoral 2009

Editor:

Andi K. Yuwono
Raymond J. Kusnadi
Sinnal Blegur

Bersatu Membangun Kuasa

Pengembangan Strategi Gerakan Rakyat
Pasca Politik Elektoral 2009

15 x 21 cm, xxx + 486 halaman, 2010
ISBN : 978-602-96652-1-5

Editor

Andi K. Yuwono
Raymond J. Kusnadi
Sinnal Blegur

Penerbit

Perkumpulan Praxis
Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat

Tahun

Desember 2010

Desain Sampul

Arief Timor

Ilustrasi Sampul

Fajrian

Tata Letak

Widiyo Nugroho

Percetakan

Serpico Printing

Buku ini dapat didownload di www.prakarsa-rakyat.org

Pengantar Editor

Para Pembaca yang Terhormat,

Buku "BERSATU MEMBANGUN KUASA: Pengembangan Strategi Gerakan Rakyat Pasca Politik Elektoral 2009" ini merupakan kumpulan pengalaman anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari berbagai sektor dan wilayah mengenai pergolakan, kisah perjuangan, perlawanan serta strategi rakyat sepanjang tahun 2009, terutama dalam menghadapi proses politik elektoral 2009 lalu.

Hingga saat ini, transisi demokrasi yang sudah berusia lebih dari satu dekade masih mengisyaratkan terpuruknya rakyat. Ruang demokrasi khususnya yang prosedural telah dibajak, dikooptasi dan dijarah oleh kepentingan pemodal dan berbagai faksi politik elit dan reformis gadungan yang duduk di parlemen, pemerintahan dan berbagai partai politik utama, baik di pusat maupun daerah.

Dominasi kekuatan ekonomi, politik dan budaya pro pasar bebas ini, mendorong lahirnya produk-produk kebijakan yang mengabdikan kepada kepentingan pribadi, kelompok dan modal.

Rakyat yang secara konstitusional berdaulat, sampai saat ini masih “pinggiran dan marjinal.” Perlawanan-perlawanan spontan yang meluas dan diaspora pendirian organisasi rakyat memang membawa perubahan-perubahan kecil, tapi belum mengubah perimbangan kekuatan rakyat secara signifikan dalam berhadapan dengan negara dan modal. Rakyat belum mampu menjadi aktor utama, menentukan dan memberikan kepemimpinan dalam perubahan-perubahan ekonomi, politik dan budaya. Sungguh beragam inisiatif perlawanan rakyat ini. Rakyat di berbagai sektor dan wilayah telah mampu melakukan aksi-aksi menuntut hak-haknya atau melawan praktek-praktek penindasan yang dilakukan oleh negara dan modal, meskipun masih secara spontan dan sporadik.

Proses politik di tingkat lokal menjadi salah satu pendidikan politik untuk rakyat. Pertarungan politik dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada), pemilihan umum untuk anggota DPR-DPRD-DPD. Pun juga pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung menjadi proses yang menggambarkan wajah demokrasi di Indonesia. Pesta demokrasi dengan berbagai catatan gelap di dalamnya memberikan pendidikan kolektif pada rakyat tentang bagaimana negara hanya menjadikan rakyat sebagai mesin suara. Hadirnya partai lokal sebagai pemenang mutlak di Aceh menjadi fenomena baru dalam perpolitikan di Indonesia. Seluruh aktivitas dan momentum tersebut telah memberi kesempatan pada rakyat untuk memahami aspek-aspek buntu dari jalan elektoral, serta sebagai pendidikan politik rakyat.

Bercermin pada proses dan hasil pemilu 2009, yang oleh sebagian kalangan aktivis dan gerakan rakyat dianggap tidak

menjanjikan perbaikan bagi kesejahteraan rakyat, maka sudah dapat dipastikan akan muncul beragam inisiatif baru rakyat dan gerakan rakyat yang akan dirumuskan dan dimanifestasikan. Selesaiannya pemilihan umum DPR-DPRD-DPD dan juga Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, memunculkan format gerakan rakyat yang baru, yang pantas menjadi inspirasi dan bahan belajar bersama dalam memperjuangkan kesejahteraan dan perwujudan hak-hak dasar lainnya.

Buku ini hadir sebagai bukti adanya perlawanan rakyat terhadap politik dominan negeri ini. Pendokumentasian tertulis tentang respon langsung rakyat dalam membaca situasi lokal dan nasional di berbagai wilayah dan sektor pasca pemilu 2009. Berbagai gerakan rakyat dan inisiatif perlawanan rakyat dalam mengembangkan strategi-strategi perjuangan gerakan rakyat muncul sebagai perlawanan di beragam isu baik politik, sosial budaya dan HAM. Perlawanan yang sudah dilakukan harus menjadi pembelajaran dan pengetahuan bersama dalam membangun kuasa. Buku ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi gerakan rakyat dan gerakan lainnya yang beriktikad mengembangkan hal yang sama di sektor dan wilayahnya masing-masing.

Proses penulisan dilakukan bertumpu pada dinamika internal di masing-masing simpul dalam mengembangkan gerakannya di tingkat lokal dan sektoral. Dengan taktik dan strategi yang dilakukan dengan memanfaatkan dalam setiap peluang guna memperbesar konsolidasi rakyat dalam menghadapi dominasi modal dan negara di era pasca pemilu. Diharapkan konsolidasi antar gerakan rakyat dapat muncul menjadi kekuatan untuk membangun kuasa.

Atas terbitnya buku ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terkait, baik anggota Forum Belajar Bersama – Prakarsa Rakyat yang terlibat maupun ICCO – Kerkinactie dan

Yayasan TIFA yang sejak awal mendukung gagasan penyebaran pembelajaran bersama ini. Secara khusus kami juga patut mengucapkan terima kasih kepada Ayi Bunyamin yang telah memberikan kata pengantar buku ini.

Semoga buku ini berguna bagi kita semua dan menjadi penguat insiprasi untuk menegakkan kedaulatan rakyat serta menggalang persatuan gerakan rakyat untuk membangun kuasa, kuasa yang berpihak pada rakyat. Selamat membaca dan terima kasih.

Salemba Tengah, November 2010

Tim Editor

Andi K. Yuwono

Raymond J. Kusnadi

Sinnal Blegur

Menata dan Merajut Kekuatan yang Berserak

*Ayi Bunyamin*¹

Mewujudkan sistem politik demokratis yang mampu menjamin kesejahteraan rakyat merupakan impian bersama, terutama para pelaku gerakan prodemokrasi.

Dalam satu dekade ini perjuangan membangun sistem politik demokratis oleh gerakan prodemokrasi dilakukan secara terbuka, seiring dengan terbukanya ruang-ruang demokrasi. Era keterbukaan politik ini memberikan gambaran sedikitnya tentang dua hal dari gerakan prodemokrasi. Pertama, semakin banyak pelaku gerakan prodemokrasi yang ikut “bertanding” dalam arena politik (salah satunya politik elektoral). Kedua, semakin benderang gambaran kekuatan gerakan prodemokrasi. Gerakan prodemokrasi yang dimaksud di sini, tidak hanya menunjuk pada

1 Penulis adalah Anggota Pengurus Perkumpulan Praxis Jakarta.

gerakan prodemokrasi yang terlibat dalam politik elektoral, tetapi dalam berbagai segi kehidupan.

Di berbagai wilayah di Indonesia, gerakan prodemokrasi juga melakukan perlawanan-perlawanan dan mengembangkan inisiatif solusi dalam berbagai bentuk dan strategi. Misalnya dalam berhadapan dan mengatasi pasar yang semakin liberal, gerakan prodemokrasi merintis upaya-upaya demokratisasi pasar. Demikian juga di arena lain. Di komunitas-komunitas, misalnya, ditumbuhkan sistem politik komunitas yang demokratis.

Membangun sistem demokrasi dalam berbagai hal yang menjadi pokok bahasan buku ini, merupakan kumpulan tulisan dan catatan pengalaman perlawanan rakyat di wilayah gerak masing-masing. Perlawanan-perlawanan rakyat dalam catatan ini bersumber dari konteks lokal masing-masing yang beragam. Namun, seluruhnya merupakan inisiatif perlawanan terhadap politik dominan atau politik antidemokrasi yang termanifestasi dalam berbagai aspek.

Gambaran inisiatif perlawanan dalam buku ini semakin menegaskan bahwa kenyataan politik kita saat ini sedang dalam transisi demokrasi. Sebab, terus-menerus ditandai dengan proses negosiasi antara kekuatan prodemokrasi dan antidemokrasi. Proses negosiasi berjalan timpang, karena belum berimbangny kekuatan prodemokrasi dan antidemokrasi.

Harus diakui, kekuatan politik antidemokrasi masih sangat besar dibandingkan kekuatan politik prodemokrasi. Peta kekuatan politik yang timpang ini terjadi sejak lama, namun tidak lantas melumpuhkan gerakan prodemokrasi. Lebih dari itu, kemenangan-kemenangan pun diraih gerakan prodemokrasi, meskipun kecil. Capaian ini cukup untuk membesarkan harapan bahwa sistem politik demokrasi akan benar-benar terwujud.

Harapan perwujudan sistem politik demokrasi akan semakin besar. Sebab, gerakan prodemokrasi, selain memperoleh kemenangan-kemenangan kecil, juga mendapat pelajaran penting dari pengalaman dalam merebut ruang demokrasi. Tentu seluruh pelajaran itu penting bagi penguatan dan pembesaran gerakan prodemokrasi. Salah satu tonggak penting bagi gerakan prodemokrasi di Indonesia adalah saat merespons momentum Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden 2009.

Banyak aktivis prodemokrasi aktif merespons dan terlibat, bahkan menjadi calon, dalam Pemilihan Umum 2009. Pengalaman itu sungguh berharga, karena menjelaskan tentang kekuatan gerakan prodemokrasi dalam berhadapan dengan kekuatan antidemokrasi. Menjelaskan juga bahwa memasuki arena pertarungan politik dalam sistem politik elektoral yang berlaku saat ini sangat rumit dan penuh jebakan yang berimplikasi secara politik terhadap gerakan prodemokrasi.

Setelah Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden 2009 dengan segenap hasilnya memunculkan pertanyaan: apa yang kini dilakukan gerakan rakyat atau gerakan prodemokrasi? Pertanyaan itu sebagian akan terjawab dalam buku ini. Gerakan prodemokrasi pasca Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden 2009 yang dituangkan dalam buku ini merupakan catatan pengalaman dari berbagai daerah.

Catatan pengalaman ini penting, karena memberikan gambaran nyata gerakan prodemokrasi di beberapa daerah merupakan gambaran gerakan prodemokrasi di Indonesia saat ini. Pengalaman gerakan prodemokrasi dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden 2009 menyisakan agenda-agenda penting yang harus dijalankan dan diatasi. Peristiwa politik elektoral seperti pemilihan umum dan pemilihan presiden yang dilakukan 5 tahun sekali, serta pemilihan kepala daerah (bupati, wali kota, gubernur),

bahkan pemilihan kepala desa, selalu memiliki implikasi terhadap gerakan prodemokrasi.

Implikasi itu bisa positif ataupun negatif. Implikasi positif karena gerakan prodemokrasi bisa menetapkan sikap dalam berbagai bentuk, demi memperjuangkan hak. Implikasi negatif, karena peristiwa politik ini dapat menekan pada titik kehancuran dan mencerai-beraikan soliditas gerakan prodemokrasi. Banyak contoh mengenai hal ini. Upaya menggalang kekuatan rakyat dalam berbagai bentuk dan dilakukan bertahun-tahun, hancur karena terjadi ketegangan akibat tidak satunya pilihan politik. Soliditas yang terbangun pun terpecah belah karena terikat dalam hubungan patron kekuasaan yang memperebutkan konsesi kuasa.

Telah banyak disinggung bahwa sistem politik elektoral tak ubahnya sistem dalam dunia dagang: sarat dengan perang dan transaksi untuk memperoleh keuntungan. Dalam hal sistem politik elektoral, bentuk transaksinya mengatasnamakan, mempertaruhkan, dan memperjualbelikan rakyat. Watak politik seperti ini sungguh mengorbankan rakyat. Apabila watak politik ini dimaknai sebagai demokrasi yang banyak didengungkan, sesungguhnya yang terjadi adalah perjuangan dan penegakan sistem kekuasaan atas rakyat.

Pemerintahan yang terbangun dari sistem politik elektoral seperti ini adalah pemerintahan yang menjual seluruh rakyat untuk persembahan kepada kekuasaannya. Padahal, kekuasaan yang diperoleh itu bisa jadi bukan miliknya secara penuh, karena menjual rakyat. Keuntungan dan kekuasaan yang diperoleh hanya karena menjadikan badannya sebagai saluran transaksi uang besar antara pelaku dan penguasa pasar. Para pembeli (pelaku dan penguasa pasar) inilah penguasa yang sesungguhnya.

Kenyataan politik tersebut kasatmata dan akan selalu berulang dalam momentum berikutnya serta akan terus

menyuburkan dan menguatkan watak politik tersebut. Kita tahu, seluruh sistem politik yang sekarang berlangsung ini apabila terus berlanjut akan menjadikan berbagai momentum politik hanya sebagai ajang pertarungan para “petualang-pialang.” Hasilnya pun bisa diduga: penguasa pasar akan menjadi pemenangnya. Sejarah penghancuran kehidupan akan terus berulang.

Banyak lubang dan jebakan bagi gerakan prodemokrasi untuk memasuki arena politik elektoral, namun hampir tidak tersedia pilihan lain. Tatanan politik negara ini menghendaki demikian. Memasuki arena politik elektoral sering kali juga bukan perkara pilihan, melainkan merupakan akibat logis dari aktivitas yang selama ini dilakukan gerakan prodemokrasi.

Pengalaman di beberapa daerah menunjukkan bahwa ikut serta dalam politik elektoral merupakan tahapan yang harus dilalui untuk memantapkan dan memuluskan perjuangan gerakan prodemokrasi. Memperjuangkan demokrasi demi kesejahteraan rakyat adalah kerja politik, dan dalam praktiknya akan selalu berurusan dengan lembaga politik. Persoalan nyata sebagai gambaran ketidakadilan, pada ujungnya bersumber dari kebijakan yang tidak memberikan keadilan bagi rakyat.

Memang tidak semua keterlibatan dalam politik elektoral adalah kehendak organisasi gerakan prodemokrasi. Cukup banyak aktivis gerakan prodemokrasi memasuki arena ini atas kehendak sendiri. Tentu saja dengan berbagai alasan. Dalam praktiknya, baik itu atas kehendak sendiri maupun kehendak organisasi. Gerakan prodemokrasi ini umumnya bahu-membahu untuk meloloskan kandidatnya.

Namun, ada juga pengalaman tragis, beberapa aktivis gerakan prodemokrasi dari organisasi berbasis anggota yang cukup besar, atas inisiatif sendiri menjadi calon legislatif melalui

partai politik. Mereka tersebar di beberapa partai politik peserta pemilu. Para aktivis ini yakin basis massa yang selama ini bersama dan menjadi mitra akan memilih mereka. Kenyataannya, tidak ada satu pun aktivis yang lolos. Peristiwa ini pun berimbas terhadap organisasi. Terjadi ketegangan di dalam organisasi. Para aktivis yang tidak lolos ini frustrasi dan kecewa terhadap organisasi yang dianggap tidak bekerja sungguh-sungguh.

Mungkin, situasi seperti ini banyak terjadi dalam organisasi gerakan prodemokrasi, khususnya yang merespons politik elektoral. Cerita tragis ini menggambarkan permasalahan yang dihadapi para aktivis ini adalah permasalahan legitimasi. Mereka tidak membawa mandat organisasi. Mungkin pula keputusan ini sebagai keputusan ceroboh, karena dengan cara itu jelas-jelas mengakibatkan permasalahan dalam organisasi. Berbeda halnya apabila pencalonan itu merupakan keputusan organisasi, maka organisasi bekerja keras untuk menyukseskan kandidat.

Mengutip pengalaman di Bengkulu:

Di Bengkulu gerakan di tahun 2009 terkesan tanpa konsolidasi, “berpencarnya” aktivis masuk ke dalam banyak partai politik (Partai Hanura, PKB, PDK, PPI, PDIP, Partai Karya Perjuangan, Partai Patriot, Partai Pemuda Indonesia). Pilihan ini karena meyakini para aktivis ini sudah cukup punya akar, yakni di Serikat Tani Bengkulu (STAB), apalagi didukung dengan perubahan sistem Pemilu 2009 yang semidistrik, sehingga basis diasumsikan akan memilih orang, terlepas orang itu dicalonkan dari partai mana pun. Keyakinan ini jelas keliru, terbukti tidak satu pun aktivis STAB berhasil memperoleh kursi pada Pemilu 2009. Mestinya sudah dapat diukur bahwa kekuatan rakyat yang dibangun dalam situasi politik liberal saat ini belum cukup kuat untuk rakyat mengerti tentang

keputusan ini. Setelah gagal, para aktivis terkesan frustrasi dan menyalahkan organisasi dan mengatakan kekalahan tersebut adalah kekalahan organisasi, sehingga aktivis yang gagal mengalami kelesuan mengurus organisasi karena menganggap organisasi tidak serius dalam berjuang. Padahal, belum tentu keikutsertaan para kader dalam pemilu ini membawa agenda-agenda kerakyatan atau yang lebih langsung adalah agenda STAB.

Pengalaman seperti di Bengkulu ini juga banyak terjadi di wilayah lain. Dalam merespons politik elektoral ini, selain sebagian besar diputuskan secara individual, juga para aktivis ini umumnya dari kalangan NGO atau dari kalangan jenis organisasi yang menjadi pendamping dan atau penguat organisasi basis/rakyat, bukan dari kalangan rakyat. Saya tidak bermaksud menempatkan situasi ini sebagai permasalahan. Saya hanya menunjukkan bahwa sesungguhnya rakyat yang sedang diperjuangkan belum cukup kelihatan. Mereka sendiri yang menjadi kandidat dan bertarung memperebutkan ruang demokrasi melalui sistem politik elektoral. Atau, keadaan ini menjelaskan bahwa kerja-kerja keras yang dijalankan, khususnya oleh aktivis gerakan prodemokrasi, terutama dari kalangan NGO, belum efektif melahirkan kader-kader politiknya yang langsung dari tingkat basis. Dalam kenyataannya, ruang demokrasi masih jauh dari jangkauan rakyat di tingkat basis.

Kelemahan Pengorganisasian

Dalam berbagai pengalaman membangun kekuatan prodemokrasi, baik di ranah politik elektoral maupun di ranah lain, satu konsep dan kerja yang dianggap mendasar adalah pengorganisasian. Pengorganisasian dalam konteks ini adalah kerangka kerja menyeluruh dalam memecahkan masalah ketidakadilan sekaligus membangun tatanan yang adil. Kerja-

kerja pengorganisasian yang efektif inilah yang mampu menjamin terwujudnya demokratisasi. Pengorganisasian tentu berbeda dari organisasi. Membangun organisasi tidak lantas otomatis terjadi kerja pengorganisasian. Namun, menjalankan kerja pengorganisasian tentu membutuhkan organisasi.

Pada banyak pengalaman di Indonesia, gerakan prodemokrasi di berbagai level sering dengan cepat membentuk organisasi, baik berupa serikat, aliansi organisasi, front politik, maupun sejenisnya. Nama-nama itu mengisyaratkan organisasi ini menjalankan peran dan kerja politik untuk demokratisasi. Kenyataannya, hanya sedikit yang berhasil mempertahankan gerak dan kerjanya. Sebagian besar berhenti sampai pada pembentukan dan aksi pertama. Beberapa catatan pengalaman di buku ini menyatakan lemahnya kerja pengorganisasian sebagai sebab mendasar gerakan prodemokrasi tidak kunjung besar dan kuat. Catatan lain, meski tidak menyebut secara eksplisit, mengisyaratkan hal yang sama saat mengurai permasalahan internal organisasi gerakan prodemokrasi yang sedang dibangun.

Barangkali memang benar, kekuatan gerakan prodemokrasi saat ini, meski sudah dijalankan sekian lama, tidak kunjung kuat dan besar karena tidak efektifnya kerja pengorganisasian. Dalam pengertian pengorganisasian seperti telah disebutkan, yang sifatnya menyeluruh. Jelas bukan hanya mobilisasi dan propaganda, bukan hanya pendidikan, melainkan yang paling penting adalah proses penyadaran, sehingga setiap orang akan bergerak mengupayakan perubahan demi mewujudkan kesejahteraannya. Dalam konteks penyadaran ini, tentu meliputi juga pembangunan dan pengembangan organisasi serta berbagai kerja dan aksi terus-menerus.

Menjalankan pengorganisasian sudah pasti membutuhkan organisasi. Sebab, dalam organisasi inilah dilakukan penataan gerak dan kerja agar seluruh jenis peran dan pekerjaan tertata

secara kompak dan bersinergi. Peran dan kerja di tingkat basis yang menjalankan pendidikan-pendidikan, termasuk di dalamnya pendidikan politik, agar tumbuh kesadaran mengupayakan perubahan secara kolektif dan terus-menerus. Demikian halnya peran dan kerja-kerja garis depan, yakni melakukan tekanan, lobi dan negosiasi, propaganda terhadap khalayak luas untuk penggalangan dukungan, juga efektif dilakukan dengan berbagai perangkat dan media yang relevan.

Penting pula peran dan kerja-kerja supporting, seperti riset hingga aspek logistik, terus dijalankan seiring dan sejalan dengan peran serta kerja lainnya. Namun, dalam banyak pengalaman, peran dan kerja-kerja ini selain tidak seiring dan sejalan, juga cenderung hanya dalam jangka pendek untuk merespons isu dan kasus sesaat, mengikuti isu dan kasus yang sedang hangat. Mungkin kita sudah sering mendiskusikannya, bahwa gerakan prodemokrasi tidak kunjung membesar dan menguat karena kurang berhasil membawa isu dan persoalan ini ke tingkat basis yang besar dan luas. Isu dan kasus banyak yang berhenti di tingkat aktivis saja, belum sampai ke tingkat basis/massa rakyat.

Permasalahan pengorganisasian seperti ditunjukkan dalam buku ini, sesungguhnya permasalahan yang juga sudah dikenali sejak beberapa tahun lalu. Gagasan solusinya juga sudah diungkapkan dalam berbagai kesempatan sejak beberapa tahun lalu. Gambaran ini akan sangat jelas jika kita membuka kembali arsip-arsip dokumen beberapa tahun lalu atau bahkan satu dekade lalu. Mungkin saja kita harus membacanya secara berbeda, bahwa apa yang diungkapkan dalam catatan lapangan di buku ini bukan sebagai pertanda gerakan prodemokrasi tidak mengalami kemajuan. Karena sesungguhnya, seperti juga telah disinggung, kemenangan-kemenangan kecil telah diraih, dan ini menandakan gerakan prodemokrasi terus ada dan tumbuh. Namun, pertumbuhan gerakan ini menyebar luas dan bentuk

gerakan prodemokrasi di sektor-sektor tertentu di wilayah-wilayah tertentu, belum terhimpun menjadi suatu kesatuan. Dengan demikian, permasalahan yang belum teratasi bagi gerakan prodemokrasi di Indonesia bukan pada pertumbuhan dan penyebarannya, melainkan pada penyatuannya.

Sebaran gerakan prodemokrasi ini begitu luas dan beragam. Mungkin kita tidak memiliki peta yang cukup lengkap tentang hal ini. Mungkin juga peta gerakan prodemokrasi ini pun bias pada kalangan NGO dan mahasiswa. Sedangkan gerakan prodemokrasi yang langsung dari masyarakat basis mungkin tidak banyak terekam, karena tidak terliput media. Seperti juga tertuang dalam catatan pengalaman di buku ini, sebagian besar adalah catatan gerakan prodemokrasi yang dikelola kalangan NGO. Karena itu, berbagai analisis dan permasalahan dalam catatan pengalaman ini juga dapat dikatakan sebagian besar mencerminkan keresahan kalangan NGO di Indonesia. Mungkin saja benar, karena dalam beberapa pengalaman di Indonesia, NGO tidaklah memungkinkan menjalankan peran dan kerja-kerja pengorganisasian. NGO selalu terikat oleh periode waktu dan sistem manajemen, yang dalam beberapa hal berseberangan dengan logika kerja pengorganisasian.

Saya tidak bermaksud mengatakan NGO tidak mungkin melakukan pengorganisasian, karena di beberapa tempat bisa terjadi. Namun, watak organisasi NGO, walaupun relevan dan mau menjalankan pengorganisasian, barangkali lebih relevan jika mengambil peran dan kerja sebagai pendukung. Karena NGO sering kali berada atau menempatkan diri di “luar” (bukan bagian dari kelompok yang mengalami, melainkan pada posisi pembela/pembantu). Dalam posisi seperti ini tentu watak yang muncul dan terbangun akan berbeda dari watak massa yang langsung menjadi korban atau merasakan masalahnya. Sebagian besar NGO bukan dari kalangan korban/massa rakyat yang tertindas itu.

Dalam hal pengorganisasian, mungkin terjadi di banyak tempat, seperti dinyatakan pada catatan di buku ini, belum berhasil menumbuhkan pengorganisasi yang andal yang memiliki kapasitas menumbuhkan dan mengembangkan pendidikan penyadaran dan menggerakkan massa. Hal ini agar massa dapat bekerja bersama mengatasi dan memperjuangkan penyelesaian masalah. Sebagian besar pekerjaan pendidikan rakyat masih dilakukan oleh aktivis NGO yang memilih bentuk forum yang resmi dan dalam periode yang singkat. Tetapi proses-proses pendidikan yang terus berjalan secara kontekstual dalam kehidupan massa rakyat, belum cukup efektif. Tentu saja, jika hal ini terus berlangsung dan tidak kunjung menumbuhkan para pengorganisi atau kader di tingkat massa rakyat, mungkin gerakan prodemokrasi tidak akan kunjung menguat dan membesar. Lebih buruk lagi, ketergantungan pun tetap melekat. Maka, perjuangan penegakan demokrasi tidak akan berhasil, karena relasi “kekuasaan” antara NGO dan basis massa belum simetris.

Salah satu masalah kunci yang belum teratasi dalam pelaksanaan kerja pengorganisasian adalah penyadaran, yakni aktivitas pendidikan dan kerja yang menumbuhkan kesadaran kritis pada basis massa. Keberhasilan gerakan prodemokrasi dalam menumbuhkan kesadaran kritis masih pada beberapa orang dari basis massa. Hal ini pun tampaknya masih mengalami permasalahan untuk menjadi kesadaran kritis kolektif pada basis massa. Beberapa pengalaman menunjukkan, menumbuhkan kesadaran kritis tidak bisa ditempuh melalui pendidikan sesaat (pelatihan yang banyak dilakukan dalam beberapa tahun ini). Pelatihan-pelatihan ini sangat membantu mengatasi problem lemahnya kemampuan teknis dan pengetahuan. Namun, watak kritis dan “berlawanan” pengalaman kerja politiklah yang biasanya menentukan.

Pengertian pendidikan dalam kerja pengorganisasian semestinya diperluas menjadi sebuah proses belajar yang diwujudkan dalam kerja-kerja politik yang nyata, terencana, serta jelas target dan hasilnya. Kejelasan target dan hasil kerja politik di tingkat mana pun sungguh penting, agar selalu dapat mengukur keberhasilan gerakan ini. Penetapan target dan hasil yang realistis, dalam artian bisa dijalankan dan berhasil, sungguh berarti bagi gerakan prodemokrasi, terutama yang langsung melibatkan basis massa. Hal ini penting untuk menjaga semangat terus berlawan, bukan rasa frustrasi karena kegagalan.

Kegagalan dan keberhasilan sesungguhnya perasaan yang muncul setelah membandingkan capaian dengan yang diharapkan. Pada titik ini, perencanaan untuk menetapkan target dan hasil bersama dalam kerja pengorganisasian sungguh penting. Demikianlah, proses pendidikan yang sesungguhnya dalam kerja pengorganisasian. Keberhasilan-keberhasilan kecil ini adalah kemenangan yang memang harus diraih. Saya menganalogikan kerja pengorganisasian dengan tubuh manusia. Saat baru lahir, tubuh tidak bisa langsung diberi makanan padat, karena ususnya belum kuat, sampai akhirnya bisa mencerna berbagai jenis makanan. Demikianlah analogi kerja-kerja pengorganisasian. Proses pendidikan ini harus terus berjalan, mencerna, melawan “musuh” dan menang.

Keresahan yang dituangkan dalam catatan lapangan buku ini, jelas menandakan agenda pokok, yakni membangun kekuatan rakyat, belum terwujud efektif oleh organisasi-organisasi gerakan prodemokrasi dari kalangan NGO. Karena itu, catatan lapangan di buku ini sekaligus mengisyaratkan analisis dan refleksi mendalam terhadap posisi dan watak NGO selama ini dalam menjalankan gerakan prodemokrasi.

Meski demikian, NGO mendapat tempat secara politik dan memiliki reputasi. Karena itu, para aktivisnya pun dengan mudah

memasuki gelanggang politik elektoral, sebagai calon legislatif ataupun menjadi bagian dari tim sukses/pemenangan calon. Salah satu keunggulan NGO biasanya karena kejelasan konstituen yang umumnya disebut mitra atau kelompok dampingan, walaupun jumlahnya kecil. Dampingan NGO ini beragam, mulai dari kelompok, paguyuban, sampai serikat rakyat atau organisasi rakyat.

Menyatukan dan Memperluas Arena Perjuangan

Catatan lapangan dalam buku ini merupakan materi utama dalam Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat yang digagas beberapa tahun lalu. Karena itu, semua penulis merupakan partisipan Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat. Pembentukan forum belajar bersama dimaksudkan untuk mengatasi dua persoalan mendasar yang dihadapi internal gerakan prodemokrasi di Indonesia. Pertama, untuk lebih mengefektifkan kerja pengorganisasian sehingga mampu menguatkan dan meluaskan gerakan prodemokrasi, terutama yang langsung berbasis massa rakyat. Kedua, mengembangkan interaksi intensif di antara pelaku gerakan prodemokrasi agar saling berbagi, mendukung, dan memberi. Singkat kata, agar gerakan prodemokrasi bisa terkonsolidasi. Pada waktunya, diharapkan secara bersama-sama mampu meningkatkan kekuatan dalam melawan sistem dan struktur yang menindas, mendominasi, dan mengeksploitasi.

Tema pokok catatan pengalaman dalam buku ini adalah konsolidasi gerakan rakyat setelah momentum politik elektoral tahun 2009. Kita bisa mengikuti berbagai gerak di berbagai daerah yang mengarah pada upaya penyatuan gerakan prodemokrasi atau gagasan-gagasan logis penyatuan sebagai implikasi dari pengalaman sebelumnya.

Ada yang bergerak di level penyatuan organisasi rakyat. Ada juga upaya penyatuan aktivis gerakan prodemokrasi. Upaya dan gagasan penyatuan ini diwujudkan dalam berbagai aksi, mulai dari pendidikan terhadap anak muda untuk menumbuhkan kesadaran baru, memperjuangkan hak masyarakat adat, upaya menguasai sumber daya agar berada di tangan rakyat, perjuangan melawan penggusuran, sampai upaya memenangi pilkada melalui pencalonan atau menjadi tim sukses kandidat.

Juga perluasan penguasaan rakyat terhadap sumber daya wisata berperspektif lokal dan membantu korban tambang. Semua aksi itu adalah pemanfaatan momentum dalam kerangka penyatuan gerakan prodemokrasi atau konsolidasi. Beberapa gerakan berhasil membentuk organisasi yang baru dalam format front politik.

Belum semua front politik yang terbentuk berjalan efektif. Selain itu, keterlibatan di dalam front juga belum meliputi berbagai unsur yang dikehendaki. Pengalaman di Sulawesi Tengah, misalnya. Front ini sampai sekarang belum berjalan efektif dan menghadapi permasalahan penyatuan gagasan. Saya mengutip catatan pengalaman ini dalam membangun front:

Asumsi: rakyat dan gerakan demokrasi sekarang berhadapan dengan imperialisme dan feodalisme, menguatnya konsolidasi birokrasi kapitalis dan militerisme, konsolidasi gerakan fundamentalisme dan sektarian ini dari aspek eksternal; sedangkan dari internal gerakan: ada fragmentasi gerakan yang luas yang disebabkan perbedaan isu, wilayah geografis; lahir dan tumbuhnya gerakan di semua sektor seolah menjadi kekuatan; perlawanan rakyat tumbuh dengan berbagai metode dan tidak terorganisasikan dalam satu wadah perjuangan. Saat perluasan front ini dijalankan, terjadi ketegangan untuk

bisa menyatukan dua pandangan, yakni yang konsisten menjalankan strategi konfrontatif (berlawanan) dengan yang mengklaim kekuasaan. Argumentasinya adalah strategi mengklaim kekuasaan melalui taktik intervensi pilkada belum waktunya, mengingat basis massa rakyat yang diorganisasikan belum meluas dan belum cukup kuat untuk menghadapi kekuatan politik lama di tengah situasi politik liberal saat ini. Bentuk dan pola gerakan perlawanan yang tumbuh secara umum masih merupakan pengulangan bentuk dan pola gerakan sebelumnya, atau lebih tepat dikatakan kemunduran, gerakan kembali ke aksi sporadis dan front advokasi sektoral, dengan stagnannya penguatan front politik; kegagalan melakukan transformasi dari kesadaran kasus ke kesadaran kritis, berbarengan dengan itu perkembangan situasi politik liberal telah berhasil memfragmentasikan kelompok prodemokrasi ke dalam posisi dan strategi kontestasi (konfrontasi, mengklaim kekuasaan dan kooperatif). Oleh karena itu yang mendesak perlu dilakukan adalah pengorganisasian, pendidikan-pendidikan politik rakyat, aksi-aksi di tingkat sektoral yang kontinu, dan perluasan pembangunan organisasi rakyat yang kuat.

Seluruh catatan pengalaman di buku ini mengisyaratkan tantangan yang sama, adanya kehendak yang sama, yakni terkonsolidasinya gerakan prodemokrasi di wilayah masing-masing. Tentu saja konsolidasi yang lebih luas yang menjangkau antarwilayah juga berada dalam kesadaran bersama para pelaku gerakan prodemokrasi yang dituangkan dalam catatan pengalaman di buku ini. Untuk mengkonsolidasikan gerakan prodemokrasi dalam lingkup wilayah kecil saja bukan pekerjaan gampang, seperti juga ditunjukkan dalam catatan pengalaman di buku ini.

Hampir secara keseluruhan, gerakan prodemokrasi ini menghadapi dua level persoalan. Pertama, permasalahan konsolidasi di internal organisasi masing-masing. Kedua, permasalahan konsolidasi dengan sesama organisasi gerakan prodemokrasi sewilayah. Fragmentasi dan sporadisnya gerakan prodemokrasi ini memang bertingkat, dan tidak dapat diatasi secara keseluruhan dengan mengkonsolidasikan dari satu tingkat, terutama mengandalkan tingkatan yang langsung nasional atau provinsi, tetapi justru harus dimulai dari tingkatan terkecil. Meskipun demikian, bukan berarti tidak bisa memulai dari tingkatan yang besar, misalnya nasional atau provinsi. Hal ini bisa saja dilakukan, asal seluruh kerja konsolidasi berjalan efektif menjangkau di tingkatan lebih kecil, termasuk konsolidasi pada internal organisasi-organisasi yang tergabung dalam gerakan prodemokrasi.

Pola kerja yang memulai mengkonsolidasikan internal organisasi masing-masing, lalu meningkat ke satu wilayah, adalah tindakan yang paling realistis di tengah kesulitan berbagai sumber daya yang umumnya dialami organisasi gerakan prodemokrasi. Krisis berbagai dimensi yang sekarang terjadi, termasuk krisis sumber daya logistik bagi organisasi gerakan prodemokrasi, memperkecil peluang mengefektifkan konsolidasi. Bahkan, untuk mengefektifkan kerja pengorganisasian di wilayah kerja masing-masing saja, gerakan prodemokrasi menghadapi kesulitan logistik.

Tepat yang dikutip salah satu catatan pengalaman dalam buku ini bahwa beberapa ciri dari bekerjanya neoliberalisme adalah adanya fragmentasi, pelemahan negara sebagai penyedia kesejahteraan, dan pembatasan terhadap demokrasi dan partisipasi rakyat. Dengan begitu, sistem dan struktur yang sedang kita lawan ini bukan hanya berada di luar tubuh gerakan prodemokrasi, tetapi

sudah terinternalisasi dalam tubuh gerakan prodemokrasi. Apa yang dilawan gerakan prodemokrasi sebagian adalah melawan “diri sendiri.” Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat ini juga mengandung arti pengakuan seluruh partisipan, selain terus memperluas dan memperbesar, juga belajar menghapuskan dan menghancurkan sistem dan struktur yang juga bercokol dalam “diri sendiri.”

Menjalankan kerja-kerja pengorganisasian, terutama di tingkat masyarakat basis, bisa dimulai dari mana pun, dari isu apa pun, dari sektor mana pun. Sepanjang isu generatif komunitas, biasanya tidak terlalu sulit untuk bergerak bersama, seperti tertuang dalam catatan pengalaman di buku ini. Proses kerja pengorganisasian ini sekaligus menjawab persoalan-persoalan lemahnya proses konsolidasi. Dari beberapa pengalaman, apabila proses kerja pengorganisasian efektif dijalankan, biasanya berimplikasi pada upaya penggalangan dukungan, jaringan pihak-pihak lain yang relevan.

Sering kali juga bersentuhan dengan tuntutan untuk melakukan upaya intervensi di tingkat kebijakan, di tingkat desa, kabupaten, dan lain-lain. Proses ini dengan sendirinya sudah menjalankan kerja konsolidasi gerakan prodemokrasi. Karena itu, tepat apabila catatan pengalaman ini menunjuk aspek pengorganisasian sebagai permasalahan utama gerakan prodemokrasi saat ini. Dengan menunjuk pengorganisasian sebagai permasalahan dan berusaha menjawabnya secara konsisten, maka aspek kelemahan lain seperti pendidikan politik rakyat dan konsolidasi gerakan prodemokrasi, akan terjawab.

Memahami keragaman isu dan sektor dari catatan pengalaman di buku ini, kian menegaskan bahwa membangun sistem demokrasi tidak selalu memulai dengan intervensi pada arena politik elektoral. Pengalaman beberapa gerakan prodemokrasi

dalam merespons politik elektoral cukup memberikan petunjuk agar segera melakukan pembenahan di tingkat strategi dan kerja politiknya agar berhasil. Upaya gerakan prodemokrasi yang berjuang merintis kekuatan melalui arena lain di luar politik elektoral juga memerlukan perhatian.

Upaya yang langsung berhubungan dengan peningkatan pendapatan dan atau kesejahteraan juga memiliki makna politis yang efektif untuk menjadi sarana demokratisasi sistem politik. Bahkan, mungkin kegiatan-kegiatan semacam itu, selain mampu mendorong proses konsolidasi gerakan prodemokrasi, juga menjawab kebutuhan kontribusi dari aspek logistik gerakan prodemokrasi. Hal ini pun dibuktikan dalam beberapa pengalaman gerakan prodemokrasi. Sebab, alur berpikir dan bertindakya memang sama. Untuk melakukan perubahan di bidang kebijakan, perlu melakukan intervensi, bahkan jika memungkinkan, langsung menjadi pelaku penentu kebijakan. Untuk melakukan perubahan kebijakan di pasar juga memerlukan intervensi, bahkan jika memungkinkan, gerakan prodemokrasi pun bisa menjadi pelaku pasar. Ini pun sudah dibuktikan oleh beberapa gerakan prodemokrasi, meski dalam skala kecil.

Langkah pengorganisasian dan konsolidasi untuk mempengaruhi dan menguasai insititusi pemerintahan, juga institusi pasar, sudah saatnya diancangkan atau dimulai dan diperbesar. Sebab, kenyataan politik di Indonesia saat ini, atau bahkan di negara-negara lain, para penguasa pasar tidak hanya mempengaruhi insititusi pemerintah dengan penguasaan dari luar, tetapi secara langsung melakukan strategi penguasaan langsung dari dalam. Mereka menjadi anggota parlemen, bahkan menjadi pejabat negara dan institusi pemerintah.

Praktik-praktik menjalankan strategi tersebut sebenarnya bukan hal baru bagi gerakan prodemokrasi di Indonesia. Dalam

catatan pengalaman di buku ini saja, upaya-upaya rintisan sudah dimulai, bahkan sudah ada yang tahapnya mengembangkan dan memperluas. Dengan demikian, mungkin saja secara realistis pembangunan sistem demokrasi ini justru bisa dimulai dari hal-hal konkret seperti itu. Jika secara konsisten dijalankan, sesungguhnya itu merupakan kerja nyata pengorganisasian dan konsolidasi gerakan prodemokrasi.

Mengutip makalah Wilson:

”Konsolidasi demokrasi akan mempunyai makna dan pengaruh secara politik bila mempunyai basis pengorganisasian yang massif dan konkret. Karena itu prioritas bagi gerakan demokrasi-kerakyatan adalah melakukan perluasan dan penguatan basis, baik dengan strategi berbasiskan sektoral, teritorial, maupun kombinasi antara keduanya. Dalam kerangka taktik penguatan basis ini harus dikombinasikan antara kerja-kerja politis dengan program-program mendesak yang lebih sosial-ekonomis.”

Proses-proses konsolidasi dalam berbagai aspek dan ranah ini sekarang, terutama bagi mereka yang bekerja di tingkat basis, selain mengupayakan penyelesaian kasus-kasus yang dihadapi, juga paling realistis bergerak melakukan perubahan-perubahan di tingkat komunitas, wilayah, atau desanya. Arena politik di level ini sebenarnya lebih mudah terjangkau dan lebih mudah membangun efektivitasnya dibandingkan langsung merespons persoalan-persoalan yang besar dan jauh dari keseharian massa rakyat.

Pengalaman sebuah aliansi organisasi gerakan prodemokrasi di tingkat kabupaten. Mereka mencanangkan agenda perubahan. Pertama, perubahan-perubahan sistem politik, baik di tingkat desa maupun kabupaten. Kedua, gerakan yang mengarah pada

perubahan-perubahan dalam tatanan ekonomi. Menganangkan perubahan di level ini sungguh tindakan strategis, bukan sekadar cari gampang. Pilihan ini disadari sebagai proses pendidikan bersama, sehingga kemenangan-kemenangan kecil yang terus diraih menjadi substansi belajar yang sesungguhnya dalam melakukan perubahan-perubahan yang lebih besar.

Membangun gerakan prodemokrasi, terutama di tingkat lokal, berarti memahami seluk-beluk komunitas. Makna pemahaman komunitas termasuk memahami bahwa hak-hak dasar berbeda dari pemenuhan hak dasar. Hak-hak dasar yang harus diwujudkan cenderung terbatas jumlahnya. Tetapi dalam hal cara, strategi, dan teknik yang digunakan komunitas dalam pemenuhan hak, tidak terbatas. Sangat variatif menurut konteks kebudayaan serta kurun waktu. Cara komunitas memenuhi dan mewujudkan hak dasarnya, itulah kebudayaannya. Budaya berubah jika komunitas menemukan cara baru untuk memenuhi haknya. Karena itu, membangun gerakan prodemokrasi khususnya di tingkat bawah, senyatanya memasuki arena kerja kebudayaan.

Daftar Isi

Pengantar Editor	iii
Pendahuluan	
Menata dan Merajut Kekuatan yang Berserak <i>Ayi Bunyamin</i>	vii
Bagian I: Strategi Penguatan Organisasi Perlawanan	
1. Momentum Politik: Momentum Memperkuat Rakyat Simpul Mataraman Plus - Jawa Timur <i>Muslimin Abdilla, Edy Musyadad dan Muklis Irawan</i>	1
2. Dinamika Gerakan Prodemokrasi Sulawesi Tengah Pra dan Pasca Pemilu 2009 Simpul Sulawesi Tengah <i>Nasution Camang, Ferry Anwar, Andika, Wilianita Selviana dan Edmond Leonardo</i>	29
3. Gerakan Tani Bengkulu, Sepeninggal Wan Amri Simpul Bengkulu <i>Agustam Rachman</i>	59

4. Rakyat Miskin Melawan Sistem Ekonomi Neoliberalisme 77
Marlo Sitompul
5. Membangun Gerakan Oposisi bagi Rakyat Pekerja 95
Anwar "Sastro" Ma'ruf

Bagian II: Geliat Perlawanan Basis

6. Gerakan Konservasi Di Gunung Lemongan 119
Simpul Tapal Kuda - Jawa Timur
A'ak Abdullah Al-Kudus
7. Bali Desa Wisata Ekologis: Menjaga Kesakralan 135
Milik Bersama
Simpul Bali
Atiek Kurnianingsih & Ni Made Puriati
8. Demokrasi buat Siapa? 153
Simpul Bandung
Desy Budiyanti
9. Pilar Demokrasi Diruntuhkan Eksploitasi: 163
Belajar dari Masyarakat Pulau Talaga dalam
Mempertahankan Hak
Simpul Sulawesi Tenggara
M. Abdi Hayat
10. Gerakan Perlawanan Suku Malamoi Papua: 173
Mencari Keadilan atas Sumber Daya Alam
dan Identitas Budaya
Simpul Kepala Burung Papua
Maxc Binur, Danarti Wulandari, Charles Tawaru dan Fredik Sedik
11. Desa Budaya Lung Anai: Dilema Invensi 209
Budaya yang Sirna dan Siasat Penguasaan
Sumber Penghidupan
Simpul Kalimantan Timur
Abdullah Naim dan Roedy Haryo Widjono AMZ

12. Geliat Perlawanan Kultural Komunitas Nyerakat di Tengah Gempuran Modernitas	229
Simpul Kalimantan Timur	
<i>Merah Johansyah Ismail, Abdullah Naim, dan Roedy Haryo Widjono AMZ</i>	
13. Jalan Terjal Pergulatan Politik Masyarakat Adat Lombok Utara	255
Simpul Nusa Tenggara Barat	
<i>Sulistiyono</i>	
14. Karnaval Seni Budaya dalam Politik Elektoral	269
<i>FX. Rudy Gunawan</i>	
15. Masyarakat Harus Memiliki Kapasitas untuk Memilih yang Strategis di Antara Berbagai Pilihan Politis	283
Simpul Maluku	
<i>George Corputty</i>	
16. GRP-HAM Sulawesi Utara dan Spirit Korban 65	297
Simpul Sulawesi Utara	
<i>Anton Miharjo</i>	
17. Siasat dari Halaman Belakang Makassar	311
Simpul Sulawesi Selatan	
<i>Zobra Andi Baso, Ambo Masse, Judy Rahardjo, Al Muhajid Akmal, Alfina Mustafainah & Irfan Lubis</i>	
18. Pengaruh Politik Dominan dan Perlawanan Rakyat Kalimantan Barat Pasca Pemilu 2009	333
Simpul Kalimantan Barat	
<i>Tony Kusmiran</i>	
19. Kekuatan Sipil di Papua Belum Bersatu	353
Simpul Papua	
<i>Eveerth Joumilena</i>	
20. Politik Elektoral Gerakan Rakyat di Jawa Tengah	375
Simpul Semarang & Salatiga	
<i>Fatah Muria, Denny Septiviant, Ahmad Badawi & Muhammad Asrofi</i>	

21. Membangun Intimasi dengan Konstituen Melalui Rumah Aspirasi <i>M. Djadijono</i>	389
Bagian III: Perlawanan dari Sektor Keamanan dan HAM	
22. Dari Konflik Menuju Demokrasi Semu? Simpul Aceh <i>Kurdinar</i>	395
23. Mencari Jalan Keadilan: Strategi Gerakan Korban Pelanggaran Berat HAM <i>Mugiyanto</i>	415
24. Meredam Peran Politik Aktor Keamanan Pada Pemilu 2009 <i>Oslan Purba & Andi K. Yuwono</i>	431
25. Meninjau Demokratisasi Pemolisian Indonesia <i>Puri Kencana Putri</i>	455
Profil Perkumpulan Praxis	469
Profil Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat	473
Profil Yayasan Tifa	475
Daftar Nama Anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat	477

Momentum Politik: Momentum Memperkuat Rakyat

*Simpul Mataraman Plus Jawa Timur – FBB Prakarsa Rakyat*¹

Pendahuluan

Tahun 2009 merupakan tahun penuh hiruk-pikuk politik di Indonesia. Pada tahun ini perhelatan politik nasional dilakukan dalam beberapa tahap: pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan pemilihan presiden. Dalam pemilihan anggota DPRD dan DPR ada perubahan cukup mendasar berkaitan dengan daftar jadi. Semula menggunakan nomor urut, yang menempatkan calon nomor urut paling kecil merupakan calon yang paling mungkin jadi. Kemudian

1 Tulisan dipersiapkan oleh Muslimin Abdilla, Edy Musyadad dan Muklis Irawan dari Perkumpulan Alha-Raka Jombang.

diganti dengan perolehan terbanyak, yang mengharuskan calon yang akan menduduki kursi di DPRD atau DPR adalah calon yang paling banyak mendapatkan suara meskipun nomor urutnya ada di bawah. Sedangkan pemilihan presiden, hampir tidak mengalami perubahan, dan pemilihan pada tahun 2009 merupakan pemilihan presiden secara langsung kedua.

Berkaitan dengan perubahan sistem pemilihan anggota DPRD dan DPR tahun 2009, banyak ditemukan fakta di lapangan bahwa perubahan sistem pemilihan juga berdampak terhadap lemahnya posisi partai politik dan merebaknya praktik politik uang. Lemahnya posisi partai politik terjadi karena partai politik tidak akan lagi memiliki kekuatan untuk mengontrol anggota legislatif (DPRD dan DPR), karena mereka menjadi anggota legislatif bukan semata-mata karena upaya yang dilakukan partai politik, melainkan karena upaya secara individual. Hal ini (upaya individual) menjadi sebab bagi dampak kedua, yaitu merebaknya politik uang. Sebab, setiap calon legislatif (caleg), entah dalam partai yang berbeda atau berada dalam partai yang sama dalam satu daerah pemilihan, bertarung secara bebas. Setiap calon berebut dan bertarung sekuat tenaga dengan mengerahkan segala daya. Selain kekuatan kharisma, yang saat ini semakin tidak laku, kekuatan lain yang marak digunakan untuk mengorganisasi dan memobilisasi suara adalah kekuatan uang. Unsur popularitas seorang caleg dalam memenangi persaingan di suatu daerah pemilihan makin penting.² Untuk mendongkraknya dibutuhkan biaya yang besar, baik lewat iklan maupun pembagian uang secara langsung. Meskipun uang bukanlah semata-mata kekuatan yang mampu menarik loyalitas suara, tetap saja uang diyakini sebagian besar atau semua calon anggota legislatif sebagai alat untuk

2 M. Hernowo dalam www.jppr.or.id yang diambil dari sumber www.kompas.com

mengumpulkan suara. Politik uang merebak di mana-mana.³ Pemilu yang semula diharapkan bisa menjadi segregasi suara rakyat, berubah menjadi momentum jual-beli suara.

Peristiwa politik yang terjadi pada tahun 2009 tersebut merupakan implementasi dari sistem demokrasi liberal, yang memungkinkan pertarungan secara bebas dan terbuka dilakukan. Setiap orang bebas menjadi pemain: sebagai kandidat atau sebagai pemilih. Orang atau kelompok yang memiliki akses besar dan kekuatan besar bertarung dengan orang atau kelompok yang tidak memiliki akses dan kekuatan sama sekali.

Di sisi lain, krisis ekonomi global pada akhir tahun 2008 dan dimulai dari kegagalan sistem perbankan Amerika Serikat, memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi di tingkat lokal. Meskipun dampak krisis tersebut tidak dirasakan secara langsung, rakyat merasakan semakin kesulitan mendapatkan modal usaha, karena penyalur kredit semakin ketat dalam menyalurkan modal.

Rakyat kecil adalah pihak yang paling merasakan dampak kemerosotan perekonomian nasional yang menjadi akibat turunan dari kemerosotan perekonomian global serta banyaknya dana rakyat yang dikorup pejabat negara. Meskipun pemerintah telah berusaha membuat program-program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, program-program tersebut tidak pernah berjalan dengan baik, karena pemerintah tidak pernah tegas terhadap praktik-praktik korupsi.⁴ Selain itu, program-program

3 Menurut laporan ICW, untuk wilayah DKI Jakarta partai politik besar peserta Pemilu 2009 memiliki calon anggota legislatif melakukan kegiatan money politik, begiru juga di Surabaya. Sementara itu, dari sisi hukum masih terjadi beda penafsiran antara Panwas Pemilu dengan Gakumdu (Penegak Hukum Terpadu). Panwas menganggap money politik sementara Gakumdu tidak. Informasi diambil dari Detiknews, tanggal 8 April 2009

4 Kompas, 29 Desember 2009

tersebut hanya dijalankan sekadarnya, dan cenderung hanya untuk dijadikan sebagai ladang sampingan bagi aparat pemerintah dan kalangan legislatif serta kroninya.⁵

Sampai hari ini pun, sangat sulit bagi rakyat untuk mengakses permodalan untuk mengembangkan atau memulai usaha. Selain karena rakyat kecil tidak memiliki relasi yang cukup baik di lembaga-lembaga keuangan formal, juga karena sangat sulitnya persyaratan yang diajukan lembaga-lembaga keuangan bagi rakyat kecil.⁶ Di sisi lain, lembaga keuangan (bank) begitu mudah memberikan pinjaman triliunan rupiah kepada pengusaha besar, meskipun pengusaha tersebut terbukti nakal.

Wilayah Analisis

Wilayah-wilayah kabupaten yang menjadi area analisis tulisan ini saling berdekatan, mulai dari timur: Mojokerto berbatasan dengan Jombang, Jombang di sebelah selatan barat berbatasan dengan Kediri dan berbatasan dengan Nganjuk di sebelah barat, Kediri di sebelah selatan berbatasan dengan Tulungagung. Wilayah-wilayah ini merupakan wilayah Jawa

5 Kasus terakhir yang terjadi di Jawa Timur tentang penyelewengan dana program pembangunan adalah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) yang melibatkan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Fathurrasjid dan puluhan pegawai negeri serta kalangan perguruan tinggi (dimuat di www.infokorupsi.com). Sebelumnya juga ada korupsi dana Kredit Usaha Tani (KUT) yang dilakukan secara masif serta berbagai korupsi dana program pemerintah.

6 Persyaratan yang memberatkan dalam mengakses dana dari lembaga keuangan formal (bank) yang dirasakan oleh kelompok-kelompok terorganisir yang menjalankan kegiatan ekonomi kecil di Jombang, Kediri, Mojokerto dan Nganjuk adalah kelompok harus berdiri secara formal dengan memiliki surat pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris dan Dinas Koperasi. Padahal kelompok-kelompok tersebut merupakan kelompok informal yang melakukan kegiatan-kegiatan bersama di komunitas-komunitas baik di desa maupun di wilayah kota. Disamping itu, hal lain yang memberatkan adalah menyerahkan agunan.

Timur dalam subkultur Mataraman dan sebagian subkultur Arek.⁷

Wilayah subkultur wilayah Mataraman Wetan (Timur) memiliki produk budaya yang tak berbeda dari komunitas Jawa di Surakarta. Masyarakat di wilayah ini banyak dipengaruhi model sosiokultural Jawa Tengah. Pola-pola aristokrasi, keselarasan, keseimbangan, dan penuh simbol juga menjadi ciri kehidupan masyarakat. Secara umum masyarakat di wilayah ini masih sangat erat pada kultur paternalistik atau bapakisme.⁸ Kultur ini satu sisi bisa menjadi perekat, tetapi di sisi lain bisa menjadi pola penindasan yang cukup efektif.

Sedangkan subkultur Arek, menurut budayawan Ayu Sutarto, disebut sebagai salah satu subkultur di Jawa Timur yang memiliki karakteristik yang spontan khas pesisiran. Karakter keras tersebut pun lebih pada sikap pantang menyerah, ngeyel, dan keteguhan mempertahankan pendapat serta prinsip sebagai wujud penghargaan tertinggi terhadap harga diri. Ciri lain, memiliki semangat juang tinggi, solidaritas kuat, dan terbuka terhadap perubahan. Budaya khas ini dibentuk melalui persentuhan dengan pendatang dari berbagai latar budaya.⁹

Dilihat dari sisi politik riil, seluruh kabupaten tersebut, partai politik yang menguasai suara di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur adalah Partai Demokrat, Partai

7 Subkultur Mataraman adalah wilayah subkultur yang berada di wilayah ex karesidenan Madiun yang meliputi Kabupaten dan Kota Madiun, Kabupaten Ponorogo, Ngawi, Magetan dan Pacitan dan ex karesidenan Kediri yang meliputi Kabupaten dan Kota Kediri, Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, Nganjuk dan, Blitar. Adapun subkultur Arek berada di wilayah Jombang, Mojokerto, Sidoarjo, Surabaya dan, Malang

8 Bima Baskara dan Budiawan SA, Mataraman itu Kental, Tetapi Gagal, artikel yang juga menukil pendapat C. Gertz dimuat dalam Kompas, 25 Juli 2008

9 Hasil wawancara dengan Ayu Sutarto oleh Arif Junianto wartawan Surabaya Post tanggal 15 November 2009

Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya, dan Partai Gerakan Indonesia Raya. Di Kabupaten Mojokerto, empat partai terbesar yang menguasai kursi DPRD adalah PDIP, Partai Demokrat, Partai Golkar, dan PKB. Urutan partai ini sama dengan perolehan kursi di DPRD Jombang. Di Nganjuk, selain empat partai tersebut ditambah Partai Patriot. Di Kabupaten Kediri, PDIP mendapat 14 suara, Partai Demokrat 8 kursi, dan PKB hanya 7 kursi. Sedangkan di Kabupaten Tulungagung, Partai Demokrat hanya memperoleh 4 kursi.¹⁰

Kondisi Politik: Pemilu 2009 Menjadi Isu Dominan

Reformasi telah bergulir selama 10 tahun terakhir. Namun, reformasi yang semula dibanggakan sebagai jalan terang dan pintu masuk ke era baru pemerintahan yang mengutamakan rakyat dan mau mendengar segala keluhannya, ternyata tidak membawa perubahan berarti. Sudah empat kali pemilu dilakukan dengan beragam partai politik yang menjadi peserta. Namun, sejauh ini hasil pemilu belum memberikan jawaban untuk perubahan yang diharapkan rakyat.

Memang, pemilu legislatif tahun 2009 dianggap lebih demokratis dibanding dengan pemilu legislatif tahun 2004. Hal itu ditunjukkan oleh berubahnya beberapa aturan sistem pemilihan calon legislatif: (1) yang paling radikal adalah tidak lagi digunakannya nomor urut dalam menentukan seorang menjadi calon anggota legislatif, (2) adanya calon perempuan dalam setiap 3 nomor teratas,¹¹ dan (3) sistem pemungutan suara yang murni terbuka.

10 Diolah dari hasil penghitungan suara KPUD Jatim Pemilu 2009

11 Bisa dilihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang dimuat dalam legalitas.org dan mediacenter.kpu.go.id

Namun, bagi proses demokratisasi di Indonesia, sistem itu justru lebih merugikan. Karena partai politik sebagai salah satu perangkat demokrasi tidak lagi diberi kekuasaan untuk mengatur kadernya. Hal ini tentu akan memasung fungsi partai dalam membangun kondisi politik yang lebih baik. Persaingan untuk memperebutkan suara terbanyak bukan lagi menjadi tugas utama partai politik, tetapi lebih banyak dibebankan kepada kader partai secara individual. Hal ini berdampak pada proses liberalisasi politik yang mengedepankan kekuatan modal / uang.¹² Maka, calon yang paling dikenal atau populer akan memperoleh suara terbanyak di daerah pemilihan tertentu, meskipun calon tersebut berasal dari partai kecil, bahkan yang memiliki catatan buruk masa lalu sekalipun.

Persoalan ini mendorong mobilisasi politik yang dilakukan para caleg. Caleg yang memiliki uang memanfaatkan uangnya untuk membiayai proses kampanye sekaligus untuk membeli suara. Dampaknya, konstituen masih menjadi mainan semata. Ada proses suap atau pembelian suara.

Modus politik uang ini dilakukan melalui tim sukses caleg yang berusaha masuk ke kelompok-kelompok masyarakat melalui jaringan perkawanan yang sudah lama dibangun atau hanya kenal sesaat. Praktik ini terjadi baik di Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Kediri, dan Tulungagung. Strategi ini merupakan rencana kedua bagi para caleg, meskipun di dalam partai sendiri memang sudah terbentuk badan atau tim pemenangan pemilu.

12 Dalam Pemilu yang sangat liberal, dibutuhkan popularitas. Karena itu diusahakan semaksimal mungkin untuk mengangkat popularitas seorang calon. Upaya menaikkan popularitas memerlukan biaya yang cukup besar, karena popularitas yang ingin dicapai dalam waktu singkat hanya bisa dicapai melalui pemasangan iklan dan promosi secara besar-besaran lewat berbagai media. Yang paling banyak lewat spanduk dan baliho, juga lewat media massa, bahkan secara langsung membagi-bagikan barang atau uang secara langsung kepada calon pemilih

1. Situasi Organisasi Rakyat Awal Pemilu 2009

Di Kabupaten Mojokerto, Jombang, Kediri, Nganjuk, dan Tulungagung telah terbentuk organisasi rakyat di level desa.¹³ Mereka menjadikan organisasi sebagai alat perjuangan dalam memenuhi kepentingannya. Walaupun bukan merupakan organisasi politik, semua organisasi tersebut merupakan kekuatan yang dimiliki masyarakat sipil dan memiliki mekanisme untuk dapat mengetahui dan memperjuangkan kepentingan anggota. Oleh karena itu, organisasi tersebut dalam teori politik, di samping partai politik, merupakan infrastruktur politik yang berperan dalam penyelenggaraan politik elektoral.¹⁴

Namun, suasana selama proses Pemilu 2009 ternyata menyulap pikiran kelompok. Pembicaraan tentang persoalan-persoalan yang dirasakan secara langsung di komunitasnya seakan-akan tidak ada. Mereka seakan-akan lupa bahwa ada kebutuhan riil yang harus dipenuhi. Kasus tanah di Kediri dan Mojokerto yang pada tahun 2008 begitu merebak, tidak terjadi lagi pada saat Pemilu 2009.¹⁵ Aksi-aksi para petani yang menyuarakan kelangkaan pupuk tidak terdengar. Kekacauan dalam distribusi konversi minyak tanah hanya menjadi pojok berita. Media-media yang mem-*blow-up* proses pemilu juga berkontribusi menghipnotis masyarakat agar turut serta dalam proses pemilu ini.

13 Organisasi-organisasi rakyat di tingkat desa ini terdiri dari satu sampai 4 kelompok per desa. Kelompok-kelompok yang dibentuk ini adalah sebagai dampak dari proses pengorganisasian komunitas yang dilakukan oleh para penggerak komunitas (CO) yang ada di wilayah tersebut. Kelompok-kelompok ini tumbuh pasang surut, tetapi kelompok yang sudah memiliki kegiatan berkoperasi bisa berjalan secara terus menerus

14 Hal ini yang disebut Benget Silitonga dalam tulisannya *Ayo Bung, Rebut Kembali Kedaulatan Rakyat*, di demosindonesia.org

15 Pada tahun 2008 kasus tanah di Mojokerto terjadi di desa Sendi Pacet Mojokerto dan di Kediri terjadi di Ngancar dan wilayah kecamatan Puncu

Sedangkan di kalangan akar rumput, khususnya sebagian kelompok yang selama ini berjejaring di lima wilayah ini, memiliki pandangan lain. Mereka beranggapan pemilu saat ini tidak ada hubungan dengan nasib mereka untuk lima tahun mendatang.¹⁶ Respon ini merupakan tanda sikap kekecewaan kepada mereka yang pernah dipilih. Momentum pemilu adalah peristiwa sesaat, sehingga mereka berpikir praktis atau aji mumpung. Mumpung ada pemilu, mari apa yang bisa dimanfaatkan atau ada uang yang bisa diambil, harus diambil. Mereka tidak berpikir jauh bahwa pemilu yang baik akan menghasilkan orang-orang baik di parlemen sehingga mengusung kebijakan yang baik pula.¹⁷

Bukan tanpa alasan jika rakyat Ngancar, Kediri, yang saat ini menghadapi kasus tanah dan berproses di pengadilan, tidak mau meminta bantuan kepada legislatif atau pemerintah daerah.¹⁸ Mereka sudah tidak percaya kepada wakil rakyat. Ketidakpercayaan rakyat ini seiring dengan anggapan pemerintah lokal bahwa program yang dibuat harus dijalankan dan masyarakat harus mengikuti. Kalau masyarakat tidak mau bersinergi dengan pemerintah, program tetap dijalankan walaupun tanpa partisipasi rakyat sekalipun. Inilah yang kemudian antara kebutuhan rakyat dan kewajiban pemerintah untuk membangun dan memberdayakan rakyat miskin tidak sinkron. Sehingga, pemilu ini rasanya seperti pesta demokrasi saja, bukan menjadi ajang penghakiman bagi aparat negara yang tidak sensitif terhadap isu rakyat.

16 Hal in terungkap dalam diskusi-diskusi di setiap forum aliansi, terutama di Jombang, Mojokerto dan Kediri sepanjang tahun 2008 dan 2009

17 Sikap ini tergambar jelas dalam pertemuan-pertemuan yang terjadi di kelompok-kelompok maupun di forum-forum aliansi misalnya di Konsorsium Rakyat Jombang (KRJB) dan Serikat Rakyat Kediri (SRKB) serta di pertemuan-pertemuan antar kelompok di Nganjuk.

18 Kasus konflik tanah di Kecamatan Ngancar ini terjadi antara petani yang ada di tiga desa dengan PT. Sumpersari Petung yang semula sudah dimenangkan oleh petani, tetapi kemudian dianulir oleh Mahkamah Agung.

Kondisi pemerintahan yang semrawut/kacau dan tidak memiliki orientasi kerakyatan, berbeda dari yang terjadi di kelompok-kelompok yang berjejaring dari Mojokerto hingga Tulungagung. Mereka tetap menginisiasi kegiatan-kegiatan untuk menyelesaikan persoalan konkret di komunitas sendiri. Bagi mereka, kegiatan konkret dapat lebih menjamin kebutuhan mereka, sehingga kegiatan pengembangan ekonomi atau koperasi kelompok selama tahun 2009 tetap berjalan.

Anehnya, ketika ada program Koperasi Wanita dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, justru pemerintah kabupaten membentuk koperasi wanita baru, bukan mendorong dan mendukung kelompok yang sudah hidup di desa-desa. Lebih jauh lagi, program Koperasi Wanita ini di Jombang, Nganjuk, dan Kediri dimanfaatkan oleh istri bupati untuk memperkuat basis politik.¹⁹ Akibatnya, kelompok-kelompok yang belum bersentuhan dengan jaringan birokrasi tidak dianggap sebagai penerima manfaatnya. Ada juga kelompok di Mojokerto dan Tulungagung yang memperoleh program tersebut karena memiliki hubungan yang dekat dengan pemerintahan desa.²⁰

2. Politik Uang Mewarnai Pemilu 2009

Mahkamah Konstitusi telah merevisi Undang-undang Pemilu yang berkaitan dengan calon jadi yang berdasarkan nomor urut melalui suara terbanyak. Sisi negatif dari keputusan ini adalah fungsi partai politik menjadi kerdil. Pertarungan menjadi sangat bebas antar-caleg, baik yang berada di dalam satu partai maupun berbeda partai.

19 Di Jombang, menurut informasi yang diterima dari Dinas Koperasi dan UKM, keputusan tentang siapa yang mendapat dana dari proyek tersebut berada di tangan istri bupati. Di Kediri dana dari proyek tersebut disinyalir digunakan oleh istri pertama bupati Sutrisno untuk kampanye dirinya dalam Pilkada 2010

20 Koperasi Al Barokah di Warugunung kecamatan Pacet dan Koperasi Ibu-ibu di Selorejo kecamatan Ngunut

Pada pemilu-pemilu yang lalu, politik uang terjadi. Saat ini pemilu yang berbasis pada suara terbanyak cenderung lebih menyuburkan praktik politik uang. Kenyataan ini tidak bisa diingkari. Karena para caleg tidak lagi bisa mengandalkan suara yang didapat oleh partai. Proses ini membutuhkan uang yang banyak jika harus dilakukan dalam waktu singkat. Seiring dengan waktu yang mendekati hari H pemilihan umum, para caleg harus bekerja ekstra dengan modal yang ekstra pula untuk mendapatkan suara rakyat. Caleg yang tidak populer di masyarakat pemilih di daerah pemilihan menggunakan politik uang dan kekuatan modal untuk memenangi pemilu legislatif.

Selama masa kampanye terbuka Pemilu 2009, kasus politik uang menjadi pelanggaran pemilu terbanyak yang dilakukan partai politik dan calon anggota legislatif. Rakyat melawan situasi ini dengan sikap acuh tak acuh. Dampaknya membuat pelanggaran politik uang menjadi budaya dan tidak terbandung lagi.²¹

Besarnya pengaruh politik uang dalam Pemilu 2009 masih sangat signifikan, baik yang secara terang-terangan maupun yang terselubung. Berbagai macam cara dilakukan para caleg: mulai dari melakukan pertemuan umum, pertemuan khusus, hingga pertemuan di hotel. Mulai dari membagi-bagi semen, bahan kebutuhan pokok, jilbab, amplop, bantuan modal, pembangunan fisik, hingga uang kontan. Juga mengobral janji-janji dan sumpah serapah yang semata untuk menggaet pemilih.²²

21 Selama ini tidak ada penegakan hukum berkaitan dengan pelanggaran ini. Sehingga pelanggaran ini dianggap sesuatu yang lumrah. Dalam Pilkada di Jombang 2008, Panwaslu menangkap basah salah satu calon membagikan uang dan bahan kebutuhan pokok kepada pemilih di beberapa desa, tetapi kemudian tidak ada proses hukum selanjutnya. Perkaranya berhenti begitu saja.

22 Hal ini dialami secara langsung oleh kelompok-kelompok yang tergabung dalam forum aliansi. Pernyataan ini keluar dari mereka ketika mengadakan pertemuan aliansi.

Bagaimana dengan nasib “caleg miskin” yang tak berduit dan hanya bermodalkan visi-misi dan kepercayaan diri? Mereka praktis tersingkir. Tidak heran jika tidak ada perubahan signifikan atas hasil pemilu selama ini, dan tetap saja tidak membuahkan hasil yang bagus untuk bangsa. Membagi-bagikan uang menjelang pemilu juga terbukti dapat mengalahkan perolehan suara para caleg yang selama bertahun-tahun membela dan memperjuangkan hak-hak rakyat, khususnya warga miskin, seperti hak mendapatkan pendidikan yang layak dan hak memperoleh pelayanan kesehatan.

3. Organisasi Koperasi Bukan Sekadar Isu Ekonomi

Ada perbedaan penting yang dapat kita rasakan antara koperasi yang berdiri untuk pelayanan terhadap anggota dan non-anggota. Pada koperasi yang berdiri untuk anggota yang bergerak di desa-desa saat ini, di antara anggota sudah saling mengenal dan merupakan anggota dalam sebuah kelompok.

Sedangkan koperasi yang hidup dari keuntungan uang semata, tidak pernah mempunyai cita-cita untuk membangun lingkungan sekitarnya. Sebab, koperasi ini didirikan tanpa tujuan menyelesaikan persoalan ekonomi anggota, namun hanya untuk mencari keuntungan pemilik modal (pengurus).

Koperasi itu berbeda dari koperasi yang berdiri dan bergerak di desa-desa saat ini. Masyarakat mendirikan koperasi juga untuk media berkumpul dan membicarakan persoalan-persoalan anggota. Tentu saja koperasi ini dapat menjadi bagian penyelesaian masalah ekonomi anggota. Namun yang jauh lebih pokok adalah berdirinya koperasi di desa-desa itu adalah sebagai media untuk menyelesaikan persoalan sosial. Koperasi digunakan untuk menggerakkan sumber daya modal yang tercerai berai di rumah-rumah penduduk, kemudian dikumpulkan menjadi satu

dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Koperasi di desa-desa ini dibentuk dan digerakkan dalam semangat membangun desa, bukan semata-mata urusan keuntungan uang.

Saat ini koperasi tersebut telah berdiri di desa-desa. Lewat koperasi, para anggota mengundang inisiatif dan ide-ide penyelesaian persoalan yang mereka hadapi. Mereka secara rutin bertemu dalam forum koperasi. Dari desa mereka mulai menggerakkan sumber daya uang untuk kebutuhan anggota. Dengan koperasi mereka menggerakkan sumber daya manusia untuk kemajuan desa. Mereka juga berhubungan dengan desa lain melalui koperasi untuk berbagi pengalaman ataupun untuk kepentingan pendidikan perkoperasian. Saat ini mereka telah membuat sindikat atau jaringan antarkoperasi. Mereka berhubungan baik di tingkat kabupaten maupun antarkabupaten. Koperasi di desa-desa ini secara tegas menunjukkan diri sebagai soko guru gerakan membangun desa.²³

Gerakan koperasi yang mulai menunjukkan perjuangan kedaulatan ekonomi ini patut diacungkan jempol bagi kader-kader di tiap koperasi desa karena menjadi penggerak dan tumpuan koperasi. Kader-kader ini merupakan salah satu tokoh penting dalam keberhasilan gerakan koperasi. Selanjutnya kader-kader ini harus bergerak ke desa-desa lain untuk mendorong dan membantu mendirikan koperasi baru.²⁴

23 Koperasi-koperasi ini selalu berbasiskan kelompok. Setelah mereka berkelompok karena memiliki persoalan yang sama dalam satu komunitas, baru kemudian mendirikan koperasi untuk menyelesaikan satu persoalan juga: ekonomi.

24 Kader-kader ini dilatih dalam sebuah pelatihan khusus tentang Koperasi yang berperspektif komunitas. Titik tekan pelatihan, disamping seluk beluk dan teknik perkoperasian, adalah mengembangkan ketrampilan kader dalam menggerakkan orang untuk terlibat dalam koperasi dan kegiatan-kegiatan kelompok

Kalau hal itu bisa kita lakukan terus-menerus dalam dua atau tiga tahun ke depan, tidak mustahil masyarakat bisa menjadi penguasa di desa-desa, kabupaten, bahkan penguasa di Jawa Timur. Penguasa dalam arti tidak dikuasi dan dirugikan oleh pemerintah dan aktor-aktor yang berlawanan dengan kepentingan rakyat. Rakyat berkuasa atas sumber daya alam sendiri, berkuasa atas keinginan sendiri, berkuasa untuk mengelola dan memajukan desa.

Saat ini di Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Kediri, dan Tulungagung ada 37 koperasi aktif dan 25 kelompok yang sedang menyiapkan koperasi di 5 kabupaten.²⁵ Angka itu belum termasuk dalam perkembangan kader-kader yang mengembangkan koperasi di desa-desa lain. Ke depan akan banyak koperasi di desa-desa. Koperasi tersebut merupakan soko guru gerakan membangun desa yang akan dicatat dalam sejarah perjuangan kedaulatan rakyat. Membangun desa dengan berkoperasi adalah cara kecil masyarakat dalam berjuang. Dan itu bukan hanya sebagai gerakan ekonomi, tetapi juga menjadi bagian penting dari gerakan politik.

4. Kasus Tanah Picu Gerakan Politik

Isu perebutan akses tanah bukan hanya seputar tanah, melainkan juga persoalan kebijakan politik negara yang selama ini tidak berpihak kepada kaum miskin. Isu tanah adalah isu politik/kebijakan, sehingga munculnya organisasi perlawanan petani di beberapa daerah seperti Kediri, Mojokerto, dan Jombang merupakan cermin kekuasaan yang tidak memperhatikan nasib rakyat melalui akses tanah yang lebih adil.²⁶

25 Dalam pertemuan terakhir di Jombang (KRJB) sejak pertengahan tahun 2009 mendiskusikan kelanjutan gagasan untuk mendirikan koperasi sekunder (induk) yang menjadi koperasi penjamin bagi koperasi-koperasi yang ada di kelompok.

26 Situasi kemiskinan yang disebabkan karena tidak adanya keadilan dalam distribusi tanah, biasanya akan menimbulkan kasus kekerasan petani yang semakin tinggi. Di tiga kabupaten ini sering terjadi demonstrasi tentang persoalan tanah.

Kasus tanah di wilayah Mataraman ini cukup menyita perhatian banyak pihak. Salah satunya adalah pembangunan jalan tol Mojokerto - Kertosono sepanjang 40,5 kilometer yang melintasi wilayah Kabupaten Mojokerto dan Jombang. Jalan tol ini merupakan bagian dari jalan tol trans Jawa. Proyek pembangunan ini menuai banyak masalah. Rakyat²⁷ melakukan respons terhadap proyek yang penuh masalah ini dengan melakukan perlawanan. Dan, perjuangan rakyat seperti yang digelorkan korban tol Trans Jawa di Kabupaten Jombang ini akan selalu hadir beriringan dengan munculnya kebijakan pemerintah yang dirasakan tidak adil terhadap rakyat.

Di sisi lain, konflik yang melibatkan rakyat dengan pemerintah ini juga diiringi tindakan intimidatif yang berusaha melemahkan gerakan rakyat. Tindakan intimidasi ini dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari tindakan aparat pemerintah yang paling bawah hingga aparat pemerintah di tingkat kabupaten. Bahkan, juga dengan mengerahkan kalangan rakyat. Namun ketika rakyat mau mengorganisasi diri dan memberikan perlawanan yang cukup terorganisasi, pemerintah pun akan berhati-hati dalam mengambil tindakan.²⁸

Lain halnya di Kabupaten Kediri yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Jombang. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran (terutama kaum tani di pedesaan) serta merebaknya sengketa dan konflik pertanahan, menjadikan Kabupaten Kediri memiliki agenda agraria yang dinamis. Pembaruan reforma agraria sejati dimandatkan dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

27 Terutama rakyat yang tanahnya, baik tanah sawah, kebun, pekarangan atau rumah tinggal, terkena lintasan jalan tol

28 Adanya perlawanan dari rakyat akan menyebabkan opini semakin dikuasi oleh rakyat, sehingga pemerintah lebih peduli dalam merespon kasus-kasus pertanahan.

dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun, program ini dinilai hanya omong kosong. Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) yang dijanjikan Presiden melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada Juli tahun 2007 masih sebatas janji. Belum ada tanda-tanda direalisasikan, bahkan sosialisasi di tingkat daerah pun belum dilakukan.

Program pembaruan agraria disambut baik oleh beberapa organisasi tani lokal di Kabupaten Kediri. Bagi mereka, ini merupakan angin segar dan pintu masuk perjuangan rakyat untuk memiliki hak atas tanah yang dikuasai perusahaan negara (PTPN XII dan PT Sumbersari Petung) sejak tahun 1960-an. Program PPAN membangkitkan kembali semangat perjuangan mereka yang hampir padam. Kabar yang beredar dari mulut ke mulut akhirnya mengumpulkan mereka dalam acara sosialisasi ala rakyat. Sepuluh hingga dua puluh orang berkumpul untuk membicarakan hal itu. Acara di Dusun Badeg, Desa Sepawon, pada 18 Juli 2007 ini dihadiri beberapa pejuang tani sekitar Hutan Manggis, Satak, Sepawon, dan Babadan.

Daftar kasus tanah di Kabupaten Kediri cukup banyak dan bervariasi. Ada yang bersengketa dengan perkebunan (PTPN), ada pula yang berkasus dengan PT Perhutani. Di Dusun Sanding, Desa Babadan, Kecamatan Ngancar, sengketa tanah terjadi antara masyarakat dan PT Perkebunan Sumbersari Petung yang dianggap telah merampas tanah rakyat dengan meng-HGU-kan tanah tersebut. Rakyat pun berjuang mengambil kembali tanah mereka, meski perjuangan itu tidak mudah dan memakan waktu bertahun-tahun. Hak guna usaha PT Perkebunan Sari Petung telah habis pada tahun 2000, namun perusahaan tidak serta merta mengembalikan status tanah. Rakyat harus berjuang keras hingga akhirnya tanah berhasil dikuasai, menjadi hak milik rakyat dan mulai digarap pada tahun 2006. Namun, masalahnya sampai

saat ini masih ada problem sertifikasi, meskipun mereka sudah membayar ke BPN Kediri.

Persoalan tanah juga terjadi Mojokerto, yaitu di Desa Sendi, Kecamatan Pacet, antara petani dan Perum Perhutani KPH Pasuruan RPH Pacet. Melalui organisasi rakyat Forum Perjuangan Rakyat, petani terus berjuang menuntut hak atas tanah warisan nenek moyang sejak jaman Belanda. Perjuangan merebut hak atas tanah yang dikuasai Perum Perhutani ini terus dijalankan hingga sekarang. Belum ada titik temu yang mengedepankan kepentingan rakyat kecil.

Isu tanah ini kemudian menjadi komoditas dalam Pemilu 2009. Perjuangan organisasi-organisasi rakyat dalam menyelesaikan kasus tanah berhadapan dengan situasi politik elektoral. Mau tidak mau kasus tanah menjadi salah satu janji politik para kader partai. Situasi kasus tanah di beberapa kabupaten ini akhirnya berujung pada upaya untuk merebut kekuasaan politik. Karena tanah adalah persoalan kebijakan politik, sehingga penguasa politik harus mendukung mereka untuk menyelesaikan. Penggunaan janji-janji politik para politikus dengan mengangkat kasus tanah dimanfaatkan untuk terus mendorong warga bersuara tentang kasus tanah yang mereka hadapi.

Strategi Rakyat Menghadapi Pemilu 2009

1. “Curi” Uang Caleg untuk Perkuat Kelompok

Praktik pemberian uang selama Pemilu 2009 tidak terhindarkan. Gencarnya serbuan tawaran untuk mendapatkan suara dengan pemberian uang mendorong kelompok-kelompok untuk membicarakan hal ini lewat pertemuan bulanan. Seperti di Mojokerto, Nganjuk, Tulungagung, dan Kediri melalui

pertemuan forum aliansi kelompok-kelompok: SPRM, KRJB, SRKB. Akhirnya disepakati bahwa kelompok akan terlibat dalam proses politik tersebut. Khusus di Jombang, KRJB (organisasi aliansi kelompok) memutuskan membebaskan kelompok dalam menentukan langkah politik dalam Pemilu 2009.

Upaya kelompok untuk menyepakati menerima uang atau barang dari para calon anggota legislatif adalah untuk menjaga mental anggota kelompok juga. Sebab, jika tidak disepakati dalam kelompok, praktik itu justru akan merusak mental dan persatuan. Kesepakatan tersebut merupakan salah satu upaya perlawanan kelompok. Kesepakatan tersebut adalah: penerimaan uang tidak boleh dilakukan secara individu, tetapi diterima oleh kelompok melalui media pertemuan.²⁹ Hal ini dilakukan juga dengan alasan, “mengapa tidak diterima, toh para caleg tidak akan pernah memperjuangkan kepentingan masyarakat di masa depan jika mereka terpilih?”.

Uang pemberian dijadikan sebagai uang kelompok, sehingga bisa dikelola kelompok menjadi kegiatan-kegiatan bersifat non-ekonomi ataupun ekonomi. Koperasi milik kelompok dijadikan alat untuk mengelola uang yang diterima dari para caleg. Uang pemberian caleg digunakan untuk meningkatkan modal simpan-pinjam koperasi kelompok. Bahkan, di Kediri uang yang diterima dari caleg digunakan untuk mendirikan koperasi kelompok. Bagi koperasi yang baru, kontrol kelompok lebih ketat karena harus segera mempelajari tata cara berkoperasi. Ada konsekuensi yang disepakati, jika koperasi tidak segera berdiri, maka tambahan uang modal akan dikembalikan.

Kelompok perempuan di Nglaban, Jombang, menggunakan uang dari caleg sebagai modal pinjaman bagi koperasinya. Di

29 Kesepakatan ini pertama-tama dilakukan oleh KRJB di Jombang, namun kemudian juga menyebar dan dilakukan juga oleh kelompok-kelompok yang ada di Mojokerto, Kediri, dan Nganjuk

Kelompok Pemuda Keramat, Jombang, uang digunakan untuk modal usaha laundry, sehingga tidak habis begitu saja. Begitu pula yang terjadi di koperasi-koperasi kelompok di Nganjuk, Kediri, dan Tulungagung. Pada Kelompok Kramajetak, Mojokerto, uang dari caleg digunakan untuk pembangunan tangkis sungai. Sebelum menerima uang, kelompok di wilayah Pacet ini melihat latar belakang caleg, visi dan misinya, serta ada kontrak politik bahwa setelah menjadi legislatif kabupaten, caleg harus sering bertemu dan memperjuangkan persoalan masyarakat di sekitar Pacet.

Di Kediri ada tiga caleg yang menawarkan kerja sama kepada SRKB. Dari ketiga tawaran, yang membuahkan kesepakatan hanya satu caleg, yaitu Eman Hermawan dari PKB. Kesepakatan antara Eman dan penggerak di SRKB adalah mengelola dana pemenangan dalam bentuk bantuan modal untuk penguatan kelompok. Strategi yang digunakan adalah mendekati ke kelompok-kelompok, khususnya kelompok koperasi. Uang yang diterima dari tim sukses diterima kelompok untuk dikelola melalui koperasi menjadi modal. Bagi kelompok belum mempunyai koperasi, dana ini digunakan untuk mendorong pendirian koperasi. Dana bantuan modal tersebut sebagai dana pendirian kelompok-kelompok koperasi baru. Strategi ini dikembangkan di wilayah Kecamatan Semen, Puncu, Kandangan, dan di beberapa kecamatan lain.

Dana pemenangan ini disalurkan sebagai dana pinjaman selama satu tahun dan bukan dana hibah. Untuk kelompok yang belum mempunyai koperasi, jika dalam beberapa bulan koperasi tidak bisa didirikan, uang akan ditarik kembali. Jika dana yang dipinjamkan sampai batas akhir pengembalian, bisa dipinjamkan ke kelompok yang ditentukan oleh peminjam pertama. Pengelolaan dana pinjaman ini dilakukan oleh pengurus SRKB.

Dari proses ini diharapkan setiap anggota kelompok memberikan suara secara bulat kepada Eman Hermawan. Karena

dana dikelola kelompok dan tidak diberikan langsung kepada individu, maka suara semua anggota kelompok untuk Eman. Kelompok yang mendapatkan dana ini 21 kelompok di 21 desa dengan anggota sekitar 25 orang per kelompok.

Momentum ini betul-betul digunakan untuk mendorong dinamika kelompok. Di kelompok yang sudah terbentuk koperasi, kondisi ini justru menambah semangat para anggota untuk lebih aktif berkoperasi. Mereka datang setiap bulan dalam rapat bulanan sambil membicarakan persoalan-persoalan desa. Pendidikan berkoperasi pun dikembangkan bagi kelompok baru.

Terbentuknya kepengurusan dan pembuatan aturan disepakati secara demokratis. Memang ada beberapa kendala pada awal-awal pendirian karena trauma atas koperasi yang sebenarnya hanyalah untuk kepentingan perseorangan. Namun kendala ini teratasi dengan penjelasan-penjelasan nyata dengan contoh kesuksesan berkoperasi di kelompok lain. Tidak heran semula anggota SRKB 8 koperasi menjadi 21 koperasi, sedangkan 3 koperasi lainnya ditarik.

Dari pengalaman tersebut, ada pembelajaran penting tentang politik uang. Bahwa selama ini politik uang lebih dilihat kegunaannya hanya sesaat, tetapi jika diperuntukkan bagi kelompok yang tepat, bisa bermanfaat. Uang yang diberikan kepada individu akan habis. Uang suapnya sengaja diberikan secara kelembagaan, bukan orang per orang. Penyerahan uang pun dilakukan dalam rapat anggota koperasi untuk menjaga agar tidak dikorupsi salah satu kader atau tim sukses.

Pengalaman ini bisa berhasil karena ada sistem pertahanan di kelompok untuk menjamin organisasi terus berjalan. Mereka berkomitmen dan membuat kesepakatan bersama yang menjadi sistem organisasi. Sistem itu adalah aturan main yang jelas dan ada

pertemuan rutin kelompok. Selain itu, pengawasan pelaksanaan program sangat berperan untuk menjalankan eksistensi kelompok. Jika tidak ada sistem pengelolaan, maka dana habis dan justru memperkuat stigma bahwa setiap suara ada harganya. Meskipun demikian, rakyat tetap apatis memandang pemilu.

2. Keputusan Ragu Organisasi Aliansi

Pada pertengahan tahun 2009 diadakan pertemuan anggota KRJB Jombang untuk membicarakan sikap organisasi menghadapi Pemilu 2009. Pertemuan dihadiri pengurus KRJB, koordinator kecamatan, perwakilan kelompok, pembina, dan komite. Selama diskusi diketahui ada seorang perempuan dan seorang laki-laki dari kelompok anggota yang menjadi caleg melalui Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Indonesia Sejahtera.³⁰ Kondisi ini menjadi bahan pertimbangan apakah KRJB akan terlibat penuh dalam proses politik dengan menggunakan segenap sumber daya ataukah bersikap pasif.

Dengan berbagai pertimbangan, diambil tiga keputusan. *Pertama*, KRJB membebaskan setiap kelompok untuk memilih sebelum ada partai politik progresif yang dijadikan sebagai alat perjuangan politik. *Kedua*, kelompok harus mendukung anggota yang sudah menjadi caleg. *Ketiga*, perbedaan pilihan politik di dalam kelompok seyogianya tidak dijadikan sumber permusuhan.

Seminggu setelah pertemuan, ada salah satu anggota KRJB dari kelompok PKL mendapat tawaran dari Partai Demokrasi Pembaharuan untuk menjadi caleg. Tawaran ini sempat dibicarakan dengan kelompok-kelompok yang lain, dan tentu dengan pengurus KRJB. Dalam proses seleksi administrasi ini akhirnya muncul dua kader KRJB yang masuk dalam bursa

30 Titik dari dapil wilayah utara Jombang, dan Sunandar dari dapil kota

caleg dari PDP. Beberapa tahapan administrasi pencalegan sudah dilakukan. Namun, karena internal pengurus PDP Jombang kurang baik dalam menjaga hubungan yang memunculkan kekecewaan caleg dari KRJB, akhirnya kedua caleg mengundurkan diri.

Menjelang Pemilu 2009 di KRJB sudah muncul gagasan tentang majunya kader kelompok menjadi caleg. Gagasan ini sudah dijalankan dengan melakukan pemilihan kader yang disiapkan. Namun, karena KRJB belum dianggap oleh partai politik sebagai organisasi sosial yang memiliki kemauan untuk turut terlibat dalam pertarungan politik riil, maka tidak ada partai politik yang secara formal dan terus terang menawarkan atau meminta caleg dari KRJB. Hal ini disebabkan KRJB belum memiliki ketegasan sikap organisasi dalam menjawab tantangan untuk turut bertarung dalam pemilu.

Mengapa KRJB tidak memiliki sikap tegas tentang pemilu? Alasan yang dikemukakan pemimpin kelompok peserta rapat saat itu adalah KRJB belum mempunyai kader yang siap dalam kontes pemilu. KRJB belum diperhitungkan sebagai kekuatan politik praktis di level kabupaten. Selain itu, kelompok-kelompok anggota masih menyebar di desa-desa, sehingga jika diakumulasi sebagai kekuatan dalam proses pemenangan masih kurang kuat.

3. Sinkronisasi Caleg Pusat, Wilayah, Daerah, dan DPD: Mendorong Caleg dari Bawah

Jauh hari sebelum pertemuan organisasi aliansi, KRJB Jombang menerima tawaran dari calon Dewan Perwakilan Daerah Jawa Timur, Soepartono, melalui jaringan perkawanan. Tawaran ini kemudian diteruskan untuk dibicarakan di KRJB. Ada juga tawaran kerja sama dari Hery Sugianto (caleg DPRD Jawa Timur dari Golkar), Lukman (caleg DPR dari Golkar), dan caleg DPR dari PDIP. Empat hari sebelum masa kampanye berakhir, juga

datang tawaran dari KH Mustain Syafi'i, caleg DPR dari Partai Demokrat.

Caleg yang berada dalam satu daerah pemilihan (dapil) dengan Jombang untuk DPRD Jawa Timur dan DPR, setelah ada tawaran tersebut mulai dihubungkan. Misalnya untuk Dapil VIII yang meliputi Mojokerto, Jombang, Nganjuk, dan Madiun, kelompok-kelompok di Mojokerto dan Nganjuk dihubungi untuk diajak bicara berkaitan dengan tawaran tersebut.

Seperti halnya di Jombang, kelompok-kelompok di Kediri yang tergabung dalam SRKB juga mendapat tawaran kerja sama dari tim sukses beberapa caleg. Antara lain Eman Hermawan (caleg DPR dari PKB), Luluk Hamidah (caleg DPR dari PKB), dan Supra (caleg DPRD Jawa Timur dari PDIP). Namun, dari sekian caleg yang secara serius melakukan kerja sama adalah Eman Hermawan, yang sempat melakukan kampanye dan dikenalkan dengan kelompok-kelompok anggota SRKB. Sedangkan dua caleg yang lain tidak melanjutkan proses kerja sama karena tidak jelas rencana yang dibuat.

Di Mojokerto, karena keberadaan kelompok di pinggiran kota, maka komunikasi yang dibangun hanya dengan caleg DPRD Mojokerto saja. Kalaupun ada caleg DPR dari PKB yang dikomunikasikan kepada kelompok, itu pun hanya melalui beberapa anggota tim sukses. Jadi, komunikasi yang dibangun tidak cukup intensif.

Banyaknya tawaran politik kepada kelompok-kelompok membuat pengurus KRJB membicarakan dan mengkomunikasikan juga dengan kelompok-kelompok di Nganjuk. Sedangkan di Kediri, diskusi mengenai perkembangan proses politik dibicarakan di SRKB dan beberapa kontak dari Tulungagung. Sedangkan di Mojokerto, soal caleg lokal dibicarakan sendiri dan caleg DPRD

Jawa Timur hanya dikomunikasikan karena sudah ada tim sukses di tingkat kabupaten.

Dari beberapa calon kemudian diklasifikasikan menjadi calon yang memang secara personal kenal dan memiliki niat untuk rakyat dan calon yang baru dikenal meskipun tidak diketahui motivasinya. Ada klasifikasi siapa calon yang menyiapkan biaya kampanye dan yang tidak. Sebab, upaya mengenalkan calon kepada kelompok pasti membutuhkan dana, meskipun kecil.

Di Jombang, caleg-caleg belum cukup memiliki hubungan yang baik dengan KRJB, sehingga upaya pemenangan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Tujuan kolaborasi dengan caleg belum sampai pada upaya melakukan perjuangan meraih kuasa. Namun, baru sebatas menjaga kelompok untuk memanfaatkan biaya kampanyenya, daripada digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Selain itu, juga menjadi media belajar tentang politik. Hal ini disepakati sebagai salah satu cara agar solidaritas antaranggota organisasi aliansi tidak pecah.

Dengan proses yang cepat, selanjutnya ada komunikasi antar penggerak kelompok. Mereka berpikir mengenai keputusan yang sebaiknya diambil dan dilakukan. Berdasar klasifikasi calon-calon yang masuk itulah akhirnya lahir kesepakatan politik untuk mendukung calon DPD Soepartono dan caleg DPR Mustain Syafi'i. Kedua calon ini dipandang paling dikenal oleh kelompok di Dapil VIII Jatim (Mojokerto, Jombang, Nganjuk, dan Madiun). Hal inilah yang menjadi semangat untuk mendukung kedua calon tersebut. Kesepakatan di Jombang tentang dukungan kepada Soepartono disampaikan kepada penggerak di Mojokerto, khususnya kepada kelompok Forum Perjuangan Rakyat (FPR).

Proses pemenangan membutuhkan biaya, meskipun hanya untuk biaya operasional. Sedangkan faktanya KH Mustain

dan Soepartono tidak menyediakan biaya untuk itu. Padahal, calon-calon lain yang masuk ke desa-desa memiliki dana untuk kampanye. Akhirnya disusun strategi memanfaatkan dana calon lain, tetapi tidak merugikan suara pemberi dana. Maka secara teknis calon tidak bisa masuk ke sebuah kelompok secara langsung, tetapi melalui penggerak yang kemudian bertemu dalam sebuah rapat. Hal ini untuk mengontrol suara dan kepercayaan sekaligus manuver politik uang yang terjadi.

Keterlibatan kelompok-kelompok dalam pemenangan KH Mustain dan Soepartono adalah untuk alat konsolidasi dan menghitung kemampuan kelompok mengumpulkan suara. Ternyata suara yang diperoleh KH Mustain dan Soepartono cukup banyak. Di salah satu kelompok pemuda,³¹ komitmen 100 suara yang diberikan kepada calon hasilnya utuh untuk calon tersebut. Namun, ada juga di beberapa kelompok yang perolehan suaranya tidak sesuai dengan target.

Pembelajaran

1. Kekuasaan politik harus direbut, jika akan memperjuangkan nasib rakyat. Sebab, melalui kekuasaan politik, hak-hak rakyat bisa dilindungi dan dipenuhi melalui peraturan perundangan. Oleh karena itu, dalam percaturan politik seperti pemilu selanjutnya (2014), kader-kader dari kelompok harus maju sebagai upaya untuk memegang kendali kuasa politik. Salah satu strategi agar efektif dan tidak menyedot sumber daya dan dana yang banyak, caleg dari level pusat, regional, dan daerah harus satu paket. Dari level lokal (kabupaten), provinsi, dan nasional, serta DPD harus sinkron, sehingga tidak banyak energi yang terbuang dan dapat efektif dalam memobilisasi suara.

31 Yaitu kelompok Pemuda Dekrit di desa Badang Ngoro Jombang

2. Dalam pemilu mendatang pada tahun 2014, calon legislatif harus dipersiapkan dari sekarang, sehingga respons kader dan organisasi tidak lagi setengah-setengah.
3. Banyaknya kelompok perempuan yang difasilitasi dalam hal pelatihan dan peralatan oleh pemerintah bukan bagian dari kelompok terorganisasi yang selama ini bekerja secara bersama. Ke depan, fasilitas-fasilitas yang diberikan pemerintah untuk kelompok harus bisa diakses dan dimanfaatkan oleh kelompok, khususnya yang masuk dalam forum aliansi.
4. Proses politik yang terjadi dan kita intervensi bukan semata-mata untuk menjadikan orang duduk di parlemen, melainkan untuk memperkuat kelompok dan forum aliansinya. Jadi, momentum politik menjadi alat saja, bukan tujuan.

Catatan: Arah Gerakan Rakyat Menuju Pemilu 2014

Pengalaman tentang partisipasi rakyat di tingkat yang paling kecil dalam struktur administrasi negara, yakni desa, patut diberi catatan khusus. Memang, gerakan ini belum bisa menjangkau banyak kader untuk terlibat dalam proses perebutan kuasa politik. Namun, pengalaman ini menjadikan pengalaman sejarah perlawanan rakyat kecil dengan cara mendukung dan memilih pemimpin yang berpihak kepada kelasnya. Idealnya, memang pemimpin yang dipilih adalah dari kelas mereka sendiri, yakni kaum miskin dan kader-kader yang mengakar di pedesaan.

Melihat pengalaman dalam menghadapi Pemilu 2009, beberapa kelompok mulai anjang-ancang untuk menyiapkan keterlibatan dalam pemilu mendatang pada tahun 2014.

Pengalaman yang paling dirasakan kelompok-kelompok adalah semestinya bisa bertarung hanya dengan memperebutkan sekitar 3.000 hingga 4.000 suara di setiap daerah pemilihan (dapil).

Beberapa agenda yang mesti dipersiapkan untuk menghadapi Pemilu 2014:

1. Mempersiapkan kader politik yang siap bertarung dalam proses pemilihan kepala desa, BPD, anggota legislatif, dan bupati. Calon ini harus kader terbaik kelompok (bukan elite) yang dididik oleh kelompoknya dan memiliki kapasitas sebagai pemimpin. Agar calon memiliki kapasitas, mereka dibiasakan memimpin organisasi-organisasi kecil di lingkungannya. Dengan demikian, dari tahun ke tahun mereka akan memiliki kapasitas dan pengalaman mengelola organisasi yang sesuai dengan aspirasi anggota kelompok yang diwakili.
2. Dalam pemilu legislatif harus disiapkan paket calon legislatif dari tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Satu paket calon ini berkaitan dengan modal kemenangan yang bisa diefektifkan. Modal dalam hal ini bukan semata-mata uang, melainkan jaringan massa dan kader yang bisa bekerja untuk kemenangan yang efektif, karena bekerja sekali tetapi untuk banyak calon legislatif. Cara kerja ini khususnya di wilayah kabupaten, karena secara riil merekalah yang secara langsung berhubungan dengan suara pemilih. Jika menguasai suara di kabupaten, maka bisa menguasai suara di tingkat kabupaten dan nasional. Sebab, suara provinsi dan nasional berbasis dalam dapil-dapil.
3. Membangun jaringan antarkabupaten sebagai simpul politik yang biasanya diadministrasikan dalam istilah

dapil. Cara membangun simpul ini lebih efektif dilakukan antar organisasi aliansi di tiap-tiap kabupaten. Berangkat dari basis kegiatan yang selama ini dijalankan oleh berbagai kelompok di kawasan Mataraman (yang terdiri atas 2 daerah pemilihan. Mojokerto, Jombang, Nganjuk, dan Madiun masuk Dapil VIII Jatim. Kediri, Tulungagung, dan Blitar masuk Dapil VI Jatim. Aliansi sudah memiliki jaringan antar organisasi yang baik. Dari semua wilayah tersebut, hanya Blitar yang tidak atau belum memiliki jaringan yang baik.

Dinamika Gerakan Prodemokrasi Sulawesi Tengah Pra dan Pasca Pemilu 2009

*Simpul Sulawesi Tengah – FBB Prakarsa Rakyat*¹

Pengantar

Tulisan ini untuk memenuhi tradisi tahunan Forum Belajar Bersama (FBB) Prakarsa Rakyat: membuat catatan dokumentatif tahunan tentang inisiatif-inisiatif perlawanan rakyat terhadap dinamika politik, baik sektoral maupun lokal, sebagai bahan belajar bersama. Seperti tahun 2008, FBB Simpul Sulawesi Tengah tetap mengedepankan prinsip “partisipasi dan kebersamaan” dalam proses penulisan, sehingga menjadi karya dan milik bersama.

1 Tulisan dipersiapkan oleh Nasution Camang, Ferry Anwar, Andika, Wilianita Selviana dan Edmond Leonardo.

Dengan prinsip demikian, penulisan secara “tim” yang dibarengi proses konsultasi dengan aktor-aktor prodemokrasi lainnya melalui forum diskusi, menjadi keharusan. Tim penulis melalui lima kali diskusi untuk menyelesaikan naskah awal tulisan ini. Setelah itu baru dikonsultasikan dalam forum diskusi terbuka bersama kawan-kawan aktivis prodemokrasi lainnya untuk meminta masukan dan persetujuan terhadap substansi tulisan.

Diakui, tim penulis sempat gamang ketika memulai penulisan. Gamang dalam memilih dan menentukan fokus tulisan. Pasalnya, kecenderungan umum perlawanan rakyat setelah Pemilihan Umum 2009 tidaklah berbeda dari kecenderungan tahun 2008, dan kecenderungan itu pun telah ditulis dan dipresentasikan pada Workshop Nasional FBB di Bali, awal 2009. Akhirnya disepakati untuk merekam dan mengidentifikasi saja keseluruhan bentuk inisiatif perlawanan yang mengemuka sepanjang 2008 hingga Januari 2010. Harapannya dari sana terpetakan kecenderungan umum pola gerakan, termasuk konteks persoalan dan capaian-capaiannya sebagai fokus isi tulisan.

Tulisan ini hasil dari kegamangan tersebut, sehingga kekeliruan dan kekurangan berserakan di sana-sini. Meskipun tulisan telah mendapat masukan dan persetujuan kawan-kawan prodemokrasi dalam diskusi terbuka, segala kekeliruan dan kekurangan dalam tulisan ini tetaplah menjadi tanggung jawab penulis.

Gambaran Umum Sulawesi Tengah

Sulawesi Tengah (Sulteng) sering dianalogikan sebagai jantung Sulawesi. Sebab, dalam peta, provinsi yang dilewati garis katulistiwa ini memang terletak di tengah-tengah pulau berbentuk huruf “K” itu. Sulteng juga merupakan provinsi terluas di Pulau

Sulawesi. Wilayah daratannya 68.033 kilometer persegi ditambah luas wilayah laut 189.480 kilometer persegi yang terbagi dalam wilayah administratif 9 kabupaten dan 1 kota, terdiri atas 111 kecamatan, 129 kelurahan, dan 1.404 desa (BPS Sulteng, 2007).

Provinsi Sulteng bentang alamnya sekitar 42,80% bergunung-gunung dengan tingkat elevasi 500 hingga 2.835 mdpl ini berpenduduk 2.402.794 jiwa. BPS mencatat tingkat kepadatan rata-rata penduduk 36,39%. Pertanian merupakan sumber utama mata pencaharian penduduk. Selain padi sebagai tanaman utama, kopi, kelapa, kakao, dan cengkeh juga merupakan tanaman populer dan menjadi unggulan sektor perdagangan.

Hal itu menunjukkan tipologi masyarakat Sulteng dominan bercorak agraris, terlebih jika melihat konsentrasi mukim penduduknya yang lebih dari 60% tinggal di pedesaan dengan sekitar 50% dari keseluruhan desa terletak di sekitar kawasan hutan dan 10% di dalam kawasan hutan.² Selain itu masih terdapat sekitar 57.941 jiwa komunitas adat terpencil (KAT) yang tinggal di dalam kawasan hutan.³ Dengan demikian, boleh dibilang selain bergantung pada hasil pertanian, basis ekonomi masyarakat juga bergantung pada hasil hutan.

Ironisnya, desa-desa yang ditinggali lebih dari setengah jumlah penduduk Sulteng itu juga merupakan tempat terkonsentrasinya sebagian besar penduduk miskin, yang angkanya menurut lansiran MDGs Indonesia berkisar 23,67%, lebih tinggi dibandingkan angka kemiskinan nasional yang mencapai 17,75%. Disebut ironis karena fenomena kemiskinan itu berlangsung dalam

2 Diolah berdasarkan data Bappeda Sulteng, 2003.

3 Jumlah ini adalah populasi KAT yang belum diberdayakan, dalam satuan mukim desa. Laporan Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, Dirjen Pemberdayaan Sosial Depsos RI dalam URL <http://www.katcenter.info/pemetaan/petanasional.php?level=1>. Diakses 14 Januari 2010.

wilayah yang potensi sumber daya alam (SDA) dan lahannya relatif kaya.

Sumber daya mineral semisal nikel dan emas terdapat di hampir semua wilayah kabupaten dan kota. Sedikit contoh, nikel laterit dengan kandungan besi mencapai 50% ditemukan di sekitar Danau Matano dan Daerah Hulu Sungai Kalaena, Kabupaten Morowali (Reid,1988; Anto Sangaji, 2002). Deposit emas kurang lebih 2 juta ons dengan kadar mencapai 65% terdapat di Blok Poboya (Kota Palu). Cadangan Migas di Blok Toili diketahui terbesar di Pulau Sulawesi, diperkirakan 2,89 TSCF atau setara 23 juta barel.

Di sektor kelautan, sumber daya perikanan dan biota laut lainnya tersebar di Teluk Tolo, Teluk Tomini, Selat Makasar, dan Laut Sulawesi dengan potensi 330.000 ton per tahun. Sedangkan ikan yang bisa dikelola secara lestari sekitar 214.000 ton per tahun. Di sektor pertanian, terdata (2006) adanya potensi lahan pertanian produktif untuk kategori lahan basah seluas 129.801 hektare yang baru dimanfaatkan 87.272 hektare, ditambah lahan kering 2.029.161 hektare dan baru dimanfaatkan 1.203.459 hektare.⁴

Pada sektor kehutanan, terdapat potensi kayu bulat kurang lebih 114.583,25 m³, kayu gergajian 90.308.477,5 m³, dan kayu eboni 708,32 m³, rotan 13.908.462 m³, damar 1.468.826 m³, serta hasil hutan non-kayu lainnya.⁵ Data tahun 2000 menunjukkan ekspor hasil industri pengolahan kayu US\$ 9.501.085 atau 54% dari total ekspor hasil industri atau 14% dari total ekspor Sulawesi Tengah (Walhi Sulteng 2007, Profil Masalah Kehutanan di Sulteng).

4 Data berdasarkan Presentasi Dinas Perkebunan Sulteng 2009 pada Workshop Advokasi Sawit.

5 Lihat Portal Nasional Republik Indonesia, URL: http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&cid=3546&Itemid=1969.

Konteks Politik dan Ekonomi Politik

Fakta kemiskinan di tengah kekayaan sumber daya alam tersebut tampak cukup memperkuat alasan untuk mewajarkan kesimpulan Lili Hasanudin,⁶ bahwa fenomena kemiskinan di Sulteng tergolong kemiskinan struktural. Penyebabnya antara lain; (a) rendahnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan; (b) terbatasnya lapangan kerja, kalah dalam persaingan dalam kegiatan ekonomi; (c) terbatasnya kapasitas prasarana; dan (d) terbatasnya dukungan sistem dan kelembagaan sosial, ekonomi, dan politik. Salah satu akar persoalan dari semua penyebab kemiskinan struktural tersebut paling tidak dikarenakan politik investasi yang berorientasi obral sumber daya alam dengan pendekatan kebijakan promodal.⁷

Orientasi politik investasi ini pada akhirnya mengakibatkan ketimpangan distribusi lahan. Pemerintah dan pemerintah daerah telah mengalihkuasakan lebih dari tiga jutaan hektare atau di atas 50% wilayah Sulteng ke tangan segelintir pemilik modal. Pada sektor perkebunan sekitar 20 perusahaan menguasai areal konsesi seluas kurang lebih 93.135 hektare. Di sektor kehutanan, 14 perusahaan menguasai areal konsesi sedikitnya seluas 951.705 hektar. Selain itu, pemerintah daerah masih mengeluarkan ratusan izin pemanfaatan kayu (IPK) dengan luasan areal masing-masing maksimal 10.000 hektare. Pada sektor pertambangan, sekitar 6 perusahaan mengantongi izin kontrak karya (KK), 100 perusahaan

6 Lihat: Lili Hasanudin, "Laporan Penelitian Cepat Tata Kelola Hutan di Provinsi Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Sulawesi Utara dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Program UNREDD," Disampaikan Kepada Rainforest Foundation Norway, Januari 2010.

7 Lihat: Edmon Leonardo, et.al., Belajar Merebut Kekuasaan, Pengalaman Gerakan Prodemokrasi di Sulawesi Tengah tahun 2009, "*makalah dipresentasikan dalam Workshop Nasional Forum Belajar Prakarsa Rakyat, di Bali 9-13 Februari 2009*".

mengantongi 151 izin kuasa pertambangan (KP), 68 perusahaan mengantongi surat izin pertambangan daerah (SIPD), dengan total luasan konsesi tidak kurang dari 2.405.162 hektare.

Bagi sebuah negeri agraris yang mengandalkan basis produksi pertanian, perkebunan, dan kehutanan sebagai lokomotif ekonomi daerah, kecenderungan itu pada akhirnya menggeser posisi petani (termasuk masyarakat adat) sebagai aktor ekonomi pedesaan yang utama. Hampir sebagian besar proyek pengembangan pembangunan pertanian dan perkebunan tidak lagi berbasis rumah tangga petani, tetapi pemilik modal. Selain itu, ekspansi pemilik modal juga kian memicu banyaknya konversi hutan dan lahan pertanian rakyat – baik berdasarkan mekanisme pasar maupun tekanan kebijakan – menjadi areal perkebunan besar. Konsekuensinya, banyak rumah tangga tani kemudian kehilangan sawah. Proletarisasi pun terniscayakan, dan sebagian petani telah menjadi buruh tani atau buruh perkebunan. Sebagian lagi mengintegrasikan diri ke dalam manajemen produksi perkebunan besar milik kuasa modal dengan posisi sebagai plasma, setengah buruh perkebunan dan setengah petani produsen. Hal itu menunjukkan kekuatan ekonomi politik kaum tani dan masyarakat adat kian terpinggirkan.

Kondisi ini diperparah oleh penyakit korupsi yang tak kunjung sembuh, bahkan menunjukkan peningkatan stadium. Pada tahun 2007 terdapat 40 kasus (13 kasus tindak lanjut kasus tahun 2006) dan disidangkan di pengadilan sebanyak 27 kasus, pada tahun 2008 kasus tindak pidana korupsi membengkak menjadi 97 kasus. Sebanyak 57 kasus masih tahap penyidikan, 7 kasus dihentikan penyidikannya (SP3), dan 33 kasus telah dilimpahkan ke pengadilan. Meskipun pada tahun 2009 kasus korupsi yang ditangani sedikit turun menjadi 87 perkara, proses penyelesaiannya terkesan lamban. Baru 47 kasus dalam tahap

penyelidikan dan hanya 13 kasus yang terdeteksi telah dilimpahkan ke pengadilan.⁸

Jika dipetakan, pelaku korupsi yang terendus dalam tiga tahun terakhir didominasi pejabat pemerintahan, dalam hal ini eksekutif, legislatif, dinas, dan departemen dengan prosentase kurang lebih 65%. Selebihnya pejabat BUMN dan BUMD 12%, penyelenggara pemilu (anggota KPUD) 6 %, penyelenggara sekolah 4%, institusi swasta yakni pengusaha dan kontraktor 10%, serta pengurus organisasi sosial 3%. Yang memprihatinkan, tidak kurang dari Rp 194,6 miliar dana yang dikorupsi,⁹ sekitar 90% berasal dari APBD (PAD, DAU, dan DAK), dan 10% sisanya adalah dana dari pendapatan pajak daerah.¹⁰

Kecenderungan tersebut, secara langsung atau tidak, berdampak pada berkurangnya alokasi anggaran untuk program-program jaminan dan layanan sosial dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan ataupun program-program pembangunan infrastruktur ekonomi masyarakat miskin, terutama di pedesaan.¹¹ Akibatnya, capaian pembangunan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat miskin hampir bergerak stagnan. Data BPS Sulteng tahun 2009 dan kajian ekonomoi regional Bank Indonesia Cabang Palu tahun 2009 menunjukkan persentase

8 Lihat: Ferry Anwar, "Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Institusi Penegak Hukum (Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi) Sulawesi Tengah, dalam Penanganan Perkara Korupsi Tahun 2009." Lihat juga *ibid*, halaman 3-4.

9 Patut dicatat, jumlah ini masih terbatas pada beberapa kasus yang bisa tereaksi. Artinya belum menunjukkan potensi kerugian dari seluruh kasus. Dari 87 kasus TKP pada tahun 2009 misalnya, hanya 29 kasus yang data potensi kerugiannya bisa didapat.

10 *Ibid*.

11 Dua jenis program ini menjadi lahan basah bagi koruptor, dengan modus operandi: Penyimpangan anggaran, mark-up, pengelapan atau penyunatan/pemotongan anggaran, manipulasi, suap/gratifikasi, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, laporan fiktif dan kegiatan/proyek fiktif.

penduduk miskin tahun 2009 (390.000 jiwa) hanya turun 1,7% dari tahun 2008 dan angka pengangguran hanya turun sekitar 1,9%. Hasilnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulteng 2009 terbilang rendah (66,6), di bawah IPM nasional.¹²

Menjelang dan setelah Pemilu 2009, orientasi politik investasi dan penyakit korupsi cenderung berlanjut. Sebab, konfigurasi kekuatan politik dan elite-elite pengambil kebijakan belum banyak berubah. *Pertama*, di parlemen, Pemilu 2009 masih menempatkan partai-partai besar seperti Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PDIP menjadi kekuatan dominan, dan diisi elite-elite yang komitmen kerakyatannya dinilai rendah.¹³ Hal ini paling tidak tercermin dalam APBD tahun 2009. Bayangkan, realisasi biaya fasilitas kesehatan masyarakat miskin dianggarkan hanya Rp 6,4 miliar, sudah termasuk program kesehatan masyarakat, perbaikan gizi, serta program peningkatan kesehatan ibu dan anak. Anggaran ini jauh di bawah biaya perjalanan dinas yang mencapai Rp 111 miliar ditambah Rp 10,53 miliar dari perubahan APBD

12 IPM dikembangkan oleh ekonom Pakistan Mahbub ul Haq tahun 1990, dan telah digunakan oleh UNDP dalam laporan tahunannya sejak 1993. Nilai IPM menunjukkan pencapaian rata-rata dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia yaitu: (1) usia yang panjang dan sehat yang diukur dengan angka harapan hidup; (2) pendidikan yang diukur dengan tingkat baca tulis dengan pembobotan dua per tiga dan angka partisipasi kasar dengan pembobotan satu per tiga, dan; (3) standar hidup yang layak yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita pada paritas daya beli dalam mata uang USD. Selama ini terdapat dua kriteria IPM, yaitu IPM tinggi dengan angka indeks di atas 80,00, IPM rendah dengan batas angka 79,90 - 50,00.

13 Walaupun perolehan suara partai Golkar pada Pemilu kali ini melorot dari 17 kursi (2004) menjadi 9 kursi (2009), namun Golkar masih tetap menempati perolehan posisi teratas. Artinya jatah ketua dewan mutlak tetap menjadi milik Partai Golkar yang kemungkinan besar masih menjagokan Aminuddin Ponulele yaitu ketua DPW Golkar Sulteng dan mantan Gubernur Sulteng di periode sebelumnya. Untuk porsi wakil ketua, salah satunya dapat dipastikan menjadi milik Partai Demokrat yang memiliki 6 kursi. Sisanya satu kursi lagi menjadi rebutan tiga partai yang sama-sama mengoleksi 4 kursi yakni, PKS, PAN dan PDIP. (Radar Sulteng, Edisi 24 Juli 2009).

sehingga menjadi 120,53 miliar.¹⁴ Eksekutif malah meningkatkan rencana biaya perjalanan dinas menjadi Rp 113 miliar dalam RAPBD 2010 dan, jika disetujui, angka ini masih berpeluang naik dalam perubahan APBD 2010. Meskipun pada awalnya legislatif memberikan kritik, akhirnya sepakat menerimanya untuk dibahas dan dikonsultasikan kepada Mendagri.¹⁵

Kedua, sejumlah pengusaha yang melakukan ekspansi bisnis di Sulteng merupakan aktor strategis dalam partai-partai pemenang Pemilu 2009. Sebagai contoh, Aburizal Bakrie. Ketua Umum DPP Partai Golkar ini, melalui PT Bumi Resources – anak perusahaan Bakrie Group – memegang izin kontrak karya Pertambangan Emas Blok Poboya, yang jika telah beroperasi bakal memberikan dampak ekologis terhadap masyarakat Palu, karena lokasinya dekat dengan kawasan permukiman perkotaan Kota Palu. Murad Husain adalah contoh lain. Bos PT Kurnia Group ini adalah bendahara DPW Partai Golkar Sulteng. Di Kabupaten Banggai, anak perusahaannya, PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS), mencaplok lahan warga transmigrasi dan merambah kawasan Suaka Margasatwa Bangkiriang untuk kepentingan perkebunan sawit.

Momentum pemilihan kepala daerah yang berlangsung serentak di empat kabupaten (Tojo Unauna, Poso, Sigi, Tolitoli) dan Kota Palu pada Juni 2010 serta Pilkada Gubernur 2011 sejatinya bisa memberikan harapan baru bagi perubahan konstruksi ekonomi politik yang menguntungkan masyarakat miskin. Namun dari konstelasi politik yang berkembang, tampaknya optimisme tinggi tidak patut ditumbuhkan. Sebab, *pertama*, rata-rata figur kandidat yang menyatakan kesiapan berkontestasi

14 Lihat: Nasution Camang, "Potret *Welfare State* Indonesia," tioncamang.worldpress.com, Januari 2010.

15 *Tempo Interaktif*, edisi 11 Desember 2009 dan *Harian Mercusuar*, edisi 22 Desember 2009.

adalah elite-elite politik lama yang umumnya berlatar belakang birokrasi, politikus, dan militer. Kalaupun terdapat figur di luar itu (profesional atau akademisi), tetap saja merupakan bagian “klan politik feodal” yang dibangun elite-elite politik lama tersebut. *Kedua*, meskipun berlangsung diam-diam, dukungan logistik sejumlah pengusaha besar – yang bergerak di bidang jasa konstruksi, tambang, perkebunan besar, dan kehutanan - kepada kandidat yang memiliki elektabilitas tinggi mulai mengalir, terutama kepada *incumbent*. Dapat dipastikan, targetnya tentu saja untuk keamanan dan keleluasaan berinvestasi.

Ekspresi Perlawanan Lokal

Di tengah kebijakan politik investasi yang eksploitatif dan menindas rakyat kecil serta konstruksi sosial politik yang manipulatif dan feodalis di Sulawesi Tengah menjelang dan setelah Pemilu 2009, riak-riak gerakan rakyat juga tetap eksis. Riak-riak itu, boleh dibilang, respons langsung terhadap perkembangan dinamika ekonomi politik dan sosial politik tersebut.

1. Aksi Sporadis

Dalam dua tahun terakhir, aksi-aksi konfrontatif yang bersifat sporadis dan spontan kembali mencuat. Aksi-aksi tersebut sebagai salah satu bentuk ekspresi perlawanan rakyat di Sulteng terhadap ekspansi pemilik modal dan proyek-proyek pembangunan yang merugikan dan mengancam keberlanjutan hidup mereka. Ambil contoh rencana investasi tambang nikel di Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai. Secara spontan masyarakat melakukan protes dengan merusak jalan perusahaan dan menutup lalu lintas kendaraan pengangkut material, karena merasa terancam oleh rencana investasi itu (Jatam Sulteng, 2008).

Bentuk perlawanan serupa ditunjukkan masyarakat yang mengorganisasi diri dalam Forum Komunikasi Masyarakat Kecamatan Tojo dan Tojo Barat (FKM-TTB) di Kabupaten Tojo Una-Una untuk memprotes PT Tritunggal, dan Masyarakat Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, yang mengorganisasi diri dalam Forum Masyarakat Peduli Lingkungan (FMPL) dalam menghadapi PT Satyaguna Sulajaya. FKM-TTB dan FMPL memobilisasi masyarakat memblokir jalan poros trans-Sulawesi dan menghadang kendaraan berat milik kedua perusahaan pemegang IUPHHK (izin logging) menuju areal konsesinya, sebagai bentuk protes. Motif berlawanan keduanya lebih menohok pada isu lingkungan. FKM-TTB resisten terhadap kehadiran PT Tritunggal karena eksploitasi kayu yang dilakukan menimbulkan krisis air di sejumlah desa di Tojo dan Tojo Barat, sementara FMPL mengkhawatirkan rencana eksploitasi PT Satyaguna Sulajaya bakal menimbulkan dampak serupa (Yayasan Merah Putih, 2008).

Di Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, protes masyarakat juga terjadi terhadap rencana pembukaan tambang emas oleh PT Kemilau Nusantara Khatulistiwa (KNK). Pasalnya, areal konsesi perusahaan dengan juru bicara Marwa Daud Ibrahim ini berada di dalam lokasi penambangan tradisional masyarakat, sehingga masyarakat terancam bakal kehilangan sumber pendapatan. Demikian halnya dengan masyarakat Desa Lintindu, Kecamatan Palele, Kabupaten Buol, yang 99% bekerja sebagai penambang. Masyarakat menolak rencana pembukaan tambang emas PT Suli Internasional, sehingga pada 18 Desember 2009 mereka - terdiri atas anak-anak, ibu-ibu, pemuda, dan orang tua - mengejar orang-orang perusahaan yang sedang mengukur lahan di pesisir pantai (Laporan Amir Pakude SH, LBH Sulteng, 2009). Sementara itu kelanjutan sengketa lahan antara PT INCO dan masyarakat Bahodopy dan One Pute Jaya di Kabupaten Morowali menghasilkan aksi penyegelan kantor (9/2/2009)

sebagai akumulasi kekesalan warga atas status tanah mereka di sekitar lahan PT INCO yang tidak jelas (Laporan YTM 2009).

Di Desa Peura, Kabupaten Poso, masyarakat menentang rencana pembangunan saluran udara tegangan ekstra tinggi (sutet) oleh PT Poso Energy (2009). Peralnnya, sutet tersebut dibangun di atas pemukiman warga dan melintas di antara persawahan (Laporan LBH Sulteng, 2009). Masih di Kabupaten Poso, masyarakat Tentena merusak kantor PLN Tentena, karena akumulasi kejengkelan terhadap pemadaman listrik yang berlangsung terus-menerus (*Media Alkhairaat*, 15 Desember 2009). Pelemparan kantor PLN di tengah aksi demonstrasi juga terjadi di Palu pada awal dan pertengahan 2009, terkait pemadaman listrik.

Gambaran aksi-aksi tersebut hanyalah sebagian contoh dari bentuk-bentuk perlawanan sporadis. Di luar itu terdapat aksi-aksi perlawanan yang – karena keterbatasan ruang - tidak diuraikan satu per satu dalam tulisan ini. Meskipun demikian, dari keseluruhan aksi tersebut, terdapat beberapa catatan yang dapat diberikan.

Pertama, meski pada umumnya aksi-aksi konfrontatif itu muncul sebagai reaksi langsung atas penggusuran, penyerobotan, atau pencaplokan lahan masyarakat oleh pemilik modal sebagai dampak dari politik investasi yang diterapkan pemerintah, beberapa di antaranya, seperti perlawanan FKM-TTB dan FMPL, juga dilandasi keprihatinan dan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan sebagai motif utama.¹⁶ Pada motif berlawanan seperti

16 Contoh lain adalah protes warga terhadap aktivitas pengerukan batu di sungai Sioyong oleh PT. Asean Tunggul Mandiri Perkasa (ATMP), 28 April 2009, untuk pembangunan tanggul penahan abrasi pantai di Desa Sabang Kec. Damsol Kab. Donggala, yang menelan korban 2 petani tertembak aparat Brimob Polda Sulteng. Perusahaan diprotes warga, selain karena akan menghancurkan sungai, aktifitas perusahaan ini juga mengancam sekitar 1200 ha sawah rusak akibat proses pendangkalan dihilir sungai tempat bendungan.

yang disebut awal, biasanya cenderung bermuara pada dua hal: aksi reclaiming atau tuntutan ganti rugi (ekonomi).¹⁷

Kedua, kebanyakan dari aksi-aksi itu tampak sebagai proses yang berulang-ulang, karena landasan kasus (konflik struktural) yang mendasarinya sudah terjadi beberapa tahun sebelumnya. Dinamika perlawanan, dalam artian massifitas radikalisisi berlawan, sangat fluktuatif mengikuti tingkat keterdesakan ancaman langsung yang ditimbulkan oleh operasi perusahaan. Di samping itu, kualitas radikalisisi berlawan juga amat dipengaruhi tingkat interaksi antara masyarakat korban dan LSM-LSM setempat ataupun LSM-LSM yang berbasis di Kota Palu (Ibu Kota Provinsi Sulteng). Namun, berbeda dari tiga hingga lima tahun sebelumnya, di mana radikalisisi masyarakat tumbuh melalui pengorganisasian atau pendampingan intensif, pada dua tahun terakhir radikalisisi kebanyakan dibangun oleh sejumlah aktor kritis dalam masyarakat sendiri. Posisi LSM hanya sebagai mitra konsultasi (termasuk diskusi-diskusi kritis) ataupun back up hukum dan kampanye. Langsung atau tidak langsung, perkembangan ini paling tidak buah dari proses pengorganisasian yang dilakukan beberapa tahun sebelumnya.

Ketiga, aksi-aksi perlawanan tersebut pada umumnya bisa memberikan efek pada terganggunya rencana dan aktivitas investasi perusahaan. Beberapa di antaranya bahkan berhasil menyetop rencana dan aktivitas eksploitasi perusahaan.¹⁸ Selain itu,

17 Reclaiming misalnya terlihat pada perlawanan petani (transmigran) di Toili Kab. Banggai atas pengusuran dan penyerobotan lahan mereka oleh PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS), atau aksi petani yang tergabung dalam Forum Tani Buol (FTB) atas lahan konsesi HGU PT Hardaya Inti Plantation. Sedangkan tuntutan ganti rugi tercermin pada aksi masyarakat desa Onepute Jaya kepada PT Inco atas posisi tanah dan status tanah mereka yang tidak jelas.

18 Perlawanan FKM-TTB umpamanya, berhasil menyetop operasi penebangan kayu PT. Tritunggal di Kecamatan Tojo dan Tojo Barat, Kab. Tojo Unauna. Setahun kemudian PT. Tritunggal memindahkan lokasi penebangannya di Kecamatan Lage,

organ-organ aksi yang terbentuk mampu tampil sebagai kekuatan kontrol sosial dan penyeimbang kekuatan politik dominan di level desa dan kecamatan, sehingga dapat dikatakan memberikan efek pada peningkatan kualitas demokrasi lokal, khususnya di level pedesaan.

Meskipun demikian, bentuk aksi-aksi sporadis dan spontan ini mengandung kelemahan mendasar. Salah satunya adalah potensi perpecahan yang tinggi, karena motif berlawanan yang hanya dilandasi kesadaran pragmatis (tuntutan ekonomi). Dalam beberapa kasus, konflik internal sering terjadi disebabkan beberapa anggota aksi telah dipenuhi kepentingan pragmatisnya oleh perusahaan, bahkan ada yang sampai memihak perusahaan. Kelemahan lain adalah organ perlawanan cenderung berumur pendek, karena arah dan target gerakan bersifat kasuistik. Manakala kasus atau tuntutan selesai, maka selesailah perlawanan. Kecenderungan ini tentu saja jauh dari harapan gerakan yang sifatnya ideologis, meskipun langsung atau tidak langsung, diakui tetap memberikan kontribusi. Misalnya, aktor-aktor kritis yang menggerakkan aksi-aksi sporadis itu kerap direkrut menjadi bagian dalam rencana perluasan gerakan di wilayahnya.

2. Front Advokasi

Menyadari demikian massif aksi-aksi sporadis rakyat dengan kelemahan-kelemahan mendasar yang melingkupinya, maka inisiatif untuk menyatukan aksi-aksi sporadis dalam sebuah gerakan perlawanan yang terorganisasi dan sistematis, kembali menggelitik kesadaran para aktivis prodemokrasi, khususnya

Kab. Poso. Hasil sama ditunjukkan oleh perlawanan FMPL Kecamatan Pagimana, Kab. Banggai. Pemerintah Daerah Banggai men-status quo-kan rencana operasi penebangan kayu PT. Satyaguna Sulajaya di Kecamatan Pagimana hingga saat ini.

NGO.¹⁹ Pembangunan front (baca juga: koalisi) advokasi menjadi pilihan. Patut dicatat, kesepakatan ini diambil setelah melalui perdebatan cukup alot. Sejumlah aktivis prodemokrasi pesimistis, mengingat pengalaman pembangunan front advokasi masa lalu yang tidak efektif memobilisasi perlawanan dan daya tekan dalam penuntasan kasus. Meskipun demikian, kesepakatan pembangunan front advokasi akhirnya dimaklumkan kembali sebagai kebutuhan yang tidak bisa dihindari, setelah melihat massifnya rencana-rencana ekspansi modal yang telah dan akan mengepung Sulteng.²⁰

Isu sawit dan tambang menjadi agenda utama advokasi. Sebab, pada dua sektor inilah pemerintah pusat dan pemerintah daerah (baik provinsi maupun kabupaten/kota) di Sulteng memprioritaskan orientasi pengembangan investasinya. Dan, karena sebaran lokasi investasi sawit dan tambang hampir merata di Sulteng, sementara sumber daya untuk pengorganisasian dan mobilisasi sangat terbatas, maka pembangunan front advokasi diarahkan untuk menghadapi investasi yang ancaman dan permasalahannya telah cukup manifes.

Pada tahun 2009 terbentuk dua front advokasi. Pertama, Koalisi Advokasi Tambang Poboya, yang dibentuk untuk menghadang rencana operasi PT Bumi Recourses. Strategi yang dibangun adalah mendukung aksi reklamasi penambang rakyat terhadap sebahagian areal konsesi PT Bumi Recourses. Caranya, mendesak Pemerintah Kota Palu untuk melegalkan kehadiran

19 Lihat antara lain: (1) Renstra 2008-2012 Walhi Sulteng hasil KDLH 2008; (2) Kesimpulan dan rekomendasi Workshop Advokasi Sawit Sulteng 2008 yang diselenggarakan Walhi Sulteng dan Sawit Watch; (3) Laporan Publik Walhi Sulteng 2008.

20 Lihat: Tion Camang, Kegelisahan di Café Telapak, "*Catatan diskusi gerakan prodemokrasi*," URL: <http://tioncamang.wordpress.com/2009/07/23/kegelisahan-di-cafe-telapak/>

pertambangan rakyat melalui seperangkat peraturan daerah dan izin pertambangan rakyat. Namun, dalam perkembangannya, koalisi kemudian mendapat tantangan dari sejumlah aktivis (individu) yang sebelumnya mendukung pembentukan koalisi, karena perbedaan pendekatan dan kepentingan dalam menyikapi aktivitas pertambangan rakyat.

Walhi dan Jatam Sulteng bersama sejumlah NGO lingkungan yang tergabung dalam koalisi menghendaki agar aktivitas pertambangan rakyat tersebut perlu juga ditata untuk menekan dampak ekologis, karena perkembangannya cenderung telah di luar kendali. Prosesnya diawali dengan moratorium (jedah) sementara. Kemudian dilakukan: (1) perencanaan tata ruang dan tata guna lahan terhadap areal pertambangan rakyat tersebut; (2) perumusan kesepakatan tata kelola bersama sesuai standar keselamatan dan keberlanjutan ekologi; (3) pengendalian tata distribusi bahan-bahan kimia pelebur emas (merkuri dan sianida); (4) rencana rehabilitasi lahan pasca-tambang. Setelah itu, barulah aktivitas dibuka kembali dengan memberikan legalitas pengelolaan. Pilihan strategi advokasi Walhi Sulteng dan Jatam Sulawesi dalam mendesakkan konsep tersebut adalah strategi kooperatif (berkawan) dengan Pemerintah Kota.

Sedangkan sejumlah aktivis yang disebut di atas tidak bersepakat dengan konsep moratorium. Bagi mereka, aksi reklamasi penambang rakyat adalah salah satu bentuk perlawanan rakyat. Mendorong Pemerintah Kota untuk melakukan moratorium merupakan taktik untuk melemahkan bahkan mematikan semangat perlawanan tersebut. Karena itu, kelompok ini kemudian bergabung dengan dan menjadi anggota Asosiasi Pertambangan Rakyat (Asperi) — organisasi yang diinisiasi, didukung, dan beranggotakan pemilik-pemilik tromol — untuk menolak moratorium dan tetap mempertahankan dilanjutkannya aktivitas

penambangan oleh rakyat. Bersama ketua adat setempat, Asperi mampu tampil sebagai pengatur dan pemberi izin bagi penambang rakyat di Poboya. Belakangan sikap Asperi berubah dapat menerima masuknya PT Bumi Recourses, asalkan pertambangan rakyat juga diberikan izin untuk tetap melakukan penambangan.

Proposal Walhi Sulteng dan Jatam Sulteng terkait penataan pertambangan rakyat Poboya sesungguhnya dapat diterima Pemerintah Kota dan berupaya mengimplementasikannya. Namun, karena sikap Pemerintah Kota Palu dan Pemerintah Provinsi Sulteng juga tak lagi resisten terhadap masuknya PT Bumi Recourses seperti ditunjukkan sebelumnya, akhirnya Walhi Sulteng dan Jatam Sulteng menarik diri, meskipun lobi dan kampanye moratorium tetap dilakukan. Sikap akhir Pemda Sulteng dan Kota Palu inilah yang pada akhirnya disetujui Asperi.

Kedua, Front Anti Sawit Sulawesi Tengah (Fast-ST) yang dibentuk untuk berlawanan terhadap ekspansi perkebunan sawit PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS) yang telah banyak merampas dan menggusur lahan masyarakat dan kawasan konservasi Suaka Margasatwa Bangkiriang. Proses pembentukannya berawal dari mandat masyarakat korban kepada Walhi Sulteng dan LBH Sulteng untuk melakukan bantuan hukum. Atas dasar itulah beberapa NGO kemudian bersepakat melakukan advokasi bersama dalam sebuah front, dengan agenda utama melakukan advokasi anti sawit di Kabupaten Banggai.

Berbeda dari Koalisi Advokasi Tambang Poboya, Fast-ST yang beranggotakan NGO dan Organisasi Tani di Kabupaten Banggai lebih memilih strategi konfrontasi dalam langgam advokasinya. Kerja-kerja advokasi dibagi dalam beberapa tim yang dibentuk, yakni tim lapangan, tim riset, tim hukum, tim meteri, dan tim kampanye. Desain dan tahapan kerjanya mengikuti desain kerja advokasi yang lazim: (1) melakukan pendidikan

politik kepada Organisasi Rakyat (OR) Petani Sawit dengan tujuan penguatan organisasi; (2) melakukan pembangunan aliansi-aliansi kepada OR lainnya sebagai pembangunan jaringan; (3) melakukan kampanye media massa tentang tuntutan-tuntutan OR Petani Sawit; (4) melakukan aksi-aksi lokal; (5) melakukan lobi dan negosiasi kepada instansi terkait untuk memenuhi tuntutan petani (notulensi diskusi 18 Agustus 2009).

Sejauh ini kerja tim tersebut sudah beberapa kali di evaluasi. Hasilnya, dilakukan perampingan karena beberapa tim dinilai kurang efektif dan maksimal dalam menjalankan perannya. Tim yang tetap dipertahankan tinggal tim lapangan, tim hukum, serta tim kampanye. Ketiga tim inilah yang hingga saat ini terus bekerja. Pada tingkat lapangan, kerja-kerja pengorganisasian telah beberapa kali memobilisasi aksi pendudukan di lokasi perkebunan sawit PT KLS, meskipun aksi itu belum berhasil membuat PT KLS tergerak memenuhi tuntutan masyarakat korban.

3. Front Politik

Berbarengan dengan pembangunan kembali front advokasi, konsolidasi front politik terus berlanjut. Front politik dimaksudkan sebagai pola dan taktik gerakan perebutan maupun perlawanan terhadap kekuasaan melalui penyatuan segenap kekuatan prodemokrasi, baik lintas sektor (tani, nelayan, buruh, masyarakat adat, dan perempuan) maupun lintas isu (lingkungan, gender, HAM, hutan, dan lain-lain). Dalam artian demikian, maka front politik sesungguhnya upaya transformasi gerakan prodemokrasi dari “gerakan sosial” menuju “gerakan politik”.

Untuk konteks Sulteng, kecenderungan transformasi gerakan sosial (perjuangan ekonomi dan sosial) menuju gerakan politik (perjuangan politik), sesungguhnya mulai dirintis

sejak delapan tahun sebelumnya (2002) dengan segala pasang surutnya.²¹ Jika jejak perjalanan transformasi gerakan melalui taktik front politik ini hendak ditengarai dari aspek posisi dan strategi kontestasi, maka secara umum, kecenderungannya dapat dibedakan dalam tiga fase perkembangan.²²

Pertama, “fase berlawan terhadap kekuasaan”. Dalam hal ini, front politik dibangun sebagai oposisi yang melakukan konfrontasi (berlawan) terhadap negara. Fase ini berlangsung sejak tahun 2002 hingga 2003 melalui Front Rakyat Miskin Sulteng (FRMST) yang kemudian dipermanenkan menjadi Persatuan Rakyat Miskin Sulawesi Tengah (PRMST). Gerakan ekstraparlementer mewarnai taktik perlawanan pada fase ini.

Kedua, “fase berlawan dan merebut kekuasaan” yang berlangsung sejak tahun 2004 hingga 2006. Dalam fase ini, selain tetap mempertahankan gerakan oposisi ekstraparlementer dengan strategi konfrontasi (berlawan), PRMST juga menetapkan strategi reklam (merebut) kekuasaan dengan taktik membangun Partai Persatuan Oposisi Rakyat (PPOR) untuk berkontestasi dalam Pemilu 2004.

Ketiga, “fase merebut kekuasaan” yang berlangsung sejak 2007 hingga pertengahan 2009. Dalam fase ini, strategi reklam kekuasaan, dalam artian merebut jabatan-jabatan publik (dewan dan kepala daerah) melalui prosedur formal demokrasi menjadi warna utama gerakan elemen prodemokrasi. Transformasi gerakan sosial menuju gerakan politik, boleh dibilang, menemukan bentuknya pada fase ini. Sejumlah langkah taktis diambil, di antaranya:

21 Lihat: Edmon Leonardo, *et al.*, *op cit*, bagian 2.

22 Untuk mengetahui dinamika transformasi gerakan ini, lihat: Edmon Leonardo, *et al.*, *ibid.*

Pembangunan Partai Perserikatan Rakyat (PPR) dan Partai Persatuan Pembebasan Nasional (Papernas) untuk menjadi peserta pemilu legislatif tahun 2009, yang dimotori FPRMST.

Merespons momentum Pemilihan Kepala Daerah Donggala tahun 2008 dengan mengajukan calon perseorangan dari kalangan prodemokrasi. Aristan dan Mutmainah (AMANAHA) menjadi kandidat yang diusung melalui mesin politik Front Perjuangan Rakyat Miskin Sulawesi Tengah (FPRMST).

Pembangunan blok politik untuk merespons aktivis-aktivis prodemokrasi yang direkrut menjadi calon legislatif oleh partai-partai yang lolos sebagai peserta Pemilu 2009, pasca gagalnya pembangunan partai sendiri (PPR dan Papernas). Tujuannya mendukung caleg-caleg aktivis prioritas yang ditetapkan berdasarkan tingkat elektabilitas.

Ketiga langkah taktis tersebut ternyata gagal memenuhi target. Terlepas dari faktor-faktor eksternal yang memang kompleks, keterbatasan sumber daya (manusia dan logistik) untuk mengelola dan memperluas basis menjadi faktor internal-objektif yang signifikan berkontribusi terhadap kegagalan tersebut. Selain itu “saling apriori antara aktivis caleg dan aktivis non-caleg” serta ”kontestasi antar-caleg aktivis“ menjadi faktor internal-subjektif yang berpengaruh terhadap tidak konsisten dan maksimalnya kerja-kerja blok politik melakukan intervensi ke bawah (basis) dalam memenangkan caleg-caleg prioritas. Kalaupun kemudian terdapat sedikit yang berhasil terpilih, itu lebih dikarenakan kerja-kerja caleg sendiri pada konstituen, bukan pada basis-basis pengorganisasian kelompok prodemokrasi.²³

23 Dari 29 orang yang didukung front politik berjuang pada Pileg 2009, hanya dua orang yang berhasil menjadi anggota DPRD Propinsi/Kabupaten. Dari dua wilayah andalan dari front politik (Kota Palu – Kabupaten Donggala) dalam memperjuangkan anggota front politik untuk menjadi anggota DPRD Kota/Kabupaten, ternyata hanya berhasil mendudukkan satu orang saja.

4. Rekonsolidasi Front Politik Pasca Pemilu 2009

Kegagalan perjuangan front politik dalam Pemilu Legislatif 2009 sempat membuat stagnan gerakan prodemokrasi. Keyakinan terhadap strategi perjuangan melalui taktik front sempat teragukan. Namun, melalui sejumlah diskusi reflektif, keyakinan ber-front politik sebagai kebutuhan kembali menguat. “Tak ada jalan lain bagi rakyat kecil selain berinisiatif membangun perjuangannya sendiri untuk mengembalikan hakikat demokratisasi dan desentralisasi menjadi lebih bermakna bagi rakyat.” Demikian paling tidak catatan kunci diskusi reflektif tersebut. Dengan keyakinan itu, langkah-langkah untuk merekonsolidasi perjuangan melalui front politik dilakukan.

a. Pembentukan Kompas Sulawesi Tengah

Pertemuan pada 10 September 2009, yang dihadiri sejumlah aktivis prodemokrasi, memutuskan untuk tetap konsisten melakukan kerja-kerja politik bersama rakyat dalam Koalisi Demokrasi untuk Pemerintahan yang Amanah dan Bersih (Kompas) Sulawesi Tengah.²⁴ Rumusan strateginya adalah:²⁵ (1) Menyatukan kekuatan prodemokrasi untuk merebut gerakan rakyat yang demokratik sebagai kekuatan politik baru di daerah, melalui penguatan organisasi, program, serta basis pengorganisasian dan pendidikan politik massa; (2) Menumbuhkembangkan alat perjuangan bersama untuk menjawab kebutuhan merebut ruang demokrasi yang tersedia (pilkada dan pemilu) untuk tujuan perjuangan yang lebih besar, yaitu merebut seluruh kekuasaan untuk kepentingan mewujudkan kesejahteraan rakyat, demi meraih cita-cita:

24 Untuk pertama kalinya KOMPAS beranggotakan 13 organisasi, yang terdiri atas 5 organisasi sektor rakyat (diantaranya; Serikat Nelayan Teluk Palu, Forum Songulara, Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia, Liga Mahasiswa Untuk Demokrasi, Serikat Buruh Sulteng), individu tokoh masyarakat dan dari kalangan pers.

25 Dokumen Manifesto Kompas Sulteng.

Terwujudnya pemerintahan yang bersih, demokratis, kerakyatan yang menjunjung tinggi penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan menghargai hak asasi manusia;

Terwujudnya pemerataan kesejahteraan umum, pendidikan, dan layananan kebutuhan dasar bagi masyarakat;

Terwujudnya pembangunan yang berkeadilan, mengedepankan kemandirian dan kekuatan lokal yang menjamin keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan hidup.

Untuk tahap awal, langkah taktis yang dilakukan terfokus pada dua hal. (1) Melakukan respons terhadap lima kota/kabupaten yang akan menyelenggarakan pemilihan kepada daerah langsung pada pertengahan tahun 2010.²⁶ (2) Melakukan advokasi masalah-masalah di tingkat masyarakat.

Khusus untuk langkah taktik pertama (intervensi pilkada), kendala yang dihadapi adalah belum meluasnya struktur Kompas Sulteng di daerah-daerah. Secara organisasional, Kompas Sulteng masih terkonsentrasi di Kota Palu dan Kabupaten Sigi. Oleh karena itu, dalam merespons pilkada di lima kota/kabupaten dibagi dalam dua kategori. Pertama, daerah dengan respons prioritas, yakni Kota Palu dan Kabupaten Donggala. Kedua, daerah dengan respons non-prioritas, yakni Kabupaten Poso, Toli-Toli dan Tojo Una-Una.

Untuk daerah dengan respons prioritas, Kompas Sulteng akan melakukan rangkaian kegiatan yang bertujuan mengusung pasangan kandidat wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati yang akan diperjuangkan dalam pilkada. Taktik yang dijalankan adalah mengusung kandidiat dengan menggunakan perahu partai yang mempunyai kursi atau tidak mempunyai

26 Pada tahun 2010, Kota/kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada, Yakni: Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten ToliToli.

kursi di DPRD kota/kabupaten dan alternatif taktiknya adalah mengusung kandidiat melalui jalur independen.²⁷

Rangkaian kerja yang dilaksanakan untuk mengusung kandidat adalah melakukan launching kandidat dengan pelibatan media massa lokal, melakukan lobi politik terhadap partai-partai yang memiliki kursi ataupun partai-partai yang tidak mempunyai kursi di DPRD. Memang, dalam perkembangan, kerja ini belum memperlihatkan hasil maksimal. Sampai tulisan ini dibuat, target untuk menjadikan kandidat sebagai peserta pilkada masih dalam pengerjaan. Juga belum ada keputusan untuk menggosung kandidat dengan menggunakan jalur perseorangan.

Sementara untuk daerah dengan intervensi non-prioritas, pengerjaan respons pilkada dilakukan dengan melakukan pemetaan politik sekaligus menentukan kandidat yang akan didukung. Kerja-kerja mendukung kandidat dilakukan dengan memaksimalkan organisasi-organisasi yang ada di daerah tersebut -- tanpa melakukan deployment (pengiriman) anggota -- serta membantu kandidat melakukan rangkaian lobi kepada partai-partai tingkat provinsi yang akan dijadikan perahu untuk bisa menjadi peserta pilkada.

b. Perluasan Pembangunan Organisasi Front Politik

Pada November 2009, melalui pertemuan konsolidasi gerakan prodemokrasi se-Sulawesi Tengah, lahir gagasan untuk

27 Kompas Sulteng, Mengusung Helmi Saenong untuk maju sebagai kandidat calon Bupati pada Pilkada Kabupaten Sigi dan Ridha Saleh untuk maju sebagai kandidat Calon Walikota pada Pilkada Kota Palu. Kedua calon tersebut, saat ini diperjuangkan untuk menjadi peserta pilkada melalui perahu partai yang memiliki kursi ataupun tidak memiliki kursi di DPRD.

membangun front politik bersama yang lebih besar lagi.²⁸ Secara organisatoris, front ini akan meng-gabungkan organisasi sipil kemasyarakatan, organisasi rakyat, serta tokoh-tokoh masyarakat di semua kota/kabupaten di Sulawesi Tengah. Secara geografis dan organisasional, front ini akan lebih besar dan luas daripada Kompas Sulteng yang telah dibangun. Pada pertemuan ini, Kompas Sulteng menawarkan pembangunan front secara bersama-sama. Front dimaksud merupakan leburan komposisi dari organisasi yang telah bergabung di dalam Kompas Sulteng dan organisasi yang terlibat dalam pertemuan konsolidasi gerakan prodemokrasi.

Tujuan gagasan front yang lebih luas ini adalah; (a) Menyatukan kekuatan prodemokrasi sebagai kekuatan rakyat; (b) Memajukan dan memperjuangkan agenda-agenda politik rakyat; (c) Merebut kekuasaan politik di semua tingkatan demi kesejahteraan rakyat. Sedangkan rumusan landasan pembangunannya, *Pertama*, faktor kondisi objektif, antara lain: (1) Rakyat dan gerakan demokrasi sekarang berhadapan dengan imperialisme dan feodalisme; (2) Menguatnya konsolidasi birokrasi kapitalis dan militerisme; (3) Konsolidasi gerakan fundamentalis dan sektarian. *Kedua*, kondisi subjektif, antara lain: (1) Ada fragmentasi gerakan yang luas yang disebabkan oleh perbedaan isu, wilayah geografis; (2) Lahir dan tumbuhnya gerakan di semua sektor seolah menjadi kekuatan; (3) Perlawanan-perlawanan rakyat tumbuh dengan berbagai metode dan tidak terorganisasi dalam satu wadah perjuangan.

28 Pertemuan tersebut dilaksanakan pada tanggal 20-21 November 2009. Atas inisiasi Organisasi Demos Jakarta. Demos Jakarta sedang mengagagas terbentuknya blok politik gerakan pro-demokrasi di daerah-daerah. Pertemuan ini dihadiri organisasi sipil kemasyarakatan dan organisasi sektor rakyat dari 6 Kota/Kabupaten di Sulteng serta aktivis prodemokrasi yang menjadi anggota DPRD Kota/Kabupaten periode 2009-2014. Beberapa organisasi sipil kemasyarakatan dan organisasi sektor rakyat dari Kabupaten yang tidak sempat hadir (ToliToli, Buol, Parimo, Luwuk) menyatakan siap bergabung setelah dikonfirmasi menyangkut hasil dari pertemuan ini.

Untuk mewujudkan pembangunan front ini, maka diputuskan melakukan kongres bersama pada pertengahan tahun 2010. Tahapan pelaksanaan kongres adalah dengan membentuk tim kerja kepanitiaan. Kepanitiaan kongres dibagi dalam dua tim kerja. Tim pertama bertugas mempersiapkan kebutuhan materi, administrasi, penggalangan dukungan politik, dan logistik untuk kongres. Tim kedua (berisikan organisasi sipil kemasyarakatan dan organisasi sektor rakyat di kota/kabupaten), bertugas melakukan sosialisasi keputusan pertemuan konsolidasi prodemokrasi seluruh Sulteng, melakukan konsolidasi di daerah masing-masing dengan melibatkan lebih banyak lagi organisasi sipil kemasyarakatan dan organisasi sektor rakyat untuk terlibat dalam front, mempersiapkan materi-materi usulan yang akan dibahas dalam kongres dan mempersiapkan diri untuk mengikuti kongres pembentukan front.

Dari rumusan manifesto atau dokumen yang tersedia, secara pintas diketahui posisi dan strategi front politik yang tengah direkonsolidasi, kembali hendak menggabungkan strategi konfrontasi dengan strategi reklamasi kekuasaan, sebagaimana strategi front politik tahun 2004 - 2006. Pilihan ini mengundang beragam respons dari kalangan prodemokrasi. Terdapat kelompok yang bersikukuh dengan strategi konfrontasi (berlawan), sehingga sejak awal enggan terlibat dalam proses rekonsolidasi. Kelompok ini kemudian melakukan rekonsolidasi sendiri dan akhirnya mendeklarasikan Front Oposisi Rakyat Indonesia (FOR Indonesia), sebagian lagi tengah berkonsolidasi untuk membangun Front Perjuangan Rakyat (FPR). FOR Indonesia dikonsolidasi oleh gerbong Persatuan Rakyat Pekerja (PRP), sedangkan FPR dikonsolidasi oleh gerbong Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA).

Kelompok ini cenderung berpandangan strategi reklamasi kekuasaan melalui taktik intervensi pilkada belum waktunya,

mengingat basis-basis massa rakyat yang diorganisasi belum meluas dan belum cukup kuat untuk menghadapi kekuatan-kekuatan politik lama di tengah situasi politik liberal saat ini. Yang mendesak perlu dilakukan adalah pengorganisasian, pendidikan-pendidikan politik rakyat, aksi-aksi di tingkat sektoral yang kontinyu, dan perluasan pembangunan organisasi rakyat yang kuat.

Selain kelompok tersebut, terdapat juga sejumlah aktivis prodemokrasi yang sejak awal terlibat dan tergabung dalam rekonsolidasi front politik Kompas Sulteng, tetapi masuk menjadi anggota Partai Golkar sebagai taktik untuk membangun strategi reklamasi kekuasaan. Perdebatan alot dalam menyikapi pilihan taktik tersebut menandai rapat internal Kompas Sulteng pada 29 Desember 2009.

Setidaknya tiga pandangan utama yang mengemuka dalam rapat tersebut.

Pertama, tawaran kepada sejumlah aktivis anggota Kompas Sulteng untuk menjadi pengurus Partai Golkar hanya akan menguntungkan Partai Golkar serta merugikan dan melemahkan citra Kompas Sulteng. Kedua, aktivis anggota Kompas Sulteng yang ditawarkan menjadi pengurus Golkar adalah mereka yang dipersiapkan untuk bertarung dalam perebutan ruang-ruang politik lokal atau jabatan-jabatan politik lokal. Ketiga, Partai Golkar dalam sejarahnya adalah partai yang melanggengkan penindasan, gurita korupsi, dan pengobral sumber daya alam, sehingga secara etik dan ideologis tak layak menjadi pengurus partai ini. Karena itu, Kompas Sulteng menyarankan anggota yang ditawarkan untuk menjadi pengurus Partai Golkar Kota Palu periode 2009-2014 memikirkan kembali tawaran tersebut. Jika tetap bersikukuh, dianggap sebagai pilihan individual.²⁹

29 Notulensi Pertemuan Kompas Sulteng, 29 Desember 2009 .

Pertanyaannya, mengapa sejumlah aktivis itu mengambil pilihan demikian? tampaknya keraguan terhadap penyakit inkonsistensi kerja front politik masa-masa sebelumnya masih menghantui mereka. Keraguan juga datang dari pihak eksternal, walau berangkat dari argumentasi berbeda. Keraguan ini terutama terkait dengan taktik intervensi pilkada yang dilakukan Kompas Sulteng. Keterbatasan logistik menjadi alasan utama keraguan itu, sehingga mereka menilai taktik intervensi pilkada sebagai ambisius dan genit. Bahkan terdapat sejumlah pandangan yang menilai launching kandidat yang dilakukan Kompas Sulteng hanyalah guyonan untuk meramaikan atmosfer politik pilkada. Kalaupun ada pandangan positif, datang dari masyarakat atau komunitas yang menjadi basis pengorganisasian tradisional kelompok prodemokrasi. Dan dukungan itu bukan pada pilihan taktik intervensi pilkada, tetapi lebih pada figur kandidat yang di-launching Kompas Sulteng.³⁰

Melihat kecenderungan respons tersebut, maka tantangan awal yang dihadapi dalam proses rekonsolidasi front politik adalah bagaimana membangkitkan kembali keyakinan bersama yang mulai menyusut. Tantangan itu tentu saja cukup berat, menuntut keseriusan dan komitmen kuat secara bersama-sama.

Penutup

Menengarai dinamika perjalanan gerakan prodemokrasi di Sulteng pra dan pasca Pemilu 2009, dapat ditarik sejumlah kesimpulan. Pertama, bentuk dan pola gerakan perlawanan lokal yang tumbuh, secara umum tampak masih merupakan pengulangan

30 Moh. Ridha Shaleh sebagai calon kandidat yang di launching oleh KOMPAS Sulteng ditanggapi positif oleh nelayan Teluk Palu (Harian Media Alkhairaat, Kamis 29 Oktober 2009). Komunitas Nelayan Teluk Palu adalah komunitas yang pernah diorganisir oleh Moh Ridha Saleh semasa aktif di Yayasan Pendidikan Rakyat (YPR) Sulteng.

bentuk dan pola-pola gerakan sebelumnya, untuk tidak menyebut mengalami kemunduran. Disebut kemunduran, karena capaian perkembangan gerakan yang sudah menuju pada pembangunan front politik -- dengan platform perjuangan ekonomi, sosial, dan politik – pada tahun 2002 hingga 2006, pada akhirnya mengalami antiklimaks. Bentuk gerakan kembali ke aksi sporadis dan front advokasi sektoral, berbarengan dengan stagnannya penguatan front politik.

Kedua, kondisi stagnasi dan antiklimaks ini, diakui atau tidak, disebabkan kegagalan kelompok prodemokrasi melakukan transformasi kesadaran rakyat dari kesadaran kasus (pragmatis) ke kesadaran kritis yang lebih ideologis (perjuangan politik). Berbarengan dengan itu, perkembangan situasi politik yang sangat liberal telah berjaya memfragmentasikan kelompok prodemokrasi ke dalam pilihan posisi dan strategi kontestasi, yakni konfrontasi (berlawanan kekuasaan); reklamasi (merebut kekuasaan); dan kooperatif (berkawan dengan kekuasaan). Akibatnya, sekat-sekat organisasi, kepentingan, dan program-program perjuangan di antara kelompok prodemokrasi kian terbangun kukuh. Celaknya, sekat-sekat itu diperparah oleh kecenderungan subjektif kelompok prodemokrasi untuk mempertajam perbedaan-perbedaan, ketimbang mencari dan memperkuat persamaan.

Ketiga, disadari atau tidak, kondisi tersebut menjadi faktor yang sedikit banyak cukup berkontribusi dalam memproduksi fakta-fakta: (1) melambannya proses kaderisasi (level aktivis maupun rakyat) jika naif disebut “mandek”; (2) cenderung tidak berkembangnya basis-basis pengorganisasian secara teritorial; (3) semakin sulitnya mengintegrasikan organisasi-organisasi rakyat pada tingkat organisasi gerakan yang lebih besar dan luas.

Terlepas dari berbagai kekurangan dan permasalahannya, fakta masih eksisnya gerakan prodemokrasi dalam merespons

dinamika politik elektoral dan kepegangan investasi, tetap menjadi kebanggaan yang patut disyukuri. Sebab, sekecil apa pun dinamikanya, kehadiran gerakan prodemokrasi tetap dibutuhkan untuk menstimulasi, menjaga, dan mengawal berlangsungnya "demokrasi politik" dan "demokrasi ekonomi". Juga keyakinan bahwa gerakan prodemokrasi akan berkembang sebagaimana yang diharapkan, manakala aktor-aktor prodemokrasi bersepakat bergerak dalam keragaman ideologi, kepentingan, strategi, taktik, dan program yang dibingkai "kesadaran kolektif untuk bersinergi" dan dirajut dengan "komunikasi tanpa prasangka" demi terwujudnya cita-cita yang lebih besar. Semoga.

Gerakan Tani Bengkulu, Sepeninggal Wan¹ Amri

Simpul Bengkulu – FBB Prakarsa Rakyat²

Pengantar

Pada 2 November 2006 pukul 03.45 Amri Jausa yang akrab disapa Wan Amri berpulang. Dia pergi meninggalkan banyak kenangan manis dan pahit. Dia pergi mewariskan semangat juang yang tidak dimiliki banyak orang. Pada hari itu hampir semua orang Serikat Tani Bengkulu (STAB) dan jaringan yang pernah mengenalnya dan merasa menjadi bagian dari gerakan tani merasa kehilangan seorang kawan, bapak, kakak, paman, atau kakek dalam berjuang.

1 Wan dalam bahasa suku Serawai Bengkulu berarti Paman

2 Tulisan dipersiapkan oleh Agustam Rachman, Sekretaris Jenderal STAB Periode 2003-2006 dan saat ini berdomisili di Palembang mendirikan Pusat Studi Kebijakan Sumatera Selatan (PASKASS).

Tulisan ini tidak untuk membangkitkan romantisme di tengah lesunya gerakan tani saat ini (baca: di Bengkulu). Namun lebih dari itu, diharapkan berguna bagi STAB yang ditinggalkan dan menjadikan kepergian Wan Amri sebagai awal mengembalikan semangat perjuangan.

Nama Serikat Tani Bengkulu, biasa disingkat STAB, memang sulit dipisahkan dari Wan Amri, karena dia salah seorang yang membidani kelahiran STAB. Bahkan para penentu kebijakan di Bengkulu sering menghubungkan namanya dengan aktivitas organisasi tani tertentu (misalnya *reclaiming* di lahan yang dikuasai PT Agromuko oleh Komite Perjuangan Petani (KPP) pada 27 Januari 2003, walaupun sebenarnya KPP secara struktural organisasi tidak ada hubungan dengan STAB yang dipimpin Wan Amri.

Wan Amri adalah figur yang cukup komplet dalam kapasitasnya sebagai pemimpin kaum tani di Bengkulu. Bagaimana tidak? Dari sekian banyak pemimpin petani seangkatannya, dialah yang bertahan dan konsisten dengan tuntutan: kembalikan tanah rakyat! STAB tahu sebagian besar teman Wan Amri terpaksa memilih untuk berkompromi dengan PTPN VII dengan setuju menjalin pola kemitraan. Beliauah yang pertama kali menggagas ide solidaritas petani korban perkebunan besar, dengan mengerahkan massa petani untuk mendukung *reclaiming* (pengambilalihan kembali hak atas tanah) yang dilakukan petani di tempat lain di Bengkulu. Dialah orator ulung, yang pidatonya dapat membakar semangat hingga kaum tani tak sabar menunggu esok untuk melakukan perlawanan.

Saat pemerintah melakukan upaya paksa dalam hal penguasaan sumber daya ekonomi, misalnya merampas tanah milik rakyat dengan mengambil bentuk aksi-aksi kekerasan oleh aparat pemerintah (*state apparatus*), bahkan pada beberapa kasus pemerintah membiarkan pihak perkebunan membentuk milisi,

mencermati gejala itu Wan Amri memadukan taktik antara negosiasi dan konfrontasi dengan PTPN VII, yang menghasilkan *reclaiming* tiga bulan lamanya pada tahun 2001. Dia sosok yang berfungsi ganda, sebagai “rem” sekaligus “gas” di organisasi STAB.

Dia juga yang sering menjadi tempat bagi para pemimpin petani atau aktivis lainnya untuk dimintai pendapat. Dialah pemimpin yang dalam pepatah Minang “seperti pohon besar, daunnya tempat berteduh, dahannya tempat bergantung, batangnya tempat bersandar”. Dia telah mendedikasikan sebagian dari hidupnya untuk berjuang agar negara membuka mata dan insyaf bahwa kepentingan rakyat tani harus diutamakan.

Wan Amri berjuang menuntut dikembalikannya hak atas tanah baik tanah ulayat, adat, marga, maupun tanah hak milik rakyat yang dirampas oleh perkebunan besar pada awal tahun 1980-an. Walaupun hanya tamatan Sekolah Rakyat (SR), dia fasih mengutip konsiderans UUPA Nomor 5 Tahun 1960: “*Bahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan di atas perlu adanya hukum agraria nasional, yang berdasar atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama*”.

Pantas jika STAB beberapa waktu setelah kematiannya merencanakan membuat acara tahunan dalam bentuk “Haul Wan Amri”.³ Hal itu bukan dimaksudkan untuk mengkultuskan sosoknya, melainkan sebagai bentuk penghargaan atas apa yang pernah diperbuatnya. Sekaligus mengingatkan kepada generasi baru STAB bahwa masih banyak agenda yang harus diperjuangkan sepeninggal Wan Amri.

3 Walaupun sampai disampaikan saat ini Haul itu belum dilaksanakan.

STAB dan Tanggung Jawab Gerakan Tani

Serikat Tani Bengkulu (STAB) lahir dan besar dalam alam euforia demokrasi setelah kejatuhan rezim diktator Soeharto. Sebagai organisasi, STAB difasilitasi dan terbentuk atas dukungan Kantor Bantuan Hukum Bengkulu yang kemudian menjadi Perkumpulan Kantor Bantuan Hukum Bengkulu (PKBHB).

Penulis mengistilahkan saat itu terjadi "pertemuan" dua kepentingan yang sama antara kaum tani dan aktivis PKBHB. Dari sisi aktivis PKBHB kepentingannya dalam konteks mewujudkan idealisme dan dari sisi kaum tani adalah untuk merebut sumber daya ekonomi yang dirampas negara pada masa rezim diktator Soeharto. Kesadaran aktivis PKBHB dalam pembangunan basis rakyat diawali dengan memposisikan dalam kasus-kasus struktural, terutama konflik pertanahan.

Dapat dikatakan dalam kurun waktu sejak didirikan pada tahun 1998 sampai tahun 2006, Secara objektif memang gerakan tani atau gerakan rakyat lainnya di Provinsi Bengkulu pernah maju. Hal ini ditandai dengan indikator-indikator sebagai berikut:

Penguasaan Teritorial

Dari segi penguasaan wilayah sudah cukup baik, pemekaran wilayah Provinsi Bengkulu yang semula hanya 3 kabupaten dan 1 kota menjadi 8 kabupaten dan 1 kota⁴, diikuti pula oleh organisasi tani dengan melakukan penugasan-penugasan (deploy) ke wilayah yang baru dimekarkan itu. Yang menggembirakan adalah perluasan infrastruktur organisasi itu atas kehendak mayoritas petani di daerah tersebut. Karena selain didasari akan kebutuhan

4 Kabupaten Kaur, Bengkulu Selatan, Seluma, Kota Bengkulu, Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang dan sekarang bertambah lagi dengan Kabupaten Bengkulu Tengah.

untuk memiliki organisasi yang setiap saat dapat dipakai sebagai alat perjuangan, juga memperpendek rentang pelayanan organisasi terhadap anggotanya.

Walaupun di beberapa tempat terdapat wilayah-wilayah yang masih “kosong” (belum diorganisasi/belum terpimpin), kondisi itu harus diambil tindakan cepat misalnya dengan menyiapkan “kader/tokoh organik” yang berasal dari daerah setempat. Hubungan yang “harmonis” dengan kepala daerah di beberapa kabupaten cukup mendukung upaya perluasan wilayah ini. Walaupun memang masih ada kepala daerah yang “keras kepala” dan sulit menerima keberadaan organisasi tani, selain HKTI ataupun KTNA. Percepatan penguasaan teritori ini tidak lepas juga dari dukungan banyak pihak, misalnya beberapa relawan pemantau pemilu dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Tim Pemenangan Muspani (DPD), dan basis masyarakat adat Warsi, atas dasar kesamaan visi dan kesadaran banyak yang akhirnya menjadi pengurus STAB di wilayahnya.

Perluasan Isu

Dari segi isu dan tuntutan, kaum tani sudah cukup maju. Ambil contoh, sebelumnya anggota STAB atau organisasi rakyat lainnya lebih banyak didominasi oleh “masyarakat korban” yang langsung merasakan represi negara (misalnya korban perampasan paksa tanahnya oleh negara). Keanggotaan pun saat ini lebih luas dengan mengakomodasi aspirasi petani “bertanah”. Semula tuntutannya pun hanya terbatas pada isu pokok “kembalikan tanah kami” atau “tanah untuk rakyat!”, kemudian meluas dengan memasukkan tuntutan-tuntutan ekonomi-politik. Misalnya, “berikan fasilitas kesehatan untuk petani”, “berikan pendidikan murah kepada anak petani”, “berikan pupuk-bibit murah dan modal usaha kepada petani”.

Yang juga cukup penting adalah upaya yang pernah dirintis Badan Produksi dan Pengembangan Teknologi Organik (BPPTO) yang dibentuk tahun 2002, walaupun sebagian kalangan gerakan tani melihat STAB kurang konsisten dengan analisis strukturalnya, karena dianggap terlalu jauh mengambil peran negara yang seharusnya urusan pupuk adalah tanggung jawab negara untuk menyediakannya. Tapi itulah dinamika yang terjadi saat itu ketika STAB ingin memimpin, baik dari segi isu tuntutan maupun praktik perjuangan di lapangan. Hal itu penting sebagai bagian dari upaya STAB menjawab kebutuhan-kebutuhan jangka pendek anggotanya. Selain itu, STAB juga dapat memberikan contoh konkret upaya melawan kekuatan kapitalisme global. Dewan Pakar STAB⁵ merintis untuk mengupayakan bibit unggul murah dan riset hama. Tradisi STAB, misalnya memberikan penghargaan berupa “Pejuang Petani Award” kepada mereka yang berjasa pada gerakan tani, harus dilanjutkan. Karena waktu itu baru sebatas award yang dapat STAB berikan.

Memang STAB bukan petugas “cuci kakus” pembangunan, yang mengambil alih tanggung jawab negara untuk mengurus rakyatnya. Tetapi hanya menunjukkan bahwa organisasi rakyat dapat lebih mampu mengurus rakyat (dalam hal ini anggotanya) ketimbang negara.⁶

Kepemimpinan Kaum Tani

Setelah Kongres STAB III pada tahun 2005, dapat dikatakan STAB dipimpin kelas petani, setelah selama dua periode kepengurusan (1998-2001, 2001-2005) posisi orang kedua (sekretaris) masih didominasi aktivis gerakan tani yang berasal

5 Dimotori oleh Akademisi dari Universitas Bengkulu yaitu Priyono Prawito, Ph.D dkk.

6 Negara adalah Kita: 151, 2006

dari kelas menengah. Walaupun memang sejak Kongres II sudah ada keinginan untuk mendorong kemandirian kelas petani, di mana saat itu kesediaan penulis untuk menjadi Sekretaris Jenderal STAB karena ada komitmen dengan pengurus STAB lainnya bahwa ke depan posisi sekretaris jenderal harus dipegang kader tani langsung.

Ada juga sebagian kawan STAB yang mempertanyakan konsep kepemimpinan di STAB yang mengharuskan kepemimpinan dari kelas tani, karena beranggapan seseorang yang berasal dari kelas menengah terpelajar pada saat melakukan “bunuh diri kelas” dengan masuk ke dalam komunitas marjinal itu sudah cukup dianggap sama. Padahal secara watak dan karakter kelas keduanya berbeda. Bagaimana watak seorang yang berasal dari kelas menengah priyayi dapat dipersamakan dengan kader tani yang secara material mengalami langsung ketertindasan sejak lama?

Kalaupun muncul kemandirian, yang salah satu wujudnya terpilih para pemimpin yang berasal dari petani, juga sebagai buah kaderisasi organisasi. Ambil contoh, Marhaendi, Sekretaris Jenderal STAB Provinsi Bengkulu saat ini, adalah anak tokoh petani yang berasal dari Kerkep, Bengkulu Utara. Juga kemudian Rumsi, Sekretaris STAB Kabupaten Rejang Lebong, adalah anak petani palawija dari Desa Baru Manis, Kecamatan Bermani Ulu. Secara moral gerakan, situasi ini cukup mendukung upaya ideologisasi dan militansi kader dan anggota. Semoga kesederhanaan hidup (kesahajaan) Wan Amri, khususnya dalam hal kepemimpinan, dapat diteladani kader STAB.

Jaringan Organisasi

Perkembangan jaringan STAB semakin luas dan cukup kuat dari tingkat lokal, nasional, dan internasional. Sinergi ketiganya

cukup efektif dapat melakukan kampanye dan membangun aksi solidaritas dalam upaya mendukung tujuan perjuangan. Apalagi di tingkat lokal dibangun koordinasi dengan beberapa forum pemerintah desa. Misalnya forum kepala desa atau forum badan permusyawaratan desa. Beberapa *reclaiming* tanah eks perkebunan besar kemudian dilegalisasi pemerintah desa setempat. Bahkan tak sedikit perangkat desa terlibat langsung dalam gerakan menuntut hak atas tanah. Misalnya di Desa Rena Jaya dan Desa Alas Bangun, Kabupaten Bengkulu Utara, atau di Desa Tanah Abang, Kabupaten Seluma.

Di tingkat Nasional, STAB bersama Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mendorong *land reform* dilaksanakan. Kedatangan Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto di Bengkulu pada 6 - 7 Desember 2006 dan bertemu petani anggota STAB berdampak positif terhadap sikap pemerintah daerah terhadap kampanye reforma agraria di Provinsi Bengkulu.

Di tingkat internasional, pengurus STAB harus lebih aktif. Saat ini teknologi komunikasi sudah modern, namun tidak banyak aktivis STAB yang secara aktif memanfaatkan teknologi itu. Sebagai contoh, dapat dihitung dengan jari pengurus STAB yang mampu dan mau mempergunakan sarana pendukung seperti teknologi *e-mail* (surat elektronik). Bandingkan dengan aktivis di negara maju misalnya Eropa, walaupun sudah kakek - nenek aktif dan merasa penting menggunakan teknologi itu. Sedikit sekali pengurus STAB yang merasa perlu menambah kapasitas diri. Sejak dulu STAB terlihat pasif dalam hal komunikasi dengan dunia internasional. Jika STAB tidak memperbaiki diri, situasi ini akan merugikan, apalagi sejak 1998 STAB memutuskan keluar dari keanggotaan Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI)⁷

7 Dalam hal ini STAB tetap mengakui FSPI sebagai representasi petani Indonesia dalam konteks tuntutan yang diperjuangkannya, akan tetapi bukan berarti secara struktur STAB bagian dari FSPI.

yang notabene anggota La Via Campesina (Organisasi Tani Internasional).

Selama ini hubungan internasional sudah mulai dibangun walaupun tanpa STAB harus terikat dengan FSPI. Itu yang harus dilanjutkan bahkan perlu diperluas oleh pengurus STAB sekarang . Slogan “jangan puas diri” yang dipakai organisasi-organisasi pada saat Orde Lama memang benar. Karena jika STAB puas diri, sama saja membutakan mata dan menulikan telinga pada fakta-fakta perubahan yang terus terjadi.

Gerakan Tani di Bengkulu Saat Ini

Telah penulis sampaikan, tulisan ini sebagai refleksi di tengah lesunya gerakan tani saat ini, bukan bermaksud membuka aib atas apa yang telah terjadi, bukan pula bermaksud menghakimi siapa yang harus disalahkan atas kondisi saat ini.

Tulisan ini dimaksudkan untuk dua hal:

1. Bagi aktivis gerakan rakyat di Bengkulu agar terketuk hatinya untuk kembali pada tanggung jawab sejarah. Bahwa perubahan harus diperjuangkan, bukan dengan cara mengemis dan minta dikasihani mereka yang selama ini menjadi penindas rakyat.
2. Bagi aktivis gerakan rakyat di luar Bengkulu agar dapat mengambil hikmah atas apa yang terjadi. Dan selanjutnya menjadikannya bahan pelajaran penting guna menjauh dari terulangnya sejarah yang sama seperti sejarah “kalah” yang menimpa STAB.

Setelah mengurai sejarah panjang tentang Gerakan Tani Bengkulu, selanjutnya STAB masuk pada bagian refleksi atas

konteks saat ini. Ada banyak hal yang cukup penting untuk direfleksikan.

Secara khusus gambaran tentang Gerakan Tani Bengkulu dapat dikatakan mengalami kemunduran, bahkan tidak menutup kemungkinan gerakan ini akan mengalami kehancuran. Gambaran atas pernyataan di atas dapat dilihat dari fakta-fakta sebagai berikut:

Kemenangan Semu Pemilu 2004

Tidak dapat dihindari, sejak Pemilu 2004 yang berhasil memenangkan Muspani sebagai senator/anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sejak itu pula mulai terjadi pergeseran orientasi gerakan. Konsolidasi gerakan yang dibangun sejak awal 1998 menjadi terganggu karena banyak faktor.

Pertama, di satu sisi terpilihnya kandidat senator/anggota DPD itu adalah keberhasilan yang patut dibanggakan, tetapi pada basis-basis petani anggota STAB yang sebagian besar masih “mentah”⁸ yang terjadi adalah terlalu besar harapan terhadap senator Muspani. Seakan-akan semua persoalan dapat diselesaikan oleh senator Muspani. Padahal, dari segi kewenangan anggota DPD, UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 48 menjelaskan bahwa DPD hanya mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) kepada DPR;

8 Istilah “mentah” ini untuk menggambarkan basis yang masih lemah dari segi doktrin dan orientasi perjuangan organisasi

- b. ikut membahas rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1).

Dengan demikian DPD hanya berhak mengajukan rancangan undang-undang dan dapat ikut membahasnya, tetapi tidak berhak mengesahkan regulasi seperti undang-undang. Lantas apa yang bisa dilakukan oleh senator Muspani untuk menyelesaikan kasus penyerobotan lahan yang dilakukan PTPN VII dan penyerobotan lahan rakyat oleh PT Agri Andalas di Kabupaten Seluma? Perampasan tanah rakyat oleh PT Agromuko di Kabupaten Mukomuko, penipuan terhadap petani peserta proyek TCSSP-Disbun⁹ di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Seluma, dan Bengkulu Selatan? Kalaupun Muspani selaku senator/DPD melakukan upaya melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk kasus sengketa tanah atau berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk kasus TCSSP atau bertemu dengan kepala daerah dalam rangka reses, hal itu tidak menghasilkan sesuatu yang diharapkan petani. Paling tinggi hanya menjadi berita koran lokal, itu pun terkadang beritanya dalam bentuk advertorial. Kekeliruan yang lain adalah keberhasilan memenangkan Muspani sebagai anggota DPD dianggap akhir dari perjuangan. Tidak perlu lagi ada reclaiming lahan, tidak perlu lagi ada demonstrasi menuntut hak atas tanah, dan sebagainya. Bahkan dalam beberapa kesempatan aksi petani, Muspani dianggap tidak memberikan dukungan.¹⁰

Kedua, praktis sejak terpilih sebagai anggota DPD, komunikasi Muspani dengan konstituen pemilihnya yang

9 Proyek Pengembangan Budidaya Perkebunan (Tree Corps Smallholders Sector Project) yang dibiayai Asian Development Bank tahun 1992. Ternyata bibit karet yang diberikan pada petani peserta TCSSP adalah bibit palsu yang ketika dipanen tidak bergetah.

10 Kesan itu muncul karena dalam pemahaman awam yang dimiliki petani, terlepas masalah kasus yang sedang diperjuangkan, petani masih mengharapkan Muspani selalu hadir dalam aksi-aksi protes seperti yang terjadi sebelumnya.

mayoritas anggota dan simpatisan STAB tidak seintensif sebelum menjadi anggota DPD. Hal ini dengan mudah “dipolitisasi” oleh lawan-lawannya dengan melakukan kampanye hitam bahwa Muspani tidak peduli lagi terhadap nasib kaum tani, bahwa Muspani berbohong dan mengingkari slogannya “tanah untuk rakyat” pada kampanye Pemilu 2004. Kalaupun Muspani berkunjung ke daerah, biasanya lebih banyak menumpang pada agenda dinas semacam reses. Tentu saja karena sifatnya acara dinas, maka suasananya menjadi terlihat formal dan penuh basa-basi. Berbeda dari pertemuan-pertemuan sebelum menjadi anggota DPD yang tercipta suasana dari hati ke hati antara Muspani dan para petani. Untuk mengatasi masalah itu, pernah ada rencana dari pengurus BPP¹¹ STAB di Bengkulu untuk menjadwalkan kunjungan bulanan senator Muspani ke basis-basis STAB, tapi hal itu belum terlaksana sampai Muspani habis masa jabatannya. Situasi ini menciptakan prasangka dari kedua belah pihak. Di satu sisi Muspani mengatakan konstituennya di Bengkulu terlalu memaksakan beban dan tanggung jawab yang terlalu besar di luar kewenangannya sebagai anggota DPD, di pihak petani sebagai konstituen juga merasa agenda-agenda kerakyatan, khususnya kasus-kasus rakyat, tidak serius ditangani oleh Muspani.¹²

Kekalahan pada Pemilu 2009

Sejarah diseret-seretnya STAB dalam konteks pertarungan politik lokal dimulai sejak tahun 2005. Walaupun secara organisasi STAB tidak pernah mengeluarkan keputusan resmi untuk mendukung salah satu kandidat kepala daerah, masuknya beberapa pengurus STAB dalam tim kampanye calon kepala

11 Badan Pengurus Pusat

12 Pada Pemilu 2009 Muspani mengusung tema kampanye Pemberantasan Korupsi tidak lagi mengusung tema Tanah Untuk Rakyat seperti pada Pemilu 2004.

daerah membawa pengaruh besar sampai di tingkat akar rumput. Di beberapa tempat bahkan menimbulkan konflik internal.

Seiring dengan itu dimulai pula konsolidasi gerakan organisasi rakyat di Indonesia dan menghasilkan kesepakatan untuk membentuk partai politik alternatif Partai Perserikatan Rakyat (PPR), yang mewadahi organisasi rakyat, perempuan, dan masyarakat adat. STAB termasuk penggagas kelahiran partai ini. Sebelumnya organisasi itu di bawah organisasi massa Perserikatan Rakyat.

Meskipun seluruh potensi sudah dikerahkan, partai ini tidak berhasil lolos sebagai peserta Pemilu 2009. Kegagalan ini memaksa aktivis partai mencari solusi alternatif menghadapi Pemilu 2009. Namun, karena alasan waktu yang sangat singkat, solusi alternatif itu tidak dapat diterjemahkan dengan sempurna di lapangan, termasuk di Bengkulu.

Khusus di Bengkulu terkesan tanpa konsolidasi. Hal ini dapat dilihat dengan “berpencarnya” aktivis dan masuk ke banyak partai politik. Sebut saja Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Patriot, dan Partai Pemuda Indonesia (PPI). Pilihan itu diambil dengan satu keyakinan bahwa para aktivis rakyat sudah cukup mengakar di basis-basis STAB, apalagi didukung dengan perubahan sistem Pemilu 2009 yang semi-distrik, sehingga basis diasumsikan akan memilih orang, terlepas orang itu dicalonkan dari partai mana pun.

Tesis itu terbukti keliru. Terbukti tidak satu pun aktivis STAB yang berhasil memperoleh kursi pada Pemilu 2009, termasuk Muspani¹³ yang pada Pemilu 2004 perolehan suaranya

13 Walaupun banyak temuan dilapangan salah satu penyebab kekalahan aktivis STAB karena permainan curang berupa money politic dan black campaign.

urutan 4, namun pada Pemilu 2009 terlempar ke urutan 7. Padahal, seharusnya sudah dapat dikalkulasi kekuatan rakyat yang selama ini dibangun dalam situasi politik liberal saat ini belum cukup kuat untuk dipaksa mengerti tentang keputusan masuk ke banyak partai politik itu. Bagaimana tidak? Misalnya, doktrin antimiliterisme yang dijadikan kurikulum pendidikan STAB kemudian dihadapkan pada pilihan untuk mendukung partai Hanura yang dipimpin Wiranto, doktrin anti-Orde Baru versus pilihan untuk mendukung PKPB yang identik dengan diktator Soeharto.

Setelah gagal pada Pemilu 9 April 2009, para aktivis terkesan frustrasi dan menyalahkan organisasi dan menyatakan kekalahan tersebut adalah kekalahan organisasi, sehingga para aktivis yang gagal mengalami “penurunan gairah” untuk mengurus organisasi karena menganggap organisasi tidak serius dalam berjuang. Jika dikaji lebih dalam, ikut serta kader dalam politik praktis belum tentu membawa agenda-agenda kerakyatan. Sebab, jika membawa agenda kerakyatan, pastilah diawali dengan melakukan rapat organisasi untuk melakukan identifikasi agenda apa yang akan diusung menghadapi Pemilu 2009. Artinya, dapat dikatakan bahwa pilihan untuk ikut menjadi calon anggota legislatif lebih didasari inisiatif pribadi.¹⁴

Menurunnya kekuatan STAB dan kegagalan beberapa aktivis STAB pada Pemilu 2009 itu setidaknya disebabkan beberapa hal:

14 Wawancara tertulis dengan Ahkmad Rozikin Ketua PPR Kabupaten Rejang Lebong tanggal 7 Januari 2010. Pada Pemilu 2009 ia dicalonkan dari PPI untuk DPRD Kabupaten Rejang Lebong dan memperoleh 978 suara sedangkan untuk mendapat kursi terakhir minimal harus memperoleh 1600 suara untuk daerah pemilihan I.

1. Sistem Organisasi

Sistem yang tidak terbangun dengan baik dan masih dipengaruhi feodalisme. Misalnya tidak jelas pemisahan antara organisasi dan orang. Sangat sulit membedakan antara perintah organisasi dan perintah pribadi pengurus organisasi. Padahal, untuk membedakan apakah itu perintah orang atau perintah organisasi, dapat dilihat apakah perintah itu hasil dari satu kesepakatan para pemimpin dengan meminta pendapat dari *stakeholders* organisasi lainnya.¹⁵ Jika tidak, maka perintah itu adalah perintah individu saja yang tidak wajib dijalankan.

2. Inkonsistensi Aktivistis

Faktanya memang demikian, dibuktikan dengan kepentingan setiap aktivis yang berbeda-beda tetapi ditarik dalam ruang organisasi. Padahal, kepentingan setiap aktivis belum tentu sama dengan kepentingan dan agenda organisasi. Benar bahwa kekuasaan dalam konteks praktis adalah masuk dalam ruang kekuasaan negara. Padahal, kekuasaan haruslah didukung proses dialektik bagaimana kekuasaan itu dapat direbut.

3. Lemahnya Kaderisasi

Tugas pokok organisasi untuk beregenerasi adalah sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, setiap organisasi akan melakukan proses kaderisasi. Proses inilah yang telah hilang dalam pergerakan STAB. Krisis kader menimbulkan kesulitan menjalankan mesin organisasi.

15 Sebagai perbandingan : pada saat memutuskan untuk mencalonkan Muspani pada Pemilu 2004 diputuskan melalui rapat pimpinan bersama yang alot dan kritis antara STAB, Serikat Nelayan Bengkulu (SNEB) dan Himpunan Pedagang Mandiri Bengkulu (HPMB).

4. Lemahnya Pengorganisasian

Gerakan STAB pernah masif. Sisa-sisa kebesaran itu masih dapat dilihat di beberapa gerbang desa di Bengkulu Utara. Misalnya di Desa Arga Jaya, Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Mukomuko, masih ada tulisan “Selamat Datang di Desa Basis STAB”. Tulisan itu sebenarnya bisa dikatakan sebagai “monumen kebesaran STAB”. Bahwa benar STAB pernah besar dan kuat. Karena desa-desa itu tidak difasilitasi untuk membuat tulisan itu, tetapi cukup dengan instruksi tertulis dari BPP STAB ke basis-basis STAB. Termasuk juga instruksi untuk mengadakan perayaan Sumpah Pemuda, HUT RI, Hari Tani 24 September, dan sebagainya.

5. Lemahnya Kepemimpinan

Ketidakkampuan pemimpin untuk mengkonsolidasikan kekuatan tani menjadi persoalan utama. Kelemahan pemimpin pada upaya pembangunan kesadaran organisasi karena secara ideologi belum konkret dirumuskan, sehingga terjerumus pada kepentingan sesaat. Hilangnya nilai-nilai perjuangan dalam diri pemimpin menyebabkan anggota tidak lagi taat kepada organisasi.

6. Transformasi

Kegagalan organisasi melakukan transformasi dari tingkat penanganan kasus ke dalam kesadaran perjuangan rakyat menjadi penyebab utama. Upaya transformasi ini sangat penting, karena kesadaran organisasi tidak hanya terbatas pada penyelesaian kasus, tetapi pencerahan bahwa dengan organisasi, rakyat mampu melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan.

Penutup

Ada banyak harapan dari banyak pihak yang tetap menginginkan STAB dan gerakan rakyat di Provinsi Bengkulu kembali menata dan memperkuat gerakan yang dulu pernah kuat dan besar.¹⁶ Tentu saja ini harapan yang wajar, karena gerakan STAB pernah menjadi salah satu kiblat gerakan tani di Indonesia, selain Serikat Petani Pasundan (SPP).

Semoga gerakan tani (baca: STAB) dapat kembali pada Khitah 1998,¹⁷ walaupun sesungguhnya hal itu sangat sulit di tengah situasi politik yang semakin liberal dan sikap aktivis-aktivisnya yang dari segi konsistensi dan disiplin organisasi masih pantas dipertanyakan.

16 Pada tanggal 12 Juli 2008 Aktifis Pergerakan Syafe’I Rusin dan aktifis SPP Agustiana secara khusus datang ke Bengkulu guna menyemangati aktifis STAB

17 Istilah Khitah 1998 memudahkan kita untuk mengingat landasan dan tujuan pendirian STAB pada tahun 1998 ketika didirikan.

Rakyat Miskin Melawan Sistem Ekonomi Neoliberalisme

Marlo Sitompul¹

Indonesia memasuki 11 tahun era neoliberalisme, sistem ekonomi dan politik yang sering dipersamakan dengan drakula pengisap darah manusia. Neoliberalisme sudah diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 1980-an, tetapi baru menjadi masif setelah krisis ekonomi tahun 1997-1998.

Ibarat drakula dalam film-film horor Amerika, neoliberalisme mengisap tidak hanya darah manusia, tetapi juga segala sesuatu yang bernilai dan dapat dijual sebagai komoditas. Sistem ini memang tidak terlihat wujudnya secara fisik, karena bekerja dalam sistem ekonomi, politik, dan pemikiran filsafat. Meskipun demikian, kita bisa melihat dampak-dampak yang ditimbulkannya.

1 Tulisan dipersiapkan oleh Ketua Umum Serikat Rakyat Miskin Indonesia.

Sekilas Neoliberalisme

Apa itu neoliberalisme? Menurut Alvaro Garcia Linera, aktivis yang kini menjadi Wakil Presiden Bolivia, ada empat pilar utama neoliberalisme, yaitu (1) fragmentasi sosial masyarakat/gerakan pekerja; (2) privatisasi aset publik, kolektif, atau komunitas; (3) pelemahan negara sebagai penyedia kesejahteraan; dan (4) pembatasan terhadap demokrasi dan partisipasi rakyat.

Di Indonesia, fragmentasi sosial terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan, menempatkan rakyat benar-benar terindividualisasi dan terpisah satu sama lain. Tidak ada lagi budaya kolektif, saling berbagi dan membantu dengan tetangga, gotong-royong, dan sebagainya. Akibatnya, kita menanggung beban hidup (ekonomi, sosial, dan lain-lain) sendirian, karena orang tidak lagi peduli terhadap penderitaan orang di sekelilingnya.

Kedua, kebijakan privatisasi aset-aset publik, kolektif atau komunitas, yaitu pengambilalihan aset atau sumber daya milik rakyat oleh pihak swasta. Sebelum privatisasi diberlakukan, aset-aset dan sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti air, hutan, pendidikan, dan kesehatan, dikuasai oleh negara dan dikelola untuk kemakmuran rakyat. Karena dikelola oleh negara dan diperuntukkan rakyat, maka biaya pun sangat murah dan terjangkau. Misalnya, dulu biaya sekolah negeri lebih murah daripada sekolah swasta, rumah sakit umum lebih murah daripada rumah sakit swasta, dan air bersih lebih murah di PDAM ketimbang produk aqua dan sejenisnya.

Sekarang semuanya itu sudah dikontrol dan dikuasai pihak swasta, dari pendidikan, kesehatan, pelayanan air bersih, dan sebagainya. Dan pada awal tahun 2010, pelayanan listrik pun akan diserahkan kepada pihak swasta. Akibat kebijakan ini adalah mahalnya biaya-biaya atau ongkos pelayanan publik.

Ketiga, pelemahan negara sebagai penyedia kesejahteraan. Menurut penganut neoliberal, negara tidak boleh lagi campur tangan dalam persoalan ekonomi dan sosial, namun diserahkan kepada pihak swasta dan mekanisme pasar (baca: persaingan dan kompetisi). Akibatnya peran-peran negara yang baik untuk mengurus dan menjamin kesejahteraan sosial, seperti subsidi, jaminan sosial, jaminan pekerjaan, dan penghidupan yang layak dihilangkan juga.

Keempat, neoliberal juga sangat membatasi demokrasi dan partisipasi rakyat. Rakyat tidak boleh terlibat sama sekali dalam pengambilan keputusan. Semuanya diserahkan kepada pemerintah dan segelintir teknokrat (ahli dari universitas). Rakyat hanya boleh berpartisipasi dalam pemilu setiap lima tahun sekali. Setelah itu, semua pekerjaan pengambil keputusan diserahkan kepada pemerintah dan ahlinya. Akibatnya, banyak kebijakan politik yang sangat merugikan rakyat.

Kemiskinan Ekstrem

Kata ekstrem mengacu pada pengertian berlebih atau sangat parah. Artinya, kemiskinan ekstrem adalah tingkat kemiskinan yang sudah sangat parah dan kronis, atau biasa disebut kemiskinan absolut struktural, yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan standar hidup minimum komunitas masyarakat. Pengertian kemiskinan mengacu kepada kondisi ketiadaan sarana atau material untuk memenuhi kebutuhan dasar sebagai manusia, seperti makanan yang bernutrisi, pakaian, tempat bernaung (rumah), perawatan kesehatan, dan pendidikan.

Di Indonesia, tingkat kemiskinan ekstrem sebetulnya sudah cukup tinggi dan mengkhawatirkan. Meskipun tidak terdokumentasi dari data resmi, sebenarnya dapat dilihat secara kasatmata, seperti banyaknya tuna wisma, pengemis, dan gelandangan.

Berbicara soal kemiskinan di Indonesia, ada baiknya kita melirik tiga hal berikut. Pertama, kejatuhan daya beli yang begitu masif, khususnya bagi kalangan kelas menengah dan bawah. Hampir seluruh konsumsi rakyat Indonesia saat ini dibiayai melalui utang, mulai dari kredit konsumsi, program sosial neoliberal (BLT, KUR, BOS, PNPM, dan sebagainya) yang dibiayai dengan utang, program stimulus ekonomi yang juga dibiayai utang, hingga kenaikan gaji PNS dan TNI/Polri yang juga dibiayai dengan utang.

Kedua, munculnya kesenjangan pendapatan yang mencolok. Ekonom dari Universitas Gadjah Mada, Mudrajat Kuncoro, menyebutkan 40% penduduk Indonesia yang dikategorikan miskin belum pernah menikmati kue hasil pembangunan ekonomi. Ada individu yang sangat kaya, sehingga 150 orang terkaya sekarang ini menguasai Rp 650 triliun rupiah, tetapi ada 40 juta lebih orang miskin, yang harus cukup dengan Rp 6 ribu per hari.

Ketiga, *lumpeng-isasi* massa rakyat (penciptaan barisan penganggur), di mana sebagian besar masyarakat terdepak keluar dari pekerjaan tetap dalam sektor industri. Gejala ini ditandai oleh meningkatnya jumlah pengangguran dan perkembangan signifikan sektor informal. Sekarang ini, seperti yang diungkapkan OPSI, sektor informal sudah mencakup sekitar 70% dari angkatan kerja produktif.

Terakhir, perlu ditegaskan bahwa kemiskinan bukanlah persoalan nasib atau takdir, melainkan berhubungan dengan persoalan struktural kekuasaan, sistem ekonomi, dan kebijakan politik.

Kaum Pencari Kerja: Korban Neoliberalisme

Sejak neoliberalisme dipraktikkan, pertumbuhan sektor informal dan pengangguran (baca: pencari kerja) berlangsung

cukup pesat. Sebagai ilustrasi, ekonom dari UGM Sri Adiningsih menjelaskan bahwa pada tahun 2007 pekerja di sektor informal mencapai 47,7 juta dari total 49,8 juta pekerja. International Labour Organization (ILO) memperkirakan pengangguran di Indonesia pada tahun 2009 dapat bertambah 170.000 hingga 650.000 orang atau naik sekitar 9%.

Pengangguran tidak hanya masalah politik, tetapi juga menggambarkan krisis inheren dalam sistim kapitalisme. Terkait persoalan politik, angka statistik pengangguran selalu dibuat mengacu pada angka prestisius yang menguntungkan pemerintah, karena jika tidak, situasi ini bisa menstimulus gejolak sosial yang serius. Di Indonesia, BPS mempunyai andil besar dalam memanipulasi angka statistik pengangguran. Jika menggunakan metode penghitungan BPS, seseorang yang bekerja satu jam dalam seminggu dikatakan sebagai pekerja. Jadi, misalnya, Pak Ogah yang dapat bekerja serabutan dalam seminggu juga disebut pekerja. Dengan penghitungan ini, BPS mengklaim angka pengangguran terbuka pada Februari 2009 mencapai 9,26 juta atau 8,14% dari total angkatan kerja. Angka ini jelas manipulatif, selain karena metode penghitungan yang berbasis satu jam seminggu, juga disebabkan oleh waktu (*timing*) penghitungan dilakukan bertepatan dengan masa kampanye pemilu legislatif, sehingga dapat dipastikan pada saat itu hampir semua orang memiliki “pekerjaan”.

Jadi, seberapa besar gambaran pengangguran yang sebenarnya? Untuk menjawab ini, mari memeriksa pekerja di sektor manufaktur. Dalam lima tahun terakhir memang terjadi pelambatan pertumbuhan industri manufaktur, yaitu dari 7,2% (2004) menjadi 5,1% (2007), dan diperkirakan turun lagi menjadi 4,8% (2008). Akibatnya, jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur terus meningkat dan terjadi penurunan jumlah pekerja formal di sektor industri. Inilah proses

nyata yang mendorong lonjakan jumlah pengangguran. Jika kita meraba ke pembagian sektor formal dan informal, hanya sektor formal yang boleh dikatakan sebagai pekerja, yang jumlahnya 31% dari angkatan kerja.

Penyebab pengangguran di negara kapitalis maju dan negara berkembang juga berbeda. Di negeri kapitalis maju, penyebab utama *unemployment* adalah pengurangan jam kerja dan pengurangan jumlah pekerja, akibat mekanisasi dalam sistem produksi. Di negara berkembang, pendorong utama pengangguran adalah proses deindustrialisasi yang dipicu kebangkrutan industri nasional.

Di bawah neoliberalisme, dengan istilah fleksibilitas, pasar tenaga kerja akan diatur selentur mungkin untuk menopang proses akumulasi keuntungan. Dan bersamaan dengan itu, tidak ada lagi pekerja tetap atau jaminan terhadap pekerjaan.

Sejalan dengan itu, secara historis, menurut Mike Davis, gerakan kaum miskin di perkotaan mencerminkan perkembangan industri manufaktur dan peningkatan upah pekerja. Di sisi lain, terjadi peningkatan produksi dari sektor pertanian akibat penggunaan teknik modern dalam pertanian. Hal itu yang mendorong terjadinya urbanisasi, sebagai konsekuensi dari industrialisasi. Namun, saat ini, menurut Davis, peningkatan urbanisasi dan pengangguran dipicu oleh tekanan IMF dan Bank Dunia yang merestrukturisasi ekonomi negara dunia ketiga, sehingga terjadi kehancuran pertanian, PHK besar-besaran, penutupan pabrik, dan kejatuhan upah.

Di Argentina, kelompok sosial yang tersingkir dari proses produksi, yakni kaum pekerja dan kaum tani, menjadi kekuatan sosial paling dinamis dalam menghadapi neoliberalisme. Kelompok-kelompok *piquetero*, gerakan pekerja yang kehilangan

pekerjaannya, menjadi gerakan paling menentukan dalam menghadapi rezim neoliberal melalui aksi-aksi blokade jalanan dan jalan raya. Contoh lain adalah Gerakan Petani Tak Bertanah (MST) di Brasil. Dalam perjuangannya, MST berhasil memimpin kaum tani tak bertanah pada aksi-aksi pendudukan tanah-tanah luas milik para *latifundis*. Sebuah partai baru di Filipina, Power of the Masses Party (Partido Lakas ng Masa - PLM), juga memfokuskan pembangunan kekuatannya melalui pengorganisasian kaum miskin kota (*urban poor*).

Kontinuitas Program Sogokan (BLT, PNPM, BOS, KUR)

Dalam beberapa tahun ke depan, pemerintahan neoliberal masih akan “mengandalkan” program-program seperti BLT, KUR, PNPM, dan BOS untuk mengangkat popularitasnya. Di samping itu, dalam pemilu legislatif lalu, program-program semacam ini berhasil mendorong orang miskin tetap memilih *incumbent*.

Akan tetapi, perlu mengetahui apa esensi program-program seperti itu, karena selama ini kita hanya memahaminya sebagai program sogokan. Pertama, perlu diketahui bahwa program seperti BLT, BOS, KUR, dan PNPM didanai melalui pinjaman luar negeri, terutama Bank Dunia dan ADB. Program PNPM, misalnya, untuk tahun 2008 saja Bank Dunia menggelontorkan dana US\$ 400 juta. Bank Dunia juga mendanai program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) senilai US\$ 600 juta dan harus dibayar hingga tahun 2033. Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. (1). Bantuan sosial seperti itu merupakan cabang baru bagi pengembangbiakan utang luar negeri, setelah memanfaatkan pembangunan infrastruktur. (2). Dalam skema pembayaran utang luar negeri, pendanaan bantuan sosial masuk dalam kategori utang luar negeri yang harus ditutupi. Jadi, penggelontoran dana untuk program seperti ini akan ditutupi dengan pemangkasan anggaran untuk publik di APBN.

Program seperti BLT, BOS, KUR, dan PNPM berfungsi untuk mendorong konsumsi kalangan bawah yang nantinya dibayar oleh negara. Sebagai contoh, dana BLT Rp 100 ribu per bulan hanya cukup untuk konsumsi beberapa saat. Karena itu, pemerintahan neoliberal masih berkepentingan melanjutkan program-program seperti BLT, BOS, KUR, dan PNPM.

Merebaknya Penggusuran

Dalam beberapa bulan terakhir kita juga menyaksikan peningkatan intensitas penggusuran di beberapa kota utama di Indonesia, khususnya Jakarta, Bogor, Surabaya, Semarang, dan Makassar. Secara umum, target penggusuran paling banyak diarahkan pada permukiman warga dan pusat-pusat aktivitas ekonomi rakyat (pasar tradisional, lapak, dan sebagainya). Penggusuran pemukiman yang cukup besar adalah penggusuran warga Taman BMW Jakarta yang dihuni sekitar 1.000 keluarga dan penggusuran warga stren Kali Jagir Wonokromo Surabaya yang mencapai 335 keluarga. Penggusuran pusat ekonomi rakyat yang terbesar adalah penggusuran Pasar Koja di Jakarta, Pasar Bambu Kuning di Bandar Lampung, Pasar Barito di Jakarta, dan Pasar Terong di Makassar.

Dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan besar-besaran proyek infrastruktur seperti jalan raya, tol, dan pelabuhan. Ada korelasi antara peningkatan program proyek yang didanai Bank Dunia dengan peningkatan penggusuran. Seperti diketahui, Bank Dunia mempunyai program “*city without slum*”, permukiman-permukiman kumuh dihancurkan untuk memberi tempat bagi proyek-proyek mereka.

Hal itu juga terbaca dalam pertemuan ke-42 ADB di Bali, Mei 2010. Dalam dokumen mengenai rencana permukiman

yang dirilis pada 14 Mei 2009, diidentifikasi adanya rencana penggusuran sejumlah rumah/permukiman yang dilalui proyek ADB. Dalam dokumen itu, ADB sama sekali tidak menyinggung soal relokasi dan pemberian ganti rugi kepada korban atau rumah tangga yang terkena proyek mereka.

Selain itu, penggusuran juga dimotivasi oleh kebutuhan untuk meningkatkan pasar guna menampung output produksi kapitalis. Meskipun sektor informal menguntungkan dalam penyerapan tenaga kerja dan mendorong ekonomi rakyat, “kurang” menguntungkan bagi ekspansi pasar kapitalis. Merajalelanya pasar modern yang didominasi peritel asing seperti Carrefour, Giant, dan Hypermarket, membutuhkan penghancuran pasar-pasar tradisional. Hal seperti ini akan dipermudah dengan kebijakan “otonomi daerah” yang memberikan banyak kewenangan kepada pemerintah kota atau kabupaten.

Perlawanan Rakyat Miskin

Secara umum, perlawanan kaum miskin Indonesia masih mencirikan karakter kurang terorganisasikan dan spontan. Meskipun begitu, perlawanan rakyat miskin di perkotaan memperlihatkan peningkatan intensitas, terutama dalam menanggapi penggusuran, kebijakan pencabutan subsidi BBM, pelayanan kesehatan dan pendidikan, dan masalah kesejahteraan sosial lainnya.

Perlu dicatat beberapa perlawanan kaum miskin Indonesia, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Berhadapan dengan penggusuran, pedagang kaki lima (PKL) melakukan perlawanan di berbagai kota, seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Makasar, dan Medan. Meskipun begitu, perlawanan-perlawanan ini sangat sedikit yang mendapat dukungan dari sektor sosial lainnya seperti pekerja, mahasiswa, dan petani, kecuali penggusuran PKL di

Jalan Diponegoro, Jakarta. Di Surabaya dan Tangerang, meski penggusuran telah memakan korban, aksi solidaritas untuk mengutuk kejadian tersebut masih kecil.

Di luar perlawanan PKL, kaum miskin di permukiman kumuh juga memberikan perlawanan habis-habisan, terutama dalam penggusuran warga Taman BMW di Jakarta, penggusuran warga stren Kali Jagir di Surabaya, di Tangerang, Bogor, Bandung, dan beberapa tempat lainnya. Pesan yang tersampaikan dari perlawanan itu adalah negara melepas tanggung jawabnya dan kaum miskin dianggap warga negara tanpa pengakuan.

Pada level perjuangan politik, kaum miskin di perkotaan juga merespons dengan cukup baik, di antaranya adalah demonstrasi penolakan kenaikan BBM oleh SRMI yang tergabung dalam Front Rakyat Menggugat (FRM) dan perlawanan kaum miskin kota yang di organisasi UPC untuk menolak kenaikan BBM di depan Istana Negara. Pada isu politik lainnya, seperti pilkada, kaum miskin menjadi kekuatan sosial yang paling sering termobilisasi, terlepas itu digunakan untuk kepentingan politik tertentu. Namun, hal itu menjelaskan, kaum miskin mulai ambil bagian dalam perjuangan politik.

Dalam merespons Pemilu 2009, organisasi-organisasi rakyat miskin melakukan upaya berbeda-beda. SRMI, misalnya, merespons pemilu melalui kerja sama dengan PBR dengan mengajukan sejumlah kadernya sebagai caleg. Sementara UPC mencoba mengajukan proposal program dan MoU kepada caleg dari partai mana pun, dengan mengikat kesepakatan melalui kontrak politik.

Problem Perlawanan Kaum Miskin

Kendala terbesar kaum miskin di Indonesia adalah karakter sosialnya yang tercerai berai dan terperangkap pada

kompetisi ekonomi yang ganas. Meskipun berkali-kali berhasil mengangkat perlawanan, begitu mudah pula dipatahkan oleh alat-alat kekerasan negara. Meskipun demikian, tanpa sebuah organisasi yang memberikan pedoman, tenaga massa akan bubar bagaikan uap yang tak ditampung dalam kotak seher. Namun faktor penggerak bukanlah seher atau kotak, melainkan uap itu sendiri (Leon Trotsky) .

Belajar dari pengalaman gerakan kaum miskin di beberapa negara, masalah terbesar dari gerakan semacam ini adalah pengorganisasian. Di Filipina, khususnya di kota Metro Manila, kaum miskin yang mendiami sejumlah *slum* diorganisasikan melalui komite-komite komunitas dan organisasi-organisasi komunitas. Organisasi terbesar kaum miskin kota adalah ZOTO, sebuah federasi rakyat miskin kota beranggotakan 182 komite komunitas yang tersebar di 18 titik di kota Metro Manila dan sekitarnya. Tuntutan utama mereka adalah perumahan dan lapangan pekerjaan. Sementara dalam melayani komunitas, aktivitas perjuangannya lebih beragam seperti pengadaan listrik, air bersih, unit usaha, dan bahan pangan.

Di Argentina, gerakan Piquetero justru terlahir dari respons spontan dan kemarahan rakyat akibat neoliberalisme. Mereka menggelar aksi blokade jalanan di sepanjang kota Buenos Aires. Gerakan Piquetero berhasil menumbangkan sejumlah presiden. Di Venezuela, meskipun perlawanan kaum miskin kota benar-benar spektakuler dan memimpin, pengaruh politik mereka baru benar-benar terasa setelah diorganisasikan dalam dewan-dewan komunal dan komite-komite komunitas.

Secara teoretis, neoliberalisme bukan hanya menghancurkan kesejahteraan rakyat, melainkan juga menghancurkan syarat-syarat mereka untuk lebih produktif, termasuk mengatomisasikan mereka dalam grup dan individu yang berjuang untuk kepentingan

sendiri-sendiri. Sehingga, untuk menghancurkan dampak neoliberal tersebut, metode pengorganisasian massa melalui partisipasi demokrasi menjadi senjata penting. Lihat pengalaman anggaran partisipatif di Porto Allegre ataupun demokrasi partisipatif yang diterapkan di Kerala, India.

Masalah partisipasi ini, dalam sejumlah praktik, hendak menjadikan setiap orang atau massa sebagai protagonis (pelaku utama) dalam perubahan. Dalam hal ini, kita tidak berbicara soal besar dan kecilnya keanggotaan organisasi atau partai, tetapi berbicara soal bagaimana menarik lebih banyak massa rakyat di belakang proposal dan pekerjaan politik kita. Tidak bisa lagi, dalam melakukan pengorganisasian, organisasi bersandar pada respons-respons kasuistik seperti penggusuran dan perda, tetapi organisasi harus tampil mampu mengurus rakyat.

Pada lapangan politik, rakyat miskin sudah harus senantiasa ditarik untuk terlibat dalam proses-proses politik, seperti pengambilan kebijakan, mengikuti pemilihan, dan mengontrol pemerintahan sehingga mereka lebih matang dalam berpolitik.

Kapitalis Nasional atau Elite Nasional

Karena isu anti-neoliberal dibesarkan sedikit banyak oleh tangan elite, maka sebagian orang pun menuduh isu ini tidak murni. Lantas siapa dan gerakan mana yang murni?. Kami tidak akan memasuki perdebatan soal anti-neoliberal yang murni dan tidak murni, tetapi mencoba melihat sikap kapitalis nasional yang anti-neolib dari perspektif kepentingan mereka.

Seperti diketahui, beberapa kapitalis nasional kelihatan begitu bersemangat dalam mendorong isu kemandirian nasional. Karena beberapa klausul proposal mereka berbau menuntut

proteksionisme dan berorientasi pada ekonomi nasional yang kuat, maka sebetulnya ini berbau anti-neoliberal. Setelah ditelusuri, ternyata situasi yang mendorong pemunculan sikap itu adalah neoliberalisme, yang dalam beberapa tahun terakhir memicu kehancuran industri dalam negeri.

Dalam membicarakan kapitalis nasional yang anti-kapitalis, kami sama sekali tidak mengacu pada konsep borjuis nasional progresif atau kapitalis yang dapat menjalankan proyek pembangunan nasionalnya. Akan tetapi, kapitalis nasional yang kami maksud adalah sektor yang tidak dapat hidup (eksis) di bawah tekanan neolib tanpa memasukkan dirinya pada aliansi dengan sektor populer, sebuah proyek nasional yang membuat mereka *survive*, di mana negara memberikan bantuan kredit dan mengkondisikan pasar internal yang didorong oleh kebijakan sosial negara.

Dalam hal ini, kami menelusuri pertentangan kapitalis nasional dan multinasional dalam pusaran sistem neoliberalisme. Apa yang menggerakkan aktivitas kapitalis adalah keinginan mendapatkan laba (profit). Dalam kaitan ini, ekonom Anwar Shaikh mengatakan, dalam mengejar keuntungan (profit), individu atau perusahaan kapitalis harus menghadapi dua medan pertempuran. Pertama, di dalam proses produksi, mereka melawan kepentingan buruh upahannya. Kedua, di dalam proses sirkulasi, mereka menghadapi kompetitornya (kapitalis lain) dalam rangka merealisasikan keuntungan.

Kita tidak membahas yang pertama. Sebab, menurut kami, hal tersebut sudah benar-benar dipahami banyak orang. Kita akan membahas yang kedua, medan pertukaran, di mana seorang individu kapitalis akan dipaksa untuk menggunakan segala macam cara untuk mengalahkan pesaing (kompetitor). Dalam menyingkirkan pesaing, para kapitalis akan menggunakan segala

cara, mulai dari memasang iklan produk, perang tarif (harga), hingga penggunaan cara-cara sabotase.

Dalam neoliberalisme, perdagangan bebas (*free trade*) dan pasar bebas (*free trade*) menjadi motor penggerak. Dalam pertarungan ini, bagaimanapun setiap kapitalis -- kecil, menengah, dan besar -- tidak memiliki kemampuan yang sama. Demikian pula dengan kapitalis nasional dan multinasional, jelas memiliki kemampuan yang berbeda. Untuk menjelaskan hal ini, kita bisa mengacu pada beberapa hal sebagai penyebab.

Pertama, perkembangan kapitalisme yang tidak merata (*underdevelopment capitalism*). Dalam proses sejarah, masyarakat-masyarakat yang pada awalnya terpisah satu sama lain, yang berkembang dengan kecepatan yang berbeda-beda, ketika mulai saling berhubungan (sambil menampilkan cara-cara produksi yang berbeda) sama-sama saling mempengaruhi proses sejarah masing-masing, melalui perdagangan, perang, penyebaran teknologi, dan sebagainya. Proses interaksi itu yang membuat sejarah memiliki kompleksitas yang rumit. Dan, sekalipun Marx yakin bahwa kapitalisme saat itu sedang berusaha mengatasi perbedaan-perbedaan nasional, kapitalisme itu sendiri juga menimbulkan bentuk-bentuk baru perkembangan yang tidak merata (*David Fernbach, Revolusi 1848 dan Perkembangan Pemikiran Marx*).

Kedua, proses kolonialisme dan imperialisme yang berlangsung beratus-ratus tahun, bahkan hingga sekarang dalam bentuknya yang modern, benar-benar menghambat perkembangan negara jajahan dan semi-jajahan. Dengan tangan-tangan imperialisme yang menguasai sektor-sektor ekonomi yang penting (sumber daya, tenaga kerja, dan pasar), negara-negara jajahan dan dunia ketiga sulit berkembang atau bertransformasi menjadi sejajar dengan negara-negara kapitalis maju. Dan imperialisme, dalam segala hal, berusaha memelihara hubungan yang timpang ini.

Di Indonesia, dampak neoliberalisme bagi kapitalis nasional mungkin dapat dijelaskan pada gejala deindustrialisasi yang semakin meningkat. Dalam lima tahun masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono telah terjadi pelambatan pertumbuhan industri manufaktur, yaitu dari 7,2% (2004) menjadi 5,1% (2007), dan turun lagi menjadi 4,8% (2008). Gejala industrialisasi, menurut banyak ekonom dan kalangan pengusaha, disebabkan penerapan liberalisasi perdagangan dan investasi.

Di sini, kapitalis nasional yang menentang neoliberalisme merupakan kapitalis yang kepentingan bisnisnya, secara objektif, masuk dalam pertentangan dengan kepentingan kapitalis multinasional. Karena itu, bagi kapitalis seperti ini, tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan kepentingan bisnisnya selain meminta perlindungan pada negara. Pada masa lalu, borjuasi nasional dapat tumbuh dengan memanfaatkan proteksionisme. Pada masa itu, proyek-proyek borjuasi nasional berjalan karena ditopang aliansi negara dengan kelas pekerja, petani, sektor-sektor sosial terhisap di negeri-negeri tertindas. Pada masa neoliberal, di mana peran negara sebagian besar dilucuti pada wilayah ekonomi, sehingga kapitalis nasional hampir tidak mempunyai tameng lagi untuk melindungi diri.

Proposal ke Depan

Untuk menarik kepentingan seluruh sektor yang bermacam-macam itu, kita dituntut untuk memformulasikan sebuah program atau *platform* yang konkret. Program konkret ini, selain dapat mengkonversikan seluruh sektor korban neoliberal yang bermacam-macam, juga harus mampu menjawab tuntutan mendesak seluruh rakyat sekarang ini: bahan kebutuhan pokok (pangan), perumahan, energi, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Selanjutnya, dalam kerangka itu, gerakan anti-neoliberal dituntut untuk menyodorkan sebuah proyek nasional yang merupakan alternatif terhadap kegagalan kapitalisme neoliberal. Secara global, sejujurnya, beberapa kawasan memperlihatkan pembangunan ekonomi yang berada di luar kerangka neoliberalisme, khususnya Amerika Latin. Amerika Latin, misalnya, yang telah mengharu biru dalam membangun alternatif terhadap kapitalisme neoliberalisme, bisa dijadikan salah satu bahan pelajaran yang penting, tapi bukan ditiru mentah-mentah secara membabi buta.

Hanya dengan revolusi sebuah bangsa atau masyarakat bisa keluar dari teka-teki sejarah dan jebakan kolonial. Demikian kata Chavez, kita harus berani mengatakan keterpurukan dan kemunduran bangsa ini terjadi karena rantai-rantai penjajahan masih berlangsung, dan tidak sepenuhnya diputuskan.

Bagaimana kita, sebagai sebuah bangsa, dapat berbicara kemakmuran dan keadilan sosial, jika sumber daya alam, tenaga kerja, pasar, dan potensi nasional kita masih dicaplok dan dikuasai bangsa asing? “Jangankan masyarakat yang berkejahteraan sosial, menyusun masyarakat normal saja tak mungkin, sebelum selesainya tugas nasional,” kata Bung Karno. Bahkan Soekarno mengutip Giuseppe Mazzini, salah satu tokoh pendiri Italia, “Menyusun tanah air ini, malahan satu keharusan. Anjuran-anjuran dan daya upaya-daya upaya yang kubicarakan, hanyalah dapat diselenggarakan oleh tanah air yang bersatu dan merdeka... Jangan mengira bahwa kamu dapat memperbaiki nasib hidupmu sebelum memecahkan soal nasional lebih dahulu. Ikhtirmu sia-sia.”

Karena itu, kami kembali menegaskan, kaum miskin harus berjuang sekeras-kerasnya bersama gerakan rakyat Indonesia lainnya, untuk mengakhiri sistem neoliberalisme atau penjajahan gaya baru, yaitu dengan merebut kembali kedaulatan bangsa

kita. Kita sangat menyakini, ketika kedaulatan telah direbut, penindasan dan eksploitasi dari luar dapat diakhiri.

Strategi politik umum perjuangan rakyat miskin Indonesia adalah membangun front persatuan untuk menuntaskan perjuangan demokrasi-nasional. Front persatuan ini merangkul, setidaknya-tidaknya, seluruh tenaga nasional yang menentang penjajahan baru, meliputi buruh, petani, mahasiswa, partai politik prorakyat, akademisi progresif, perempuan, seniman, dan pengusaha nasional yang pro kepentingan nasional.

Membangun Gerakan Oposisi bagi Rakyat Pekerja

Anwar “Sastro” Ma’ruf¹

Pengantar

Seperti dugaan berbagai kalangan gerakan masyarakat yang kritis, Pemilu 2009 bukanlah pemilu rakyat, melainkan hanya arisan politik dan politik dagang sapi yang tidak akan berdampak signifikan dalam pemenuhan kesejahteraan rakyat pekerja yang lebih baik di semua sektor. Sebaliknya, Pemilu 2009 hanyalah melanggengkan kekuasaan rezim yang mengabdikan sepenuhnya pada sistem ekonomi neoliberal. Artinya, kesejahteraan rakyat yang menjadi janji-janji manis ketika kampanye sudah pasti akan diabaikan. Kalaulah ada, sejatinya

1 Penulis adalah Ketua Nasional Komite Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja (KP PRP), Koordinator Komite Solidaritas Nasional (KSN) dan Juru Bicara Front Oposisi Rakyat Indonesia.

hanyalah efek samping, bukanlah tujuan utamanya. Sebab, ketika sebuah negara menggunakan sistem neoliberal, tujuannya adalah memberikan jalan seluas-luasnya bagi modal untuk menguasai investasi, keuangan, dan perdagangan. Tentu bagi modal, tujuannya bukanlah peningkatan kesejahteraan rakyat, melainkan mengeruk keuntungan seluas-luasnya.

Sebagai contoh, tujuan pemilik modal berinvestasi adalah untuk meraup keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alam Indonesia yang terkandung di daratan dan lautan akan dijadikan sasaran eksploitasi bagi modal semata-mata untuk meraup keuntungan bagi sang eksploitor (modal nasional dan internasional). Kemudian sumber daya manusia, di mana populasi penduduk Indonesia yang lebih dari 232 juta jiwa dengan tenaga produktif lebih dari 120 juta jiwa, hanya akan diperas tenaga dan pikirannya dengan kebijakan politik upah murah. Selain itu, populasi yang besar tersebut akan dijadikan konsumen atau sasaran bagi pasar yang sangat potensial dari hasil produksi negara-negara yang industrinya sudah mapan. Lebih gila lagi, negara kita menjadi sasaran pembuangan sampah dari negara-negara tersebut.

Realitas ini menunjukkan sistem ekonomi neoliberal senyatanya hanya berkepentingan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Sementara kalaulah terbukanya lapangan kerja, hanyalah efek. Itu pun tidak signifikan dengan jumlah pengangguran dan pekerja informal yang terus bertambah. Kemudian kebijakan "redistribusi tanah" sesungguhnya palsu. Kebijakan ini dipakai sebagai jalan dalam penyediaan pembangunan infrastruktur dan lahan-lahan pertambangan bagi kepentingan modal. Akses petani terhadap tanah sebagai alat produksi tetap saja sulit dan tidak akan mampu membendung serangan neoliberal yang terus merangsek seluruh pelosok tanah air. Artinya, desa pun terancam

kepentingan neoliberal. Proyek pembangunan infrastruktur hanyalah rute penyediaan atau persembahan bagi modal agar beroperasi dengan lancar, bukan pembukaan akses bagi produksi petani yang dapat menguntungkan petani.

Melihat Prosesi Menuju Pemilu 2009

Secara teori, kebijakan yang tertuang dalam paket Undang-undang Politik mengarah perubahan. Sistem multipartai perlahan namun pasti akan diarahkan untuk memotong partai-partai gurem yang tumbuh dengan berbagai kepentingannya. Baik partai yang lahir dari bawah, termasuk kalangan gerakan sosial, maupun partai yang sekedar ingin tampil dalam aktivitas politik atas kepentingan oportunistik. Partai-partai kecil akan terganjal, baik oleh kebijakan birokratis maupun pembiayaan yang sangat mahal untuk membangun partai politik. Ruang ini dapat dimaknai dalam demokrasi liberal. Tentu politik uang akan sangat menentukan. Dapat ditebak, dengan regulasi seperti ini, hanya kalangan pemilik modal dan birokrat, termasuk militer, yang akan melenggang dalam sistem kepartaian. Sebagai contoh kita bisa melihat bagaimana beratnya Partai Persyarikatan Rakyat (PPR) dan Partai Persatuan Pembebasan Nasional (*Papernas*) yang tidak mampu masuk dalam pertarungan terbuka dengan partai-partai borjuis. Sudah terganjal oleh rute proses untuk menjadi partai yang lolos sebagai kontestan Pemilu 2009.

Hasil akhir Pemilu 2009 memperlihatkan berbagai dinamika. Dalam pemilu legislatif, hanya 9 partai yang lolos *parlementary treshold*. Perincian perolehan suara versi Komisi Pemilihan Umum: Partai Demokrat 20,85 %, Partai Golkar 14,45 %, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 14,03 %, Partai Keadilan Sejahtera 7,88 %, Partai Amanat Nasional 6,01 %, Partai Persatuan Pembangunan 5,32 %, Partai Keadilan Bangsa

4,94 %, Partai Gerakan Indonesia Raya 4,46 %, dan Partai Hati Nurani Rakyat 3,77 %. Dari lebih dari 176.395.015 pemilih, hanya 104.095.847 pemilih yang ikut andil dalam Pemilu 2009. Artinya, angka Golput cukup tinggi, yakni 72.299.168 pemilih. Sementara Partai Demokrat hanya memperoleh 21.703.137 suara. Hitungan ini secara global, belum menghitung berbagai kecurangan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Tingginya angka Golput menunjukkan pesimisme pada partai dan elite politik kontestan Pemilu 2009 (*Sumber; KPU 09/05/2009*).

Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan tiga pasangan calon, yakni Megawati - Prabowo yang diusung PDIP dan Gerindra; Susilo Bambang Yudoyono - Boediono yang diusung Partai Demokrat, PKS, PAN, dan PKB; serta Jusuf Kalla - Wiranto yang diusung Partai Golkar dan Hanura. Militer hadir dalam ketiga pasangan calon, baik sebagai calon presiden (SBY) maupun wakil presiden, yakni Prabowo dan Wiranto. Hal ini menunjukkan betpa militer warisan Orde Baru masih mencengkeram kuat peta perpolitikan di negeri ini, meskipun mereka pensiunan jenderal yang jelas-jelas berperan dalam pelanggaran HAM di masa lalu. Latar belakang para calon presiden dan wakil presiden secara umum didominasi militer dan sekaligus pengusaha, politikus sekaligus pengusaha, atau sebaliknya, pengusaha sekaligus politikus, dan ada satu birokrat. Dari perespektif ini dapat ditebak bagaimana peluang keberpihakan mereka kepada rakyat pekerja.

Hasil akhir perolehan suara, SBY - Boediono meraih 60,20 %, Megawati - Prabowo 26,79 %, dan JK - Wiranto 12,41 %. Tercatat 127.987.655 pemilih dengan suara rusak 6.479.174 buah. Sedangkan Golput 48.307.260 buah, dibandingkan pemenang pemilu SBY - Boediono yang memperoleh 73.874.562 suara atau lebih besar dibandingkan dengan urutan kedua Megawati - Prabowo yang meraih 32.548.105 (*Media Center KPU, 24 Juli 2009*). Sudah pasti banyak sekali kecurangan, terutama

yang dilakukan *incumbent* dengan menggunakan kekuasaannya agar dapat terus mempertahankan kekuasaannya. Termasuk ilusi dengan berbagai cara, mulai janji-janji palsu, saling serang antarcalon, sampai menipu dengan image keberanian, kecepatan, kesantunan, dan lain-lain. Kemudian, salah satu aspek penentu kemenangan, meskipun ini adalah tipuan politik, yang menang adalah calon presiden yang santun.

Selain itu, permasalahan kekisruhan Daftar Pemilih Tetap (DPT) juga terjadi di beberapa daerah. Anak-anak yang belum memiliki hak pilih terdaftar dalam DPT. Bahkan, ada orang yang telah meninggal juga dimasukkan dalam DPT. Sementara orang-orang yang seharusnya memiliki hak pilih tidak terdaftar dalam DPT. Hal ini jelas merupakan cacat dalam proses Pemilu 2009 yang mendudukkan beberapa orang sebagai wakil rakyat dan SBY - Boediono sebagai pemenang pemilu presiden. Anggota Polri dan TNI yang masih aktif pun terdeteksi masuk ke dalam DPT (*Kompas.com*, 1 April 2009).

Walaupun dengan berbagai kekisruhan dan kecacatan pemilu tersebut, akhirnya SBY dan Partai Demokrat melenggang mulus, karena merasa menang dalam dua proses pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Namun, kubu SBY belum puas bila hanya sampai di sana. Diajaklah sejumlah partai untuk berkoalisi dengan berbagai pendekatan politik, yakni bagi-bagi jatah kekuasaan, baik di kabinet maupun parlemen. Hal ini kemudian menyebabkan tidak ada satu pun partai politik yang berada di parlemen berani dengan tegas menyatakan sikap oposisi. Tanpa ada partai politik yang berani menyatakan oposisi, tak akan ada yang berani melawan kehendak politik eksekutif untuk memperkuat kekuasaannya, baik DPR maupun eksekutif.

Secara umum dapat dilihat tidak ada oposisi yang signifikan dalam pemerintahan era ini. PDIP, misalnya, tindakan oposisinya

terganjal tawaran jabatan salah satu pengurus terasnya menjadi ketua MPR. Sementara hampir semua partai diberi jatah menteri atau jabatan-jabatan strategis lainnya. Tentu ini bukan sekadar taktik, melainkan tindakan pengamanan terhadap kekuasaan agar dapat diatur dan dikontrol sejalan dengan kepentingan rezim. Tanda-tanda ini kemudian mengingatkan kita pada kediktatoran rezim Orde Baru, yang demikian cerdik memainkan legitimasi kemenangan dari demokrasi prosedural untuk membangun kekuasaannya yang tak tergoyahkan secara berkelanjutan. Inilah kenyataan Indonesia setelah pemilu yang di sana-sini digembargembarkan demokratis, ternyata berujung pada kebangkitan sebuah rezim. Ketidakberanian partai-partai politik untuk berposisi terhadap rezim SBY tentu sedikit banyak dikarenakan ingin bermain di zona nyaman secara ekonomi politik. Inilah yang disebut kartel partai politik, yakni gabungan partai politik – layaknya perusahaan – yang berkarakter monopoli ekonomi politik, sebagai daya dukung rezim neoliberal.

Yang menjadi masalah bagi rakyat pekerja adalah rezim hari ini menjalankan paket kebijakan pasar bebas sesuai dengan keinginan kapitalisme global. Dan masih tetap tidak ada kekuatan oposisi yang mampu menghadang setiap agenda pemenuhan pelaksanaan pasar bebas di Indonesia.

1. Problem Pokok Rakyat Pekerja sebagai Dampak Kebijakan Pemerintahan SBY

Naiknya SBY-Boediono adalah kemenangan mutlak kubu neoliberal. Pada Kabinet Indonesia Bersatu II, sejumlah loyalis neoliberal masih terus dipertahankan dan malah diberikan porsi kekuasaan yang lebih besar. Porsi tersebut antara lain diberikan untuk menempati departemen-departemen strategis dan berhubungan dengan masalah ekonomi, perdagangan, dan sumber

daya alam. Dengan begitu, tentu saja susunan pemerintahan baru ini dapat dipastikan hanya akan melanjutkan terlaksananya agenda-agenda neoliberalisme di Indonesia.

Sudah barang tentu kebijakan yang akan dijalankan pemerintahan kapitalis ini akan mengancam keberadaan rakyat di Indonesia. Hak-hak rakyat yang seharusnya dipenuhi oleh negara, akan dikebiri dan dipangkas agar kepentingan para pemilik modal terjamin. Ancaman-ancaman tersebut meliputi:

a. Ancaman bagi Politik dan Demokrasi

Tidak terbayangkan sebelumnya, kuatnya koalisi pendukung pemerintah telah menyebabkan hilangnya kehadiran oposisi dari lawan politik pemerintahan SBY - Boediono. Namun, kenyataannya hal tersebut bukanlah jaminan bagi rezim yang sudah berpengalaman memerintah pada periode sebelumnya selama lima tahun tanpa guncangan politik yang berarti. Pemerintahan SBY jilid 2 harus menghadapi begitu banyak sandungan menjelang 100 hari usia pemerintahan. Padahal, program "lanjutkan" seperti dalam slogan dalam kampanyenya seharusnya tidaklah banyak kesulitan. Namun, realitasnya bertolak belakang. Berbagai ganjalan yang merupakan dosa-dosa politik rezim satu per satu mulai terkuak dan ditengarai akan mengancam demokrasi.

Dimulai dengan krisis politik dan hukum yang merupakan ancaman bagi demokrasi Indonesia, yakni adanya kontroversi pemandulan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan pemenjaraan Antasari Azhar, yang kemudian disusul konflik KPK - Polri (Cicak vs Buaya) dengan pemenjaraan Bibit dan Chandra, hingga terbongkarnya mafia peradilan melalui salah satu rekaman penyadapan KPK, yakni percakapan telepon Anggodo Widjojo dengan berbagai pihak dari institusi peradilan. Mafia peradilan,

hukum, dan politik yang selama ini dianggap sebagai fitnah, benar-benar terbongkar dan nyata dapat dilihat dan dipahami oleh rakyat mayoritas. Kecurangan politik dalam pemilu lalu dengan pendanaan kongkalikong bersama pemilik modal dan skandal perampokan uang negara dengan cara korupsi melalui skandal Bank Century.

Namun, watak "muka tembok" partai dan elite politik borjuasi di Indonesia tidak membuat bergeming dan tidak berani bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang melawan hukum dan konstitusi negara. Yang terjadi sebaliknya, terus-menerus melakukan adegan politik pencitraan dengan cara-cara cengeng dan pura-pura santun. Tentu hal ini memuakkan bagi rakyat yang sudah paham atas kebusukan rezim SBY sebagai eksekutif, mayoritas anggota legislatif, dan kalangan "penegak hukum" atau yudikatif. Semua skandal yang terbongkar tersebut sebenarnya menggambarkan praktik operasi politik borjuasi yang berjalan selama ini di Indonesia.

Mempertahankan kebijakan politik paket undang-undang politik sangat dimungkinkan hanya untuk mempertahankan partai-partai besar dan partai-partai gurem dipaksa melakukan fusi atau masuk dalam partai-partai besar. Kebijakan fusi belum berjalan pun, diskriminasi politik sudah terjadi, sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyebabkan hanya partai-partai borjuasi yang akan mampu ikut bertarung dalam pertarungan di elektoral.

Kemudian kebijakan pencekalan atau kontrol terhadap ormas juga akan diperketat. Hal ini terbukti dengan munculnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2008 mengenai penerimaan dan pemberian bantuan organisasi kemasyarakatan. Hal ini diindikasikan sebagai instrumen kontrol baru atas ruang dan gerak organisasi kemasyarakatan dalam melakukan kritik

serta kontrol terhadap mekanisme dan pelaksanaan mandat pemerintahan. Permendagri Nomor 38 Tahun 2008 yang diterbitkan pada 15 Agustus 2008 merupakan upaya pemerintah, setelah berkali-kali gagal, untuk memasukkan revisi UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang ormas ke dalam prioritas legislasi nasional tahunan.

Sebenarnya tidak ada yang benar-benar baru dari materi muatan yang diatur dalam Permendagri tersebut. Pengaturan mengenai keharusan ormas untuk mendapatkan persetujuan pemerintah dalam hal mendapatkan bantuan dari pihak asing sesungguhnya telah diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan UU Ormas. Permendagri Nomor 38 Tahun 2008 hanyalah alat untuk memperkuat pengekanan terhadap ormas.

Kemudian realitas kebebasan berserikat di perburuhan, terjadi pemberangusan serikat yang sistematis. Berdasarkan data dari Komite Solidaritas Nasional, dari 28 kasus yang terkumpul, analisisnya menemukan minimal 24 pola yang dikembangkan oleh rezim untuk melakukan pemberangusan terhadap serikat-serikat yang berpotensi melawan. Tindakan-tindakan tersebut antara lain dengan memecat, mengkriminalkan, atau skorsing terhadap pengurus serta menaikkan jabatan dan menawarkan sejumlah uang sebagai suap. Juga mutasi, intimidasi, membuat serikat tandingan, dan lain-lain. Semuanya tidak memberikan hak sebagai serikat sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2000. Termasuk tidak melakukan tindakan, baik perdata maupun pidana, atas pengaduan atau laporan pelanggaran dari serikat buruh. Sebaliknya, pengaduan pengusaha selalu menjadi prioritas bagi aparat kepolisian untuk dilanjutkan. Kesimpulan lain yang didapat dalam hal pemberangusan serikat atau *union busting* adalah untuk melancarkan agenda neoliberal. Antara lain di sektor manufaktur dan beberapa sektor lain berupa pemberlakuan perubahan sistem ketenagakerjaan yang fleksibel, yaitu sistem

kerja kontrak dan *outsourcing*. Di sektor BUMN adalah upaya untuk melancarkan proyek privatisasi. Sudah terbukti bagaimana terjadi kongkalikong antara pemerintah dan pengusaha dalam memberangus serikat sebagai tindakan yang mengancam demokrasi. Dengan diberangusnya serikat-serikat buruh yang kritis dan progresif, yang diharapkan rezim dan kepentingan modal adalah agar tidak terjadi kontrol dan perlawanan dalam pelaksanaan agenda neoliberal seperti privatisasi dan pemberlakuan upah murah yang ramah investasi.

b. Ancaman Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

Belum genap 100 hari pemerintahan SBY – Boediyono, sudah tergambar kekhawatiran kalangan gerakan. *National Summit* yang dibuat beberapa waktu lalu menunjukkan bagaimana arah pembangunan yang sepenuh-penuhnya mengabdikan kepada kebijakan pasar bebas. *National Summit* ini merupakan koordinasi antara aparaturnya rezim SBY dan dewan pengusaha, yang terhimpun dalam Kamar Dagang Indonesia (Kadin), untuk menjabarkan agenda neoliberalisme selama lima tahun ke depan. Menariknya, 80 % panitia *National Summit* adalah anggota Kadin di bawah koordinasi Menko Perekonomian, Hatta Rajasa. Bahkan *blue print National Summit* ini menggunakan *road map* Kadin. Hal ini tentu saja menunjukkan bahwa perencanaan program strategis Indonesia dalam 100 hari ataupun lima tahun mendatang ditujukan untuk kaum pengusaha.

Rekomendasi *National Summit* sebenarnya mengandung tiga sendi program neoliberal, yakni pembangunan infrastruktur; revitalisasi pengusaha mikro, kecil, menengah dan pasar tradisional; serta neo-institusionalisasi², yang seluruhnya akan

2 Kebijakan pemerintah untuk membentuk badan-badan di luar departemen yang difungsikan sebagai pelaksana regulasi di bidang keuangan, hukum, politik dan

berupa program deregulasi atau neo-regulasi serta debirokratisasi atau neo-birokratisasi.

Untuk rentang 100 hari pemerintahan rezim SBY, mereka menjanjikan revisi regulasi ataupun pembuatan regulasi baru dan pemangkasan birokrasi ataupun penciptaan biro atau lembaga baru, yang direncanakan mencakup 15 area perhatian, meliputi (1) pemberantasan mafia hukum; (2) revitalisasi industri pertahanan; (3) penanggulangan terorisme; (4) mengatasi permasalahan listrik; (5) meningkatkan produksi dan ketahanan pangan; (6) revitalisasi pabrik pupuk dan gula; (7) membenahi kompleksitas penggunaan tanah dan tata ruang; (8) meningkatkan infrastruktur; (9) meningkatkan kredit pinjaman usaha mikro, kecil, dan menengah; (10) perubahan iklim dan lingkungan; (11) usaha pendanaan; (12) reformasi kesehatan dengan mengubah paradigma masyarakat; (13) reformasi di bidang pendidikan; (14) kesiapsiagaan penanggulangan bencana; dan (15) koordinasi pemerintah pusat dan daerah.

Bayangkanlah betapa dalam tempo 100 hari ini Dewan Perwakilan Rakyat akan sibuk menerima rancangan regulasi baru ataupun revisi. Serupa pula dengan eksekutif yang akan dipadati kehebohan untuk membentuk lembaga-lembaga baru atau merevisi/menghilangkan lembaga yang sudah ada. Artinya, pekerjaan rezim SBY akan berputar dalam urusan mekanisme dan prosedur pembuatan regulasi baru atau merevisi regulasi yang dianggap kurang menguntungkan agenda neoliberal, penciptaan lembaga baru untuk menjalankan regulasi dan menyeleksi siapa regulatornya atau pejabat yang akan menjalankan regulasi tersebut. Negara dijadikan sebagai tukang pencetak regulasi

sebagainya. Badan ini bisa berstatus ad-hoc atau berstatus sebagai komisi Negara. Contohnya di bidang keuangan yang berstatus ad-hoc, yakni ketika ada banyak bank-bank yang bangkrut pada krisis 1997 dibentuklah BLBI. Contoh yang berstatus komisi Negara untuk memberantas korupsi dibentuklah KPK

dan birokrasi untuk menjamin investasi pada industri strategis sekaligus pasar bebas.

Konsekuensi bagi rakyat Indonesia ketika tiga sendi politik pembangunan (pembangunan infrastruktur, revitalisasi pengusaha mikro-kecil-menengah dan pasar tradisional, serta neo-institusionalisasi) dijalankan dapat berdampak sebagai berikut. *Pertama*, politik pembangunan infrastruktur untuk pembuatan jalan tol di Pulau Jawa dan trans di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua akan mengancam kepentingan hidup rakyat pekerja. Kendati pembangunan jalan, terlebih di daerah seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, acap kali dianggap berguna bagi rakyat pekerja, harap diwaspadai bahwa pembangunan jalan tersebut hanyalah melingkari pusat industri yang memudahkan jalur transportasi dari dan ke pelabuhan. Pembangunan jalan ini bukan untuk kepentingan rakyat pekerja, melainkan untuk kepentingan industrialisasi pertambangan, perkebunan, dan manufaktur.

Berdasarkan *road map* Kadin, pembangunan jalan tol di Pulau Jawa telah direncanakan sepanjang 1.700 kilometer, yang membutuhkan tanah seluas 6.734 hektare. Namun sejak tahun 1978 hingga 2009 hanya dapat terbangun jalan tol sepanjang 690 kilometer (639 hektare). Faktor penghambat jalan tol ini dikambinghitamkan pada mekanisme pengadaan tanah karena rumitnya melaksanakan UU Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya. Undang-undang tersebut menyatakan penetapan ganti rugi berdasarkan musyawarah antara rakyat pemilik tanah dan pihak pengusaha atas nama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah dipandang tidak tegas dalam mengendalikan harga tanah dan risiko waktu untuk negosiasi harga dengan rakyat petani. Karena itu, para pengusaha pembangunan infrastruktur menuntut pemerintah: (1) menerbitkan Perpu tentang Pengadaan Tanah bagi

Kepentingan Umum dan melakukan perubahan UU Nomor 20 Tahun 1961 dengan menyatakan: “Untuk kepentingan umum dan demi hukum, hak tanah dapat dicabut secara otomatis”, di mana Badan Pertanahan Nasional akan bertindak sebagai penanggung jawab pembebasan tanah yang dapat menggunakan jasa pihak ketiga; (2) pemerintah harus memberikan dukungan agar investasi infrastruktur yang tidak layak menjadi layak dan dimungkinkan adanya insentif fiskal dari pemerintah dengan syarat tertentu.

Selain revisi regulasi tentang tanah, untuk industri pertambangan, pertanian, perikanan, dan perkebunan juga dilakukan revisi UU Kelautan yang mengesahkan privatisasi laut untuk industrialisasi perikanan. Laut, serupa tanah, dikapling oleh pemilik modal untuk eksplorasi perikanan di perairan Indonesia yang kaya. Sudah barang tentu nelayan miskin tanpa perahu tidak bisa melaut, karena setiap mil telah menjadi milik pengusaha. Mereka pun hidup dalam masa paceklik yang tak berkesudahan.

Kedua, saat ini buruh-buruh pabrik di Tangerang, Jakarta, Bandung, Indramayu, Cirebon, Semarang, Surabaya, Samarinda, Makassar, Maros, dan Medan telah mengalami pemutusan hubungan kerja (tanpa pesangon) atas dalih perusahaan pailit. Contohnya, PT Uni Enlarge Industry Indonesia di Semarang memecat 700 buruh perempuan atas nama pailit – yang dinyatakan oleh Pengadilan Niaga, Jakarta Pusat. Anehnya, pihak kreditor (China Trust) yang mengajukan jadwal pelelangan. Pengajuan jadwal pelelangan tersebut seharusnya dilakukan oleh kurator. Hal yang sama juga dilakukan PT Istana Magnoliatama, Kapuk, Jakarta Utara, yang dinyatakan pailit dan memecat 400-an buruh perempuan. Selain dalih pailit, PHK juga dilakukan dengan cara merumahkan buruh tetap atau mengubah status buruh menjadi outsourcing. Hal ini dapat disebut sebagai era dekapitalisasi manufaktur yang menunjukkan adanya krisis di dalam kapitalisme.

Anehnya, upaya meningkatkan kesejahteraan buruh tidak menjadi perhatian dalam rencana strategis *National Summit*, kecuali hanya disebutkan adanya pengaturan upah minimum regional (UMR) sektoral. Padahal, ada yang harus diwaspadai, yakni tentang penataan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang berhubungan dengan pembukaan industri baru dan infrastruktur. Dalam perburuhan akan terjadi fleksibilitas yang sangat masif. Hubungan kerja menjadi informal dalam pola *outsourcing*. Keadaan ini tentu semakin menjauhkan harapan akan kesejahteraan buruh. Perlindungan hukum serta jaminan sosial, kesehatan, dan pendidikan untuk anak buruh tidak ada. Saat ini status buruh yang bekerja tidak formal semacam itu, menurut data BPS, mencapai 70%. Hal ini masih diperparah oleh uji kompetensi pekerja, yakni diberlakukannya standarisasi kualitas buruh melalui sertifikat. Ini artinya makin sulit menjadi buruh dan ketika menjadi buruh pun tenaganya dapat dieksploitasi secara bebas serta tidak bertanggung jawab.

Kalaulah ada regulasi pemerintah terhadap perburuhan, ternyata hanyalah untuk mencetak peraturan daerah, penerapan KEK, dan sistem ketenagakerjaan yang meliputi upah, *outsourcing*, dan bebas pemakelaran buruh. Kawasan industri yang buruhnya belum ada kesadaran politik dan jauh dari pusat birokrasi sering direlokasi dengan atau tanpa PHK untuk pembangunan infrastruktur. Contohnya di Sumedang, Subang, Cirebon, Jawa Tengah, dan daerah lain.

Ketiga, saat ini meluasnya pengusuran masyarakat kampung kota demi penataan kota secara kapitalis, di mana setiap jengkal tanah untuk komoditas, telah merambah ke kota/kabupaten di seluruh Indonesia. Sekaligus dengan adanya kebutuhan tanah untuk KEK dan pembangunan infrastruktur, pengusuran pun terjadi secara massal di pedesaan. Pembangunan kota kapitalis

dimaksudkan sebagai sarana pertumbuhan ekonomi berbasis belanja. Lalu demi kepentingan ini, rezim SBY merevitalisasi usaha mikro-kecil-menengah dan pasar tradisional.

Keempat, kita telah dan akan semakin menyaksikan rezim SBY mencetak lembaga-lembaga baru sebagai penjamin dan pengawas proses neoliberalisasi di Indonesia yang dewasa ini digenjut untuk pemulihan krisis ekonomi global.

Pelaksanaan Free Trade Agreement Asean-China menjadi salah satu perbincangan yang menarik akhir-akhir ini. Globalisasi perdagangan bebas merupakan modus operandi yang banyak dipakai untuk mempercepat ekspansi rezim neoliberal. Mulanya World Trade Organization yang mengatur perdagangan bebas dunia. Kemudian diciptakan Free Trade Agreement yang cakupan peraturannya lebih menyeluruh dalam mengatur hubungan perdagangan regional ketimbang WTO. Indonesia telah terikat WTO sejak 1994, kemudian diatur oleh FTA (melalui AFTA 2002). FTA Indonesia telah menjalin dengan China-Asean FTA (CAFTA) sejak 2004, Jepang-Indonesia EPA pada 2007, dengan New Zealand-Australia (NZFTA), dengan Uni Eropa, juga dengan Amerika Serikat.

Dengan FTA, Rezim SBY membuka pintu lebar bagi invasi ekonomi kapitalis. Dalam situasi krisis ekonomi global ini, FTA seperti konstitusi dunia yang menentukan kedaulatan ekonomi sebuah negara. Sebagai negara pasar bebas, rakyat pun dimobilisasi ke dalamnya sebagai “kuli-kuli pasar bebas” yang dibuat saling bersaing dengan sesamanya dalam sistem kerja *outsourcing*, ekspor tenaga kerja domestik, yang semuanya tanpa jaminan keselamatan dan kesejahteraan. Petani dan nelayan dibiarkan bersaing dengan pengusaha yang menguasai tanah hingga lautnya dengan teknologi dan modal besar, tanpa perlindungan. Layaknya dalam persaingan yang tidak seimbang, maka posisi petani dan

nelayan yang diusir dari tanah dan lautnya serta dibuat terasing sebagai buruh adalah yang mengalami kehancuran fatal selama pemerintahan rezim SBY.

Dari pelaksanaan FTA dapat dipastikan petani, nelayan, dan buruh serta kaum perempuan dari ketiga sektor tersebut akan hancur fatal. Kaum perempuan mempunyai beban masalah yang bertambah, karena diperlakukan sebagai tenaga kerja (alat produksi kapitalis) sekaligus konsumen dalam pasar bebas. Runyamnya, saat pemerintahan SBY menyusun rencana strategis yang dinamakan *National Summit*, malahan berisi tentang proyek yang tetap menguntungkan pengusaha besar, yakni pembangunan infrastruktur untuk menunjang industri strategis, proyek peningkatan pengusaha dalam negeri agar mampu bersaing dengan modal bebas, dan pembenahan birokrasi sipil dan militer yang mendukung pasar bebas agar berjalan efektif. Tidak ada *political will* yang kuat untuk menyejahterakan dan melindungi rakyatnya dari gurita pasar bebas.

Ketiga rencana strategis yang diprioritaskan rezim SBY selama masa pemerintahannya ini benar-benar hanya menjadikan Indonesia sebagai polisi pasar bebas yang berjaga pada rute produksi, distribusi, hingga reproduksi sosial –yang dibebankan utama kepada kaum perempuan, agar tidak ada yang luput dari hukum pasar bebas FTA. FTA akan semakin meningkatkan impor berbagai produk industri dan pertanian pada tingkat tarif bea masuk yang sangat rendah, bahkan dapat mencapai nol persen. Saat ini saja Indonesia telah mengimpor hampir seluruh produk pertanian, beras, kedelai, produk peternakan seperti 30 % kebutuhan daging nasional, sebanyak 70 % dari total konsumsi susu, bahkan jeroan. Kecenderungan pada impor yang terus membesar semakin menyebabkan sektor pertanian dan industri dalam negeri terpuruk. Adapun subsidi telah dicabut atas desakan kesepakatan-

kesepakatan utang yang dibangun dengan lembaga pemberi utang, dalam hal ini *International Monetary Fund*, World Bank, dan Asian Development Bank. Bahan bakar minyak (BBM), listrik, air minum, transportasi, dan telekomunikasi telah masuk ke dalam pasar bebas dan harganya dijual pada tingkat harga pasar. Kaum perempuan yang bertanggung jawab atas reproduksi sosial memikul beban pembiayaan untuk kebutuhan dasar rumah tangga yang justru ditujukan untuk menjaga keajekan tenaga kerja di pasar bebas. Perusahaan-persusahaan publik seperti Pertamina, Perusahaan Air Minum, perusahaan transportasi, dan perusahaan telekomunikasi telah menjadi perusahaan swasta dan dioperasikan dalam rangka mencari keuntungan. Kaum buruh, dari BUMN hingga jasa dan manufaktur, dilucuti hak politiknya melalui hubungan kerja dalam hukum pasar bebas yang disebut *outsourcing*.

2. Membangun Gerakan Perlawanan Alternatif

Berdasarkan uraian di atas, sangatlah jelas kehancuran bangsa ini sudah di depan mata. Sementara kekuasaan sudah benar-benar terkooptasi oleh kepentingan neoliberal. Sementara kalangan gerakan demokratik masih terpecah-pecah sibuk dalam mengurus isu atau kasusnya sendiri-sendiri. Namun sedari awal pelantikan SBY - Boediono, sikap oposisi mulai dideklarasikan. Hal ini sebagai tindakan kualitatif atas tindakan sebelumnya, yakni seruan golput terorganisasi dalam pemilu yang lalu. Di dalam negara demokrasi, oposisi diterima sebagai kontrol keseimbangan pengambilan keputusan. Namun, di Indonesia, oposisi dipandang sebagai melawan rezim yang berkuasa, yang haram dibentuk. Jelas pandangan tersebut sama sekali tidak benar. Oposisi diperlukan untuk membangun demokrasi dan mencegah kebangkitan rezim yang otoriter.

Kemudian muncul kegelisahan berbagai pemimpin lembaga dan organisasi. Awalnya secara informal, kemudian

mulai didorong dalam forum terbuka namun terbatas. Kemudian beberapa organisasi politik, organisasi rakyat, NGO dari berbagai isu dan sektoral, terlibat dalam diskusi tersebut. Peserta forum ini cukup merata dalam skala perjuangan kelas ataupun sektoral. Yakni keterwakilan pada fokus perjuangan seperti buruh, tani, nelayan. Juga dari perspektif perjuangan lingkungan, perempuan, pendidikan, HAM, dan demokrasi. Lembaga atau organisasi yang terlibat antara lain YAPPIKA, Walhi, Kontras, ICW, PRP, SHI, KPA, FMN, KASBI, SMI, PRD, FPBJ, dan PRM.

Gerakan ini dimulai dari Jakarta. Selain sebagai daerah yang dekat dengan pusat kekuasaan, juga tempat bernaung organisasi-organisasi nasional yang diharapkan berpengaruh pada perluasan dari gerakan oposisi sampai ke daerah-daerah, di mana organisasi nasional memiliki cabang-cabang atau anggota yang tersebar hampir di seluruh Indonesia. Peranan ini dipertimbangkan, tanpa mengabaikan organisasi lokal seputaran Jabotabek tetap diikutsertakan.

Diskusi pertama membahas pemahaman dan tindakan oposisi dari pengalaman berbagai organisasi yang terlibat. Dalam pemaparan tiap-tiap organisasi juga memasukkan tinjauan situasi ekonomi, politik nasional, sampai pada pemetaan dari realitas pertarungan politik elektoral sampai saat ini. Tak luput dari sorotan tiap-tiap organ adalah tentang korupsi, kasus "Cicak vs Buaya", dan skandal Bank Century. Termasuk ruang perlawanan baru di dunia maya. Selain itu perwakilan organisasi menyampaikan penilaian atau suatu kesimpulan organisasi masing-masing. Pada akhir babak diskusi pertama didapat kesimpulan sementara bahwa terjadi kekosongan oposisi dalam tubuh pemerintahan Indonesia sampai hari ini. Tidak adanya kekuatan politik alternatif akhirnya memang menggerus sikap perlawanan gerakan-gerakan rakyat. Mau tidak mau, akhirnya gerakan perlawanan rakyat terbawa arus dalam kontelasi politik yang dominan. Tidak adanya oposisi

yang dibangun oleh partai-partai politik di parlemen semakin menambah bobrok peta politik di Indonesia. Sikap oposisi memang seharusnya dimunculkan oleh gerakan rakyat sendiri.

Kemudian didapat rekomendasi yang merupakan hasil kesimpulan pertemuan. Pertama, adalah kebutuhan materi oposisi. Kedua, pentingnya merumuskan wadah dari gerakan oposisi. Untuk kebutuhan materi disepakati dua hal untuk lebih dimajukan secara gagasan atau konseptual tentang oposisi. Perlu bacaan atas situasi nasional, selain perlu membuat bersama materi manifesto gerakan oposisi dalam waktu yang mendesak. Bahkan, disadari bersama adanya kebutuhan akan bacaan tentang perkembangan masyarakat Indonesia secara menyeluruh, tentu menjadi program jangka panjang. Kemudian sempat dibentuk tim materi dari perwakilan organisasi sebagai tim kerja yang akan menyusun materi tersebut. Pendiskusian wadah atau alat organisasinya akan dibahas pada pertemuan berikutnya, yang membutuhkan pemetaan awal dari gerakan rakyat yang mempunyai potensi untuk dapat bergabung dalam wadah bersama gerakan oposisi.

Secara bertahap pertemuan terus dilakukan, selain tetap menjalankan agenda masing-masing. Terjadi pula diskusi informal sampai pada menagajak keikutsertaan dengan cara mendekati para pemimpin lembaga atau organisasi yang signifikan. Momentum 100 hari pemerintahan SBY - Boediono merupakan waktu yang tepat bagi gerakan oposisi, saat kekecewaan mayoritas rakyat mulai menggeliat. Dan sudah ada kepastian bagi organisasi gerakan untuk merespons dengan melakukan aksi massa sebagai pernyataan sikap organisasi yang progresif.

Sampailah pada pembahasan untuk merespons secara bersama-sama momentum 100 hari pemerintahan SBY. Mulai dengan pembagian tugas dan membentuk kepanitiaan. Organisasi nasional mulai mengkonsolidasikan cabang-cabangnya di

daerah untuk juga melakukan konsolidasi multisektor dan isu. Kemajuan yang revolusioner dalam kehendak massa melawan rezim SBY, sebagai kaki tangan rezim neoliberal, saat ini dipimpin gerakan buruh, tani, dan nelayan (meski yang terakhir masih membutuhkan waktu untuk kuat dan membesar). Barisan pelopor perlawanan telah berubah, yaitu berada dalam kepemimpinan gerakan buruh dan tani. PRP kemudian memelopori terbentuknya Front Oposisi Rakyat Indonesia (FOR Indonesia) sebagai front kekuatan alternatif yang dipimpin gerakan buruh dan tani. Tentu tidak semua organisasi sepakat masuk dalam barisan FOR Indonesia, namun mayoritas tetap sepakat dan akan melanjutkan pembangunan Front Oposisi Rakyat Indonesia. Krisis ekonomi-politik yang belum pernah pulih sejak 1997 telah menggerakkan aksi yang sejati dari massa rakyat, yakni buruh, tani, dan nelayan sebagai kelas sosial yang mengalami kehancuran total dalam krisis ekonomi-politik untuk bersatu dalam wadah politik. Mahasiswa, kaum intelektual, dan profesional sudah selayaknya turut serta di belakang barisan pelopor ini.

Front Oposisi Rakyat Indonesia lahir sebagai kehendak tak terbendung dari massa aksi buruh, tani, dan nelayan yang siap berlawanan terhadap mafia neoliberalisme. Deklarasi FOR Indonesia Nasional dilakukan secara sederhana di Jakarta pada 21 Januari 2010. Kemudian dilanjutkan deklarasi FOR Indonesia Jakarta, Palu, dan beberapa beberapa kabupaten di Sulteng pada 22 Januari 2010. Disusul Makassar, Luwu, Samarinda, Bandung, Bengkulu, dan daerah-daerah lain. Hingga saat ini FOR Indonesia, sebagai kekuatan politik alternatif dari gerakan rakyat, telah terbangun di beberapa daerah. Secara serentak FOR Indonesia melaksanakan aksi berkaitan dengan momentum Lima Tahun Seratus Hari Rezim SBY. Pada 28 Januari 2010 dilaksanakan aksi FOR Indonesia di Medan, Bengkulu, Bandung, Jabodetabek, Solo, Surabaya, Makassar, Palu, dan Samarinda, dan kota-kota lain.

Kepanikan terhadap perlawanan rakyat pun muncul dari pemerintah. Intelijen negara sempat melarang media elektronik dan cetak meliput aksi-aksi rakyat ini. Sebaliknya, yang diliput adalah pernyataan perang di kalangan elite borjuasi untuk bernegosiasi kekuasaan melalui Panitia Khusus Bank Century di DPR. Hal ini menunjukkan rezim SBY takut terhadap bangkitnya gerakan rakyat bermassa buruh, tani, dan nelayan.

Perlawanan yang dilakukan FOR Indonesia tidak akan berhenti pada momentum Lima Tahun Seratus Hari Rezim SBY. Perlawanan akan berlanjut hingga muncul persatuan gerakan rakyat untuk melawan neoliberalisme. Para pendukung atau yang menyatakan diri bagian dari gerakan rakyat, gerakan kelas pekerja, gerakan sosial, sudah selayaknya memperkuat dan memperluas gerakan FOR Indonesia sebagai wadah perjuangan bersama. Seluruh sektor dan isu yang meliputi perempuan, hak asasi manusia, lingkungan, dan sumber daya alam, antikorupsi, pemantau anggaran dan regulasi (reformasi kebijakan), kelompok jurnalis, mahasiswa, profesional, organisasi masyarakat sipil pelayan amal, sudah seharusnya melebur dalam FOR Indonesia yang dipimpin buruh, tani, dan nelayan.

Sudah barang tentu, selayaknya FOR Indonesia tidak hanya bergerak selama aksi 28 Januari 2010, tetapi merupakan wadah perjuangan sampai rakyat dapat mengontrol "Lima Agenda Perjuangan" yang dirumuskan FOR Indonesia, meliputi (1) industrialisasi nasional; (2) reforma agraria sejati; (3) keadilan ekologi; (4) penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dan kesetaraan gender, termasuk tangkap dan adili pelaku kejahatan kemanusiaan di Indonesia; (5) partisipasi rakyat secara langsung dalam demokrasi politik, yakni rakyat yang menentukan bangunan demokrasinya, bukan hanya dimobilisasi dalam pemilu langsung prosedural selama ini.

3. Membangun Front Oposisi Rakyat Indonesia yang Sejati

FOR Indonesia adalah alat perjuangan politik rakyat yang tidak sekadar berjangkauan pendek untuk kepentingan pribadi-pribadi yang ngotot menjadi elite politisi. FOR Indonesia dapat dipastikan sebagai kekuatan baru, karena merupakan penggabungan multisektor dan isu, serta penggabungan format-format gerakan sosial, gerakan masyarakat sipil, gerakan massa yang dipimpin sendiri oleh buruh, tani, dan nelayan. Dan akan terus berlanjut dalam melawan kebijakan.

Front oposisi sebagai kekuatan alternatif tidak hanya muncul untuk merespons momen dan kemudian bubar jalan seusai menjalankan aksi. Front oposisi adalah blok politik yang dilandasi kehendak dan kebutuhan banyak unsur perlawanan rakyat, terutama di tingkat lokal yang selama ini terus berjuang tapi belum mampu mengkristalkan perlawanan terhadap rezim dan sistem yang berskala nasional. FOR Indonesia adalah jawaban bagi rintisan perjuangan dari berbagai lokal/sector/komunitas dan *platform* melawan neoliberalisme dan mencari sistem ekonomi-politik alternatif yang adil dan demokratis bagi rakyatlah yang akan menentukan terus berlanjutnya perjuangan front oposisi ini. Di tengah dominasi hegemoni dan dilusi (kebingungan) politik kepartaian dan kartel elite oligarki, maka hanya ada satu kesimpulan tentang perlunya segera mengisi kekosongan kepemimpinan politik bagi rakyat pekerja yang mampu membangun persatuan dan alat politik bersama. Aksi massa FOR Indonesia secara nasional serta pertemuan-pertemuan yang mengawali terbentuknya front ini menyepakati sebagai program bersama, bukan sekadar komite aksi. Beberapa agenda yang belum terselesaikan seperti penyusunan bersama manifesto dan *platform* perjuangan bersama. Sekaligus perencanaan konferensi nasional dari berbagai front di beberapa daerah yang sudah terbentuk, juga

mengajak organisasi dan aliansi ataupun front lain yang sudah terbangun di berbagai daerah.

Harapan besar FOR Indonesia sebagai kekuatan politik alternatif, tidak hanya menjawab kekosongan organisasi politik dari rakyat, tetapi sekaligus mampu menjawab berbagai problem rakyat dan negara Indonesia, seperti masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, HAM, serta masalah-masalah krusial lain. Seperti diketahui bersama, krisis multidimensi yang disebabkan kegagalan rezim borjuasi sejak Orde Baru hingga hari ini jawabnya adalah hanya ketika kaum buruh dan tani yang bersatu dalam satu organasasi politik. Yakni proses yang konsisten dari Front Oposisi Rakyat Indonesia dengan terus berbenah diri, membesar, dan menguat dan akhirnya menyiapkan diri menjadi satu kekuatan partai politik. Kekuatan itulah yang akan mampu mengembalikan kedaulatan rakyat kepada rakyat mayoritas yang dipimpin kaum buruh, tani, dan nelayan dan didukung elemen rakyat lainnya, sehingga kesejahteraan sejati bagi seluruh rakyat Indonesia akan benar-benar terwujud.

Tentu tugas ini tidak ringan. Sudah pasti membutuhkan kerja sama, bahu-membahu dalam hal tenaga, pemikiran, dan sumber daya lainnya. Maka perlu ajakan untuk bergabung dari berbagai kalangan gerakan dan rakyat pekerja yang saat ini berada dalam ketertindasan dan penghisapan. Tidak perlu lagi ada keraguan untuk bergabung. Slogan "Ganti Rezim Ganti Sistem" akan menjawab problematika bangsa ini. Ganti rezim borjuasi antek neoliberal dengan pemerintahan rakyat pekerja. Ganti sistem ekonomi kapitalisme neoliberal yang sudah usang, bahkan di negara asalnya telah gagal menyejahterakan rakyat. Harus kita temukan sistem yang memang berpihak kepada kepentingan rakyat pekerja, yakni sosialisme. Sosialisme yang sesungguhnya adalah bagian melekat dari perjuangan kemerdekaan bangsa dan lahirnya republik bernama Indonesia.

Gerakan Konservasi di Gunung Lemongan

*Simpul Tapal Kuda Jawa Timur - FBB Prakarsa Rakyat*¹

Gunung Lemongan (1671 dpl) terletak di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, merupakan pilar ekosistem yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat di sekitarnya, terutama terkait dengan kelestarian sumber mata air bagi sekitar 9 ranu² di sekitar gunung tersebut. Ranu-ranu tersebut adalah Ranu Lemongan, Ranu Bedali, Ranu Pakis, Ranu Lading, Ranu Kembar, Ranu Glébég, Ranu Agung, dan Ranu Segaran. Ranu-ranu tersebut belum termasuk Ranu Wurung³ dan mata air

-
- 1 Tulisan ini dipersiapkan oleh A'ak Abdullah Al-Kudus, salah satu relawan di Laskar Hijau.
 - 2 Ranu adalah Danau Vulkanik yang sumber mata airnya bukan dari bawah tanah melainkan dari atas/dari sumber mata air yang berasal dari tangkapan air hujan.
 - 3 Ranu Wurung adalah istilah untuk Ranu yang tidak digenangi air. Kalaupun ada sangat kecil debitnya.

di sekitar Gunung Lemongan yang jumlahnya tak terhitung secara pasti.

Ranu-ranu tersebut selama ini menjadi tumpuan hajat hidup orang banyak, terutama untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan irigasi bagi masyarakat yang mayoritas keturunan Madura, khususnya di 3 kecamatan di Kabupaten Lumajang dan 2 kecamatan di Kabupaten Probolinggo, yakni Kecamatan Ranuyoso, Klakah, Randuagung, Tiris, dan Krucil.

Sebagai contoh, Ranu Lemongan di Desa Tegalandu sampai saat ini mampu mengairi sekitar 620 hektare areal persawahan di wilayah Kecamatan Klakah. Sumber mata air di Ranu Bedali mampu mengalirkan berkubik-kubik air minum melalui pipa-pipa milik PDAM ke masyarakat Kecamatan Ranuyoso, Kecamatan Klakah, hingga Kecamatan Kedungjajang. Di Ranu Pakis mengapung ratusan petak tambak milik masyarakat untuk pembudidayaan ikan nila dengan nilai omzet tak kurang dari Rp 2 miliar per tahun. Di Ranu Lading, para nelayan menebarkan jala dari atas rakit untuk menangkap ikan sebagai nafkah bagi keluarga mereka. Di sudut lainnya anak-anak berlompatan riang menikmati mandi yang segar bersama teman-temannya, sementara para perempuan mencuci pakaian di tepian aliran sungainya. Singkat kata, kelestarian ekosistem di Gunung Lemongan sangat vital bagi kelangsungan hidup masyarakat di sekitarnya.

Namun sayang, saat ini kondisi alam di Gunung Lemongan sangat memprihatinkan. Sekitar 6.000 hektare areal *Green Belt* yang seharusnya dalam kondisi hijau, kini gundul. Bukit dan lerengnya meranggas, hanya ditumbuhi ilalang serta tanaman perdu. Kondisi ini terjadi sejak 1998-2002 karena *illegal logging*. Upaya menggoyang kepemimpinan KH Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia pada saat itu oleh sekelompok elite politik berdampak pula terhadap kerusakan hutan secara

besar-besaran di Jawa Timur: mulai sepanjang Banyuwangi hingga Pacitan.

Statemen Gus Dur "Hutan untuk Rakyat" telah dipelintir sedemikian rupa oleh rival politiknya untuk menimbulkan situasi chaos di masyarakat. Terbukti cara tersebut berhasil menggerakkan sekelompok masyarakat (yang juga ditunggangi aparat pemerintah dan penegak hukum, juga pengusaha) untuk menebang hutan secara membabi buta dengan dalih perbuatan mereka telah sesuai dengan perintah Gus Dur selaku presiden saat itu. *Alas we'e negoro, sing butuh kayu neghoro* (hutan milik negara, yang butuh kayu tebanglah). Serangkai kalimat tersebut bagai mantra yang mampu menghipnotis sebagian masyarakat untuk berangkat ke hutan memanggul kapak dan gergaji menebangi setiap pohon yang mereka temui tanpa pandang bulu. Habislah sebagian besar hutan di Jawa Timur, termasuk hutan di Gunung Lemongan. Hilanglah sudah kejayaan hutan rimba Gunung Lemongan yang menjadi penyangga ekosistem bagi 9 ranu tersebut bersamaan dengan diangkutnya ribuan kubik kayu beragam jenis dari hutan ini ke pabrik-pabrik milik si kaya. Punahlah pula burung-burung dan satwa liar penjaga rimba Gunung Lemongan yang anggun akibat kerakusan manusia yang tak bertanggung jawab tersebut. Tak terhitung kerugian negara akibat insiden ini. Dan anehnya, tak ada satu orang pun yang menjadi tersangka pelaku dalam perusakan hutan yang – bisa jadi - terbesar dalam sejarah kehutanan Indonesia. Yang tersisa hanyalah tonggak-tonggak kayu bergetah. Hanyalah reruntuhan daun dan ranting-ranting patah yang berserak. Hanya kerusakan dan bencana. Dan satu hal yang sudah pasti: ujung-ujungnya rakyat kecil juga yang harus menanggung seluruh akibat dari perusakan hutan tersebut.

Fakta mengenaskan dari insiden brutal tersebut saat ini adalah mulai banyak mata air yang mati di sekitar Gunung

Lemongan dan setiap kali turun hujan selalu menyisakan titik longsor di tebing dan lereng gunung bak guratan luka di wajah si rupawan. Di Kecamatan Klakah mulai banyak petani yang gagal panen karena sawahnya kekurangan air akibat suplai irigasi dari Ranu Lemongan berkurang drastis. Debit air di Ranu Lemongan turun hingga 4 meter. Dari 30 titik mata air, sekarang hanya tersisa 4 mata air yang masih mengalirkan air. Dari desa sebelah ada kabar 2 lelaki tewas mengenaskan karena *carok*⁴ untuk memperebutkan air irigasi bagi sawahnya. Tak terhitung lelaki dan perempuan meninggalkan sawah mereka untuk berangkat menjadi buruh migran ke Malaysia dan Arab Saudi, karena sawah mereka sudah tak menjanjikan apa-apa lagi.

Di jalan-jalan sekarang mulai marak becak yang mengangkut puluhan jerigen berisi air bersih untuk dijual kepada warga, karena pipa PDAM sekarang tak lagi lancar mengalirkan air minum dari Ranu Bedali dan Sumber Wringin akibat kian kecilnya debit air. Di Ranu Pakis banyak tambak ikan nila yang gulung tikar karena hasil panen kurang bagus akibat sirkulasi air di Ranu Pakis sangat buruk. Kandungan oksigen di dalam air berkurang dan mengakibatkan banyak ikan mati. Di Ranu Lading tak terdengar lagi *kejungan*⁵ nelayan yang lantang namun merdu mengiring tebaran jala dan kayuhan rakit bambu. Mereka telah lama menggantungkan jala di dinding dapur karena sudah jarang sekali mendapatkan ikan. Kalaupun mendapat ikan, cenderung tidak sehat, daging tipis, kepala besar, dan ditampik calon pembeli di pasar. Anak-anak tak lagi bisa berenang bebas ke tengah ranu karena mulai banyak tumbuhan sejenis ganggang

4 Carok adalah cara duel ala masyarakat Madura dengan menggunakan Clurit sebagai senjatanya

5 Nyanyian khas masyarakat Madura yang syairnya improvisasi dari keadaan di sekitar pada saat itu

yang mengganggu gerak renang mereka, selain karena airnya pun mulai keruh dan menyebabkan gatal-gatal.

Hijau rimbun hutan belantara di Gunung Lemongan beserta kicau burung dan suara satwa liarnya, bening air di ranu dan sungai-sungainya beserta kecipak ikan dan udang, hilang dalam waktu sekejap bersamaan dengan hilangnya tawa riang anak-anak di tepi Ranu Lemongan. Masyarakat sedih atas kondisi ini. Tak sedikit pula yang menyesal akibat keterlibatan mereka menebang pohon hanya demi upah sedikit uang. Kini tak ada yang tahu siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas kondisi ini. Tak ada pula dari pihak berwenang yang mau mengatasi kondisi ini. Gunung Lemongan terlantar mengenaskan bagai seonggok batu.

Lahirnya Gerakan Konservasi Laskar Hijau

Terpuruknya ekosistem di Gunung Lemongan menggugah sekelompok masyarakat untuk melakukan gerakan konservasi guna mengatasi kondisi tersebut. Dimulai tahun 2005 kelompok tanpa nama ini melakukan penghijauan di sekitar Ranu Lemongan di areal seluas 10 hektare. Mereka menanami tepian ranu yang mulai gundul dengan beragam jenis pohon buah dan beragam jenis pohon penahan air seperti gayam, johar, dan bambu.

Karena tepian Ranu Lemongan sudah dianggap penuh pepohonan, sejak akhir tahun 2008 gerakan penghijauan mulai diarahkan ke Gunung Lemongan, khususnya di areal *Green Belt* seluas sekitar 6.000 hektare. Namun, karena demikian luas areal yang perlu dihijaukan kembali, maka gerakan penghijauan tidak bisa dilakukan secara insidental seperti di Ranu Lemongan selama ini. Gerakan penghijauan di Gunung Lemongan harus dilakukan secara intens dan terencana. Untuk menghadapi tantangan tersebut, pada 28 Desember 2008 dibentuk tim kerja pelaksana

gerakan penghijauan tersebut dengan nama Laskar Hijau. Program utama organisasi ini adalah melakukan penghijauan di Gunung Lemongan setiap hari Minggu.

Organisasi ini bersifat nirlaba dan berjiwa kerelawanan serta menjunjung tinggi semangat kemandirian, gotong-royong, keterbukaan, dan kesetaraan. Visi organisasi ini mengembalikan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, khususnya di Gunung Lemongan, karena mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan, dalam bentuk laku kerja penghijauan dengan konsep hutan setaman. Organisasi ini tidak berafiliasi dengan organisasi apa pun, apalagi dengan partai politik seperti Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Bulan Bintang yang juga memiliki unit kerja bernama Laskar Hijau. Kesamaan nama organisasi ini semata kebetulan.

Sampai titik ini, organisasi ini belum memiliki struktur pengurus, apalagi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Organisasi ini lebih mengedepankan bangunan kultur terlebih dahulu sebelum membangun struktur. Semua yang bergabung dalam organisasi ini berstatus sebagai relawan. Jika diperlukan sistem koordinasi untuk sebuah kegiatan, akan dibentuk koordinator yang bersifat *ad-hoc* yang masa kerjanya akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya kegiatan tersebut. Para relawan organisasi ini sebagian besar warga sekitar hutan yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan pekebun, bukan orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi dan bukan dari kalangan dengan status sosial mapan.

Penghijauan yang dilakukan Laskar Hijau setiap hari Minggu tersebut terfokus pada areal *Green Belt* Gunung Lemongan. Penghijauan ini berkonsep "Hutan Setaman", artinya dalam tiap jengkal tanah ditanami beragam jenis tanaman. Jenis tanaman yang ditanam sebagian besar beragam tanaman buah, dengan

maksud agar masyarakat yang selama ini bermata pencaharian di hutan (seperti pencari kayu, pembuat arang, pemburu satwa liar, dan pencari belerang) tidak perlu lagi merusak hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi cukup dengan memetik buah-buahan yang tersedia dan berlimpah di hutan yang dibangun Laskar Hijau dengan syarat tidak boleh menebang pohonnya. Jenis pohon buah ditanam adalah durian, mangga, rambutan, jambu, manicu, bisbul, klengkeng, sirsak, sawo, manggis, sukun, nangka, alpukat, langsep, duku, dan beberapa jenis lainnya.

Selain tanaman pohon buah, juga ditanami beragam jenis tanaman langka dan tanaman konservasi yang berfungsi efektif sebagai penangkap air, penahan erosi, penyerap karbondioksida serta produsen oksigen. Sebagai contoh tanaman bambu mampu memproduksi oksigen hingga 82%.

Adapun target penghijauan di Gunung Lemongan ini – dengan kondisi Laskar Hijau seperti sekarang - diharapkan mencapai 300 hektare per tahun. Artinya, untuk menuntaskan menanam serta merawat tanaman di areal 6.000 hektare hingga tanaman tersebut diyakini dapat hidup dan berkembang dengan baik, dibutuhkan waktu 15 tahun hingga 20 tahun. Sepanjang tahun itu para relawan mengikrarkan diri untuk fokus dan intens di Gunung Lemongan.

Untuk mempermudah pemantauan dan perawatan tanaman sehari-hari, Laskar Hijau mendirikan Posko Konservasi Gunung Lemongan di lereng sisi barat pada ketinggian 600 meter dpl. Di sekitar posko ini - di luar jadwal penghijauan - para relawan juga memanfaatkan sebagian lahan yang tidak produktif untuk ditanami tanaman pangan seperti jagung, singkong, ketela rambat, kacang tanah, dan sayur-mayur untuk mendukung kebutuhan logistik mereka. Posko ini sudah seperti rumah kedua bagi para relawan Laskar Hijau. Sebab, waktu mereka sehari-

hari lebih banyak dihabiskan di tempat ini. Bahkan, ada yang menginap di tempat ini dengan meninggalkan anak dan istri dan pulang ke rumah seminggu sekali. Di tempat ini pula direncanakan memelihara beberapa ekor kambing untuk memenuhi kebutuhan pupuk kandang. Juga akan dijadikan areal pembibitan tambahan jika memungkinkan untuk mendapatkan air dari sumur yang sekarang sedang dalam proses penggalian.

Bibit Pohon Dari Tong Sampah

Penghijauan untuk areal seluas 6.000 hektare tentu membutuhkan banyak sekali bibit pohon, bisa jutaan bibit pohon yang dibutuhkan. Dari mana Laskar Hijau yang notabene tidak didukung pendanaan dari siapa pun ini mampu menyediakannya? Jawaban yang pertama adalah dari tong sampah.

Pada hari-hari tertentu, para relawan Laskar Hijau mempunyai jadwal menyusuri setiap tempat sampah di pasar-pasar dan perkampungan untuk mengumpulkan biji-bijian buah yang banyak dan beragam jenis namun terabaikan fungsinya. Jika musim durian, mereka menyusuri tempat sampah para pedagang durian di wilayah Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, hingga Malang. Sedangkan biji mangga, rambutan, kelengkeng, salak, sawo, nangka, dan sirsak mudah didapat dari tempat sampah di perkampungan sekitar. Khusus biji buah alpukat, tempat sampah yang paling prospektif adalah milik para pedagang es campur. Banyak pula biji buah-buahan yang didapatkan dari pemberian warga yang menjadi pasien akupunktur Laskar Hijau atau dari warga yang peduli terhadap kegiatan mereka. Juga dari pemberian kawan serta relasi dari berbagai kalangan.

Bibit pohon yang dikembangbiakkan Laskar Hijau, selain bibit pohon buah-buahan khususnya buah lokal, dikembangkan

pula bibit tanaman penahan air, juga tanaman yang mulai langka dan aneka jenis bambu, khususnya bambu petung (*Dendrocalamus Asper*), jajang hitam (*Gigantochloa Atroviolacea Wijaya*), dan bambu andong besar (*Gigantochloa Pseudoarundinacae*).

Jawaban kedua soal sumber bibit pohon penghijauan ialah dari hasil kerja sama pembibitan dengan masyarakat. Salah satu kerja sama pembibitan yang pernah dilakukan Laskar Hijau adalah dengan siswa Sekolah Dasar Negeri Ranuyoso 03 di Lumajang dan SDN Tigasan Wetan 04 di Probolinggo. Model kerja sama pembibitan yang dibangun adalah Laskar Hijau menyumbangkan sejumlah *polly bag* ke sekolah-sekolah, sedangkan pihak sekolah mewajibkan siswa mengumpulkan biji buah-buahan di rumah dan selanjutnya melakukan pembibitan di sekolah pada jam pelajaran keterampilan dan jam kosong pelajaran. Pelajaran pembibitan ini selain untuk membantu Laskar Hijau menyediakan bibit pohon yang akan ditanam di Gunung Lemongan, juga untuk menumbuhkan rasa cinta lingkungan terhadap generasi muda. Hasilnya luar biasa! Tiap-tiap sekolah bisa menghasilkan 10.000 bibit pohon buah per tahun.

Bayangkan jika pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan mewajibkan setiap sekolah melakukan pembibitan seminggu sekali, tentu akan didapat jutaan bibit per tahun. Hal tersebut akan menghemat anggaran belanja daerah untuk pengadaan bibit pohon yang *platform* harganya selama ini sangat tinggi dan boros dana. Bisa dibayangkan, untuk setiap pengadaan bibit pohon selama ini harganya sekitar Rp 5.000 hingga Rp 10.000, maka berapa miliar rupiah dana APBD yang bisa dihemat oleh pemerintah daerah dengan model pembibitan tersebut?

Laskar Hijau memiliki lokasi pembibitan di pinggir aliran Sungai Ranu Lemongan seluas 2.500 meter². Lahan ini hasil sewa dari penduduk dengan harga sewa Rp 1.500.000 per

tahun. Di lahan ini juga disediakan 1 unit *Green House* ukuran 4x10 meter untuk kebutuhan pembibitan. Sebagian tanahnya juga dimanfaatkan sebagai kolam ikan sebagai upaya mulai membangun pendanaan mandiri.

Sosialisasi Melalui Akupunktur

Setiap gerakan sosial sangat membutuhkan dukungan masyarakat. Tanpa dukungan masyarakat, gerakan sosial akan gagal. Untuk mendapatkan dukungan masyarakat dibutuhkan strategi sosialisasi yang tepat dan jitu. Dalam melakukan sosialisasi gerakan konservasi di Gunung Lemongan ini Laskar Hijau menggunakan media pengobatan akupunktur sukarela di desa-desa sekitar Gunung Lemongan, khususnya di Desa Salak, Sumberwringin, Tegalrandu, Klakah, dan Desa Papringan. Yang menarik dari strategi ini adalah warga yang berobat tidak diminta membayar dengan uang, melainkan dengan biji-bijian atau bibit pohon di sekitar rumah mereka. Cara ini bagi masyarakat sangat tidak lazim sehingga bertanya mengapa minta dibayar biji-bijian. Para relawan pun memiliki peluang bagus untuk menjelaskan tentang gerakan konservasi yang sedang dilakukan di Gunung Lemongan dan pentingnya masyarakat untuk turut serta menjaga kelestarian ekosistem. Dari gerakan akupunktur, mulai banyak mantan pasien akupunktur yang sukarela mengumpulkan biji-bijian dan bibit pohon untuk disumbangkan, meski mereka tidak sedang berobat. Bukan seberapa banyak biji atau bibit yang mereka sumbangkan, yang lebih penting adalah lahirnya kesadaran masyarakat untuk membantu gerakan konservasi ini.

Akupunktur yang dikembangkan Laskar Hijau adalah akupunktur ala Indonesia penemuan Gunawan Ismail. Ilmu ini sudah dipraktikkan selama 40 tahun oleh Gunawan Ismail. Ahli kimia dan fisika ini menemukan ilmu itu saat menjadi pesakitan

di Pulau Buru. Di sana dia mempelajari ilmu pijat Jawa dan tusuk jarum. Akupunktur ala Indonesia ini merupakan hasil eksplorasi yang sangat panjang dan intens dari prinsip-prinsip pengobatan Timur dan kedokteran Barat. Gunawan Ismail sangat berharap temuannya ini dapat ditularkan kepada semua orang. Dia membayangkan jika di setiap lingkungan rukun tetangga memiliki seorang ahli tusuk jarum sederhana yang bisa mengobati penyakit ringan seperti batuk, flu, pilek, pusing, stres, sakit perut, atau kelelahan, tentu akan sangat menyenangkan.⁶ Sungguh cita-cita Gunawan Ismail sangat mulia, karena hal tersebut akan mewujudkan kedaulatan rakyat atas kesehatan. Oleh karena itu, Laskar Hijau bersedia turut menularkannya.

Laskar Hijau mengajarkan ilmu akupunktur ini kepada para relawannya agar masyarakat memiliki kemampuan menyembuhkan –minimal- diri sendiri dan anggota keluarganya. Oleh karena itu, siapa pun boleh belajar ilmu ini kepada Laskar Hijau, namun dengan dua syarat penting: tidak boleh mengkomersialkan pengobatan ini kepada siapa pun, namun relawan boleh menerima pemberian sukarela sekadar untuk mengganti pembelian jarum; serta jika ada orang yang mau belajar harus diajari tanpa memungut biaya.

Selain sosialisasi melalui akupunktur, Laskar Hijau juga melakukan kampanye tentang lingkungan melalui beberapa even yang sengaja diselenggarakan untuk itu, terutama even tahunan Maulid Hijau yang diselenggarakan setiap tahun pada minggu kedua bulan Mei di Ranu Lemongan selama tiga hari tiga malam. Diselenggarakan pula even-even lain seperti *Multicultural Green Camp* pada pertengahan Maret 2010, Umbul Donga Ijo Royo-

6 Sehat Tanpa Obat dengan Tusuk Jarum ala Indonesia, Oleh Gunawan Ismail, Terbitan PT. Grasindo, 2009

royo pada awal Mei 2010⁷, Peringatan Hari Pancasila 1 Juni, dan even-even kecil lainnya.

Respons Dan Tanggapan

Tentu setiap kejadian akan menuai tanggapan atau respons dari masyarakat, baik dari yang suka maupun yang tidak suka, baik respons yang positif maupun yang negatif. Berikut beberapa respons yang didapat Laskar Hijau selama melakukan gerakan konservasi di Gunung Lemongan.

Orang-orang Laskar Hijau - pada dasarnya - adalah sosok bersahaja yang terlalu mencintai alam. [Rida Fitria]⁸

Dengan adanya Laskar Hijau, Gunung Lemongan akan hijau kembali, dan Klakah akan menjadi kota buah, Probolinggo akan menjadi pelabuhan internasional, dan Sidoarjo akan menjadi ibu kota Asean. [Citra Sridono Sasmito, pinisepuh (tetua) Gunung Lemongan dan Guru Agung Padepokan Sonyoruri].

Para relawan Laskar Hijau yang menanami Gunung Lemongan dengan pohon-pohon ini, menurut saya pahalanya sama dengan naik haji. [Miari, petani Desa Papingan]

Laskar Hijau itu mengganggu Perhutani saja. Lihat saja, nanti poskonya saya bakar. ["H", dari Perhutani]

Laskar Hijau itu sama dengan LSM lainnya, paling-paling cuma untuk cari proyekan. [Agus, guru SMA].

Kegigihan Laskar Hijau melestarikan dan menyelamatkan

7 <http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/05/07/15430229/umbul.donga.ijo.royo.digelar.di.klakah>

8 <http://laskarhijau.ning.com/profiles/blogs/apakah-itu-substansinya>

lingkungan alam pegunungan ini tersirat saat mereka mengumpulkan bibit-bibit buah dari sampah-sampah di Pasar Ranuyoso, Alun-alun Kraksaan, Alun-alun Probolinggo, depan Pabrik Tekstil Grati, Pasuruan, Purwodadi, hingga Pasar Besar Malang. [harian Kompas, Jumat 14 Mei 2010]⁹

Melalui tindakan nyata yang dilakukan, Laskar Hijau berhasil menumbuhkan kesadaran masyarakat di sekitar Gunung Lemongan akan pentingnya upaya pelestarian lingkungan. Relawan yang dengan ikhlas melakukan penanaman, membuat masyarakat mulai merasa memiliki hutan Lemongan yang satu tahun terakhir mulai tampak bersemi. [majalah SOROT Edisi 54, Januari - Februari 2010]

They came together for the purpose of greening Mt. Lemongan, restoring the springs, preventing floods and landslides, and getting the rich natural biodiversity back. The group's emphasis is on the awareness and participation of all parties that care about Mt. Lemongan and its surrounding area. [The Jakarta Post, Tuesday, May 25, 2010]¹⁰

Laskar Hijau bukanlah organisasi yang datang untuk menawarkan program-program dengan cara pandang mereka yang berusaha disuntikkan ke warga. Namun, Laskar Hijau kulihat hidup dan tinggal bersama masyarakat setempat, berkarya bersama mereka, membikin rencana bersama dari apa yang diketahui warga. [Alpha Savitri]¹¹

9 <http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/05/14/15452579/Gerakan.Orang.Muda.Penyelamat.Hutan>

10 <http://www.thejakartapost.com/news/2010/05/25/mt-lemongan-locals-bring-nature-back-life.html>

11 <http://greensavitri.blogspot.com/2010/04/multicultural-green-camp-ranu-klakah.html>

Analisis dan Ulasan

Dari sudut pandang model gerakan, Laskar Hijau memiliki model yang unik dan cukup ekstrem dalam melakukan gerakannya. Hal ini tergambar dari komitmen mereka untuk memilih ”jalan sunyi” pergerakan, yang selama ini tak banyak dilirik oleh – bahkan - kalangan aktivis lingkungan. Selain itu, konsistensi yang dibangun bersama dengan melakukan penghijauan setiap hari Minggu merupakan inspirasi tersendiri bagi dunia gerakan yang sering kali tergiur tawaran program lain dari pihak *funding* dengan isu yang seksi dan dana yang lebih menggiurkan hingga menjadi luput dan bahkan lupa pada isu utama yang seharusnya diperjuangkan.

Dari sisi organisasi, Laskar Hijau juga memiliki cara membangun organisasi yang keluar dari kebiasaan saat ini. Membangun kultur terlebih dahulu, baru kemudian struktur. Jika kita amati, organisasi rakyat yang ada selama ini banyak yang membangun dirinya dari struktur terlebih dahulu. Ketika organisasi tersebut sudah mapan, terutama dalam hal pendanaan, justru pada saat itulah sering terjadi kehancuran. Mayoritas penyebabnya adalah faktor internal organisasi. Korupsi, saling berebut kekuasaan dan pengaruh, dan faktor-faktor yang nyaris tidak ideologis sama sekali, sering kali menjadi pemicu utama pecah dan hancurnya organisasi rakyat.

Di Laskar Hijau yang notabene tidak memiliki aset apa pun, persoalan-persoalan semacam itu juga pernah muncul. Ini sungguh menggelikan. Rupanya mental ingin bersaing dengan siapa pun, nafsu selalu ingin menang dengan cara apa pun, keserakan untuk memiliki milik siapapun, sudah menjadi tren perilaku di zaman ini. Pada zaman ini, orang yang terpilih sebagai pemimpin belum tentu karena berbudi pekerti yang luhur dan dicintai rakyat, tetapi

bisa jadi karena punya uang. Sebab kemenangan saat ini bisa dibeli dengan uang dan dengan strategi politik yang lihai serta jitu.

Berangkat dari hipotesis tersebut, Laskar Hijau mencoba membangun organisasi dari kultur yang luhur melalui cara yang jujur. Watak kerelawanan, semangat kegotong-royongan, kesetiaan terhadap perjuangan, ketegasan dalam membela kebenaran, tenggang rasa kepada kawan, ketulusan dalam berbuat, kejujuran dalam bertindak dan berbicara, akan menjadi ukuran dalam berproses bersama di Laskar Hijau. Tentu mereka sepenuhnya sadar bahwa cara ini memang bukan cara yang populer untuk saat ini dan mereka paham betul pada konsekuensi yang bakal dihadapi, seperti tak sedikit orang yang tertarik untuk bergabung dengan organisasi ini, bahkan sudah hampir sepuluh orang yang keluar dari Laskar Hijau dalam setahun ini. Namun, bagi Laskar Hijau, sedikit orang bukan berarti tidak bisa berbuat apa-apa. Dan mereka telah membuktikannya berulang kali. Karena kecil itu indah.

Catatan-Catatan Ke Depan

Pelestarian hutan di Gunung Lemongan tidak cukup hanya dengan menanam kembali hutan yang telah luluh-lantak, tetapi juga perlu adanya perlindungan secara komprehensif terhadap kawasan yang sudah ditanami tersebut. Kelak saat pohon-pohon sudah besar dan berbuah, sangat memungkinkan muncul ancaman terhadap kelestarian hutan di Gunung Lemongan, seperti kemungkinan terjadi kembali praktik *illegal logging*, perampasan, dan atau penguasaan oleh kekuatan modal ataupun oligarki yang hanya mementingkan diri sendiri. Juga tidak menutup kemungkinan terjadi perebutan antar-warga.

Oleh karena itu, agar Gunung Lemongan tetap lestari, perlu dilakukan beberapa upaya advokatif agar kawasan ini

dilindungi secara hukum. Bentuk perlindungan hukum yang diharapkan terwujud Laskar Hijau adalah lahirnya kebijakan yang menetapkan dan mengukuhkan Gunung Lemongan sebagai kawasan hutan lindung atau taman nasional.

Selain perlindungan hukum, penting juga diwujudkan perlindungan ekologis dari masyarakat sekitar terhadap pelestarian hutan Gunung Lemongan. Pewujudan perlindungan ekologis dari masyarakat ini memang butuh waktu yang sangat panjang, terutama dalam proses membangun kesadaran warga terhadap pentingnya menjaga kelestarian ekosistem.

Hal lain yang juga tak kalah penting untuk mulai dipersiapkan adalah pemenuhan kebutuhan logistik untuk menjaga agar gerakan ini tetap berkelanjutan hingga mencapai target. Dalam hal ini Laskar Hijau harus memiliki sumber pendanaan mandiri yang mampu memenuhi kebutuhan untuk gerakan konservasi ini. Setidaknya Laskar Hijau memiliki sebuah usaha produktif yang mampu menghasilkan pendapatan untuk membiayai kegiatannya, namun tidak menyita banyak waktu mereka. Waktu 15 tahun hingga 20 tahun bukanlah sebentar, tentu akan diperlukan suplai logistik yang mencukupi untuk menjaga "metabolisme" gerakan rakyat ini.

Penutup

Kerja-kerja Laskar Hijau di Gunung Lemongan adalah sesuatu yang kecil dan biasa-biasa saja. Namun, sesuatu yang kecil bila dikerjakan dengan penuh kesungguhan, ketulusan, kesetiaan, dan cinta kasih pasti akan menghasilkan sesuatu yang indah. Tak lebih dan tak kurang, sesederhana ungkapan penyair Chairil Anwar, "*Sekali berarti, sesudah itu mati*".

Bali Desa Wisata Ekologis: Menjaga Kesakralan Milik Bersama

*Simpul Bali - FBB Prakarsa Rakyat*¹

Bali merupakan salah satu dari 17.508 kepulauan di Indonesia yang berada di antara keberagaman dan kebhinekaan. Bali di antara kebhinekaan tersebut sampai saat ini masih berkibar dalam keindahan dan keharmonisan yang tak terbandingkan. Satu hal yang dihasilkan adalah kesatuan nilai Tri Hita Karana dan Sad Kerthi, nilai lokal yang menjaga keseimbangan Bali. Mekanisme keseimbangan yang diciptakan memperhatikan elemen-elemen ekologi, budaya, dan spiritual melalui pelibatan berbagai pihak, terutama organisasi masyarakat lokal sebagai pihak yang berhak atas kenyamanan ruang hidupnya.

Tri Hita Karana merupakan hubungan yang harmonis manusia dengan Tuhan, antar-manusia, dan manusia dengan

¹ Tulisan dipersiapkan oleh Atiek Kurnianingsih dan Ni Made Puriati dari Yayasan Wisnu Bali.

alamnya, sebagai filosofi laku masyarakat Bali. *Sad Kerthi* adalah filosofi lokal yang ditujukan untuk kelestarian *atma kerthi* (atmosfer spiritualis), *wana kerthi* (kelestarian hutan dan isinya), *danu kerthi* (kesucian air tawar), *segara kerthi* (kesucian laut), *jana kerthi* (manusia yang berbudi pekerti), dan *jagat kerthi* (keseimbangan ruang desa). Filosofi ini setara dengan “*island management*” dengan konsep keadilan dan keberlanjutan.

Pasar dan Globalisasi di Bali

Sejak awal abad ke-20, keindahan dan keharmonisan Bali mengundang orang luar ikut menikmatinya serta memberikan pendapatan ekstra bagi banyak pihak. Berawal ketika Pemerintah Hindia Belanda mendatangkan 213 turis pada tahun 1924 melalui Koninklijk Paketvaart Maatschapij, sebuah agen perjalanan wisata (Picard, 1996:25). Keputusan Pemerintah Hindia Belanda menjadikan Bali sebagai daerah tujuan wisata didasarkan atas catatan harian Aernoudt Lintgens, orang asing pertama, pelaut Belanda yang menjejakkan kaki di Kuta pada Februari 1597 (Ardhana, 1994:21; Picard, 1996:18). Lintgens bersama Emanuel Roodenburch yang berkebangsaan Portugis melukiskan alam Bali yang eksotis dan keramahan penduduk Bali yang mereka temui, yang dianggapnya sebagai surga terakhir, *the last paradise*.

Catatan perjalanan tersebut kemudian dipakai Helen Eva Yates asal Inggris dalam membuat semacam panduan pada tahun 1914 yang digunakan Koninklijk Paketvaart Maatschapij untuk menggaet turis Belanda ke Bali (Picard, 1996:23; *Bali Post*, 11 November 2002). Yates menyebut Bali dengan *enchanted isle*, pulau yang mempesona. Namun sebelum panduan tersebut disebarluaskan, turis pertama yang tiba di Bali pada tahun 1902 adalah Heer H. Van Kol, anggota Parlemen Hindia Belanda (Hanna, 1976:91). Van Kol kemudian menerbitkan buku yang

menceritakan perjalanannya selama di Indonesia, salah satunya Bali.

Island of Bali karya Covarrubias pada akhirnya mempertegas kesaksian Yates dan Van Kol. Buku yang ditulis Covarrubias berdasarkan pengalaman perjalanannya bersama KPM pada tahun 1930 dan foto-foto karya Gregor Krause semakin mengundang orang asing mengunjungi Bali. Para seniman seperti Walter Spies, Arie Smith, dan Le Meyeur, serta para antropolog seperti Margareth Mead, Collin Mc Phee, dan Jane Bello, kemudian ikut berperan menjadi semacam agen penyebarluasan informasi tentang Bali ke seluruh dunia, terutama Eropa.

Bukan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu atau membuktikan apa yang sudah dituliskan, mereka yang datang juga ingin berusaha di bidang pariwisata. Mrs. Manx asal Scotlandia yang telah mengubah namanya menjadi Ketut Tantri, mendirikan Kuta Beach Hotel pada tahun 1932 yang merupakan hotel pertama di Kuta (Lindsey, 1997). Sampai akhirnya semakin banyak orang asing yang mengikuti jejak Ketut Tantri dan berinteraksi dengan orang Bali. Sementara orang Bali juga ada yang mengikuti jejak Ketut Tantri, melakukan bisnis jasa pariwisata, di antaranya rumah makan dan toko cenderamata.

Berdasarkan catatan kepariwisataan di Bali, perkembangan kepariwisataan Bali pernah berhenti pada tahun 1940-an saat Perang Dunia I dan II, dilanjutkan dengan Revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia. Tahun 1956 kepariwisataan Bali kembali dirintis dan pada Agustus 1969 diresmikan Pelabuhan Udara Ngurah Rai sebagai pelabuhan internasional. Ketika Pembangunan Lima Tahun (Pelita) I mulai dicanangkan pada April 1969, kepariwisataan di Bali mulai dilaksanakan secara lebih intensif, teratur, dan terencana.

Pembangunan kepariwisataan Bali kemudian tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian regional dan nasional, tetapi juga memberikan konsekuensi terhadap lingkungan dan budaya masyarakat Bali. Komersialisasi budaya menjadi halal sepanjang untuk pariwisata. Budaya tidak lagi ditujukan untuk mengharmoniskan kehidupan manusia dengan alamnya. Orang Bali menjadi terpisah dari alam, mengeksploitasi dan memanipulasinya tanpa batas (Panji Tisna, 2003:25).

Contohnya, Nusa Dua dijadikan kawasan wisata dunia dengan pembangunan hotel berbintang yang membutuhkan banyak air. Tanah pesisir pantai Sanur, Kuta, dan Jimbaran dibebaskan untuk pembangunan jalan bebas hambatan dan hotel. Bandara Ngurah Rai diperluas dengan "memfungsikan" hutan bakau. Kawasan yang semula dipertahankan sebagai jalur hijau atau pertanian dibebaskan untuk LC (*land consolidation*), pertokoan, dan perumahan. Tidak cukup di lahan datar, sempadan danau dan sungai, bahkan jurang yang ditumbuhi tanaman pelindung ditebang kemudian "difungsikan" untuk hotel atau restoran (Ashrama, 2002:1-2).

Saat ini perkembangan industri kepariwisataan di Bali masih mengarah ke pariwisata massal. Sebagian besar kebijakannya berpihak pada jenis pariwisata yang mengkomoditisasikan sumber daya alam dan kultur komunitas serta dimiliki oleh perseorangan atau kelompok pemodal besar. Berdasarkan pandangan masyarakat, sebagian besar jenis pariwisata yang berkembang saat ini boros sumber daya, dimonopoli investor, mutu kepariwisataan rendah, menciptakan alih fungsi lahan yang cepat, berorientasi jangka pendek, dan merusak ekosistem. Selain itu sebagian budaya tidak lagi disakralkan.

Kejenuhan atas kepariwisataan massal di Bali secara perlahan, akhir-akhir ini beralih ke pariwisata ekologis. Jenis

pariwisata ini dianggap lebih berpihak pada lingkungan dan masyarakat lokal, namun kemudian juga memunculkan oportunist berlabel "eco". Sebagian besar merupakan wisata alam yang dikelola oleh perseorangan atau pihak swasta, seperti *eco lodge*, taman wisata alam dan laut, aktivitas *tracking* di areal persawahan atau kebun, dan meditasi di areal terbuka.

Berbeda dari pariwisata massal yang menghabiskan banyak sumber daya, wisata jenis baru yang dikembangkan untuk menikmati alam. Namun pada dasarnya tidak jauh berbeda dari pariwisata yang selama ini terjadi, karena pengelolaan tetap dilakukan oleh orang luar dan keuntungan terbesar pun tidak untuk masyarakat lokal. Pihak tersebut tidak lebih hanya berfokus pada pendapatan ekonomi dengan menerapkan standar baru yang lebih banyak mengklaim nilai lokal. Keberadaannya justru dapat berimplikasi pada peminggiran nilai lokal serta membuka peluang besar bagi lembaga *assessor* asing ikut bermain dalam sertifikasi wisata "eco".

Berdasarkan kondisi tersebut, masyarakat Bali dituntut untuk mulai memikirkan dan membangun mekanisme pertahanan diri dalam merawat keberadaan dan keseimbangan Bali tanpa harus menggadaikan identitas dan kearifan nilai-nilai tradisional yang mendasari. Perlu dibangun strategi untuk mempertahankan keberadaan dan keseimbangan Bali dari kehancuran lingkungan dan nilai budayanya.

Strategi Pertahanan Diri

The way to real Bali. Jalan menuju Bali yang sesungguhnya. Kalimat tersebut digunakan sebagai moto Bali DWE, asosiasi desa wisata ekologis di Bali yang didirikan berdasarkan pengalaman "ekowisata" empat desa yang tergabung dalam Jaringan Ekowisata

Desa (JED). DWE merupakan kependekan dari Desa Wisata Ekologis, dan DWE dalam bahasa Bali berarti milik bersama pemberian Tuhan yang harus dijaga dan disakralkan.

Bali DWE merupakan Asosiasi Desa Wisata Ekologis di Bali. Bali DWE mempunyai kepentingan atas terbentuknya tatanan ruang kehidupan masyarakat pedesaan yang berkeadilan dan masyarakatnya mampu menyikapi perkembangan kepariwisataan agar memberikan peningkatan kesejahteraan dan kelestarian budaya serta lingkungan. Lembaga ini diharapkan ikut berperan dalam penentuan arah kebijakan pariwisata di Bali secara legal formal melalui keterlibatannya dalam Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali.

Wisata ekologis yang dimaksud adalah pariwisata yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan masyarakat Bali dengan tetap menerapkan nilai-nilai budaya lokal dalam menjaga lingkungan dan kehidupan sosial berdasarkan kesepakatan bersama masyarakatnya. Sementara Desa Wisata Ekologis menekankan jenis wisata tersebut dilakukan di desa, bukan kota, sebagai wilayah yang dikuasai, dikelola, dan digunakan sekelompok masyarakat dengan aturan yang jelas.

Pemahaman secara singkat atas Desa Wisata Ekologis adalah kesatuan wilayah desa/banjar/subak yang sudah disepakati secara bersama oleh masyarakatnya untuk dikelola juga secara internal sebagai tempat bertukar informasi dengan tamu yang berkunjung dengan memperhatikan aspek ekologi dan budaya masyarakat serta ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Perwujudan cita-cita Bali DWE diupayakan dengan tiga cara. Pertama, dengan menggulirkan wacana dan strategi ke

arah gerakan sosial. Kedua, melakukan penguatan organisasi masyarakat sipil dan gerakan rakyat yang berorientasi pada penguatan kapasitas komunitas basis dan merupakan bagian dari strategi desentralisasi sumber daya (politik, ekonomi, dan budaya). Ketiga, dengan cara membawa arus perspektif gender dari pinggiran ke arus utama.

Bali DWE melalui logonya ditekankan pada huruf A pada kata Bali yang disimbolkan dengan *Gelung Kori*, pintu masuk ke tempat yang diagungkan di Bali seperti pura dan puri. Artinya, untuk masuk dan melihat Bali yang sesungguhnya harus dibarengi dengan rasa hormat dan menghargai semua yang ada di dalamnya. Kenyataan yang terjadi selama ini adalah orang luar yang masuk ke Bali membawa dan menerapkan budayanya sendiri, tanpa peduli terhadap budaya lokal.

Orang Bali diajak untuk mulai mendesain sendiri model pariwisata yang akan dikembangkan. Model pariwisata yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan masyarakat dengan tetap menerapkan nilai-nilai budaya lokal dalam menjaga lingkungan dan kehidupan sosial berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat. Model ini diharapkan dijadikan sebagai contoh oleh daerah lain di Indonesia yang juga akan mengembangkan wilayahnya untuk pariwisata.

Ada beberapa definisi tentang ekowisata. Salah satu definisi dibuat oleh Masyarakat Ekowisata Indonesia (MEI) bahwa ekowisata adalah kegiatan perjalanan yang bertanggung jawab di daerah yang masih alami atau dikelola secara ramah lingkungan kemudian memperhatikan konservasi dan peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Definisi tersebut mengesankan masyarakat lokal masih diposisikan sebagai objek melalui niat baik pengelolaan ramah lingkungan dan peningkatan pendapatan.

Sementara ekowisata yang diharapkan dan kemudian disepakati oleh masyarakat desa yang tergabung dalam JED dan Bali DWE² adalah pariwisata berbasis lingkungan yang dikelola masyarakat untuk peningkatan pendapatan masyarakat. Ada keinginan dan upaya dari masyarakat untuk ikut mendesain kepariwisataan di Bali karena masyarakat mempunyai hak untuk itu. Masyarakat mempunyai hak mengelola ruang-ruang yang belum ditandai oleh pemerintah menjadi kawasan pariwisata.³ Ruang di luar itu nantinya dijadikan sebagai desa wisata ekologis yang pada akhirnya akan menjadi pulau wisata ekologis.

Kenyataan saat ini adalah belum ada lembaga yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk bisa ikut berperan dalam kebijakan kepariwisataan, seperti ASITA sebagai asosiasi *tour and travel*, PHRI untuk hotel dan restoran, juga HPI untuk pemandu. Padahal, masyarakat desa yang sudah mengembangkan wisata di daerahnya juga mempunyai hal-hal tersebut : travel, kuliner lokal, dan pemandu lokal. Namun secara birokratis, masyarakat desa tidak bisa ikut bergabung dalam lembaga yang ada. Maka menjadi sangat perlu untuk menciptakan satu lembaga yang bisa mengakomodasi masyarakat desa untuk ikut menentukan arah kebijakan kepariwisataan di Bali.

JED sebagai Model Desa Wisata Ekologis

Jaringan Ekowisata Desa sebagai model desa wisata ekologis yang sudah terbukti selama sembilan tahun, keberadaannya

2 Anggota JED (Jaringan Ekowisata Desa) juga tergabung dalam Bali DWE yang merupakan asosiasi Desa Wisata Ekologis. Hubungan antara JED dan Bali DWE diuraikan lebih detil dalam “JED sebagai Model Desa Wisata Ekologis”

3 Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2005 tentang RTRW Provinsi Bali ada 15 kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pariwisata berupa hunian wisata berikut sarana penunjang seperti restoran dan pusat perbelanjaan

memberikan inspirasi kepada desa lain di Bali. JED kemudian juga diposisikan sebagai tempat pelatihan/magang atau studi banding bagi komunitas yang tertarik untuk mengembangkan wisata ekologis, tidak hanya desa di Bali tetapi justru sebagian besar dari luar Bali.

Perjalanan selama sembilan tahun terhadap empat desa JED merupakan pilihan yang memihak dan istimewa. Ada sejumlah dana, waktu, dan tenaga yang dikeluarkan untuk sampai pada posisi JED saat ini. Akan menjadi tidak adil jika keberpihakan dan pengistimewaan yang sama tidak diberikan dan didapatkan oleh desa lain di Bali. Namun sistem yang sudah dibangun dalam JED tidak mudah untuk mengajak desa lain masuk, ikut menjadi pemilik. Ada proses sangat panjang yang sudah dilalui dan sejumlah saham yang sudah disetorkan, menjadi kesulitan bagi desa lain mendapatkan posisi sama dengan empat desa yang sudah ada.

Saat ini merupakan saat bagi keempat desa JED untuk berbagi kepada desa lain, memberikan kesempatan yang sama melalui Asosisasi Bali DWE. Pendampingan dalam peningkatan kapasitas personal dan kelompok dalam pengelolaan wisata ekologi juga akan didapatkan oleh desa-desa yang nantinya menjadi anggota Bali DWE. Pendampingan bisa dilakukan oleh masyarakat desa yang sudah mengembangkan wisata ekologis lebih dulu atau oleh tenaga ahli yang mempunyai pemahaman sama atas wisata ekologis.

JED akan diperankan sebagai contoh desa yang sudah mengembangkan wisata ekologis. Selain itu, JED juga akan berperan sebagai unit pemasaran representatif dan promosi bagi anggota Bali DWE. JED akan mengembangkan diri ke tingkat nasional dan global, bekerja sama dengan desa lain di luar Bali yang juga mengembangkan wisata ekologis. Selain itu, JED yang hanya dimiliki empat desa dan satu lembaga bisa membuat pemiliknya

terlena. Pelibatan desa lain melalui Bali DWE bisa membuat setiap desa saling terpacu memperbaiki diri.

DWE Dalam Konteks Nasional dan Global

Saat ini ada banyak istilah terkait dengan wisata ekologis. Salah satunya adalah “desa wisata”. Harian Kompas edisi 29 Oktober 2009 mengatakan Depbudpar akan mengembangkan 200 desa wisata pada tahun 2010. Desa wisata menurut Pariwisata Inti Rakyat (PIR) dimaksudkan sebagai kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan, baik kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik. Juga mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan-minuman, dan kebutuhan wisata lainnya.

Menurut PIR, untuk menjadi desa wisata harus memenuhi syarat-syarat:

1. Aksesibilitasnya baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi
2. Memiliki objek-objek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai objek wisata
3. Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang
4. Keamanan di desa tersebut terjamin

5. Tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai
6. Beriklim sejuk atau dingin
7. Berhubungan dengan objek wisata lain yang sudah dikenal masyarakat luas

Pemahaman tersebut sedikit berbeda dari pemahaman desa wisata ekologis dalam Bali DWE. Bahwa desa wisata ekologis lebih menekankan pada kesatuan wilayah desa yang dimiliki masyarakat dan mempunyai aturan dalam pengelolaan dan pemanfaatan atas ruang di dalamnya, tanpa terlepas dari unsur-unsur yang ditetapkan dalam desa wisata. Bedanya, desa wisata ekologis tidak memberlakukan ketujuh syarat seperti yang ditetapkan untuk desa wisata ala PIR.

Hal tersebut juga sedikit membedakan desa wisata ekologis dari wisata berbasis masyarakat⁴ yang dikembangkan masyarakat internasional. Pariwisata berbasis masyarakat menekankan pada peran aktif masyarakat lokal dalam manajemen dan pembangunan pariwisata, namun juga tidak menekankan pada kepemilikan dan pengelolaan kewilayahan. Namun, antara Desa Wisata Ekologis dan Pariwisata Berbasis Masyarakat mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan.

Secara internasional, Kode Etik Kepariwisata Dunia telah diputuskan pada Sidang Umum World Tourism Organization ke-13 yang memuat prinsip-prinsip dalam pengembangan kepariwisataan. Kode etik tersebut merupakan acuan bagi para pemangku kepentingan pariwisata. Kode Etik Kepariwisata Dunia bertujuan menekan dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan dan peninggalan budaya, memaksimalkan peningkatan

4 Lebih dikenal dengan istilah CBT, Community based Tourism

dalam pengembangan yang berkelanjutan dengan pemberantasan kemiskinan, dan menciptakan kerukunan di antara masyarakat.

Tujuan tersebut sejalan dengan Bali DWE, yaitu meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sumber daya, mendukung upaya pengelolaan sumber daya yang berkeadilan dan berkelanjutan, melakukan standarisasi bentuk usaha keparisataan masyarakat desa, serta memberikan sertifikat kepada para anggota yang telah memenuhi ketentuan nilai-nilai yang dianut Bali DWE.

Prinsip-prinsip Kode Etik Kepariwisataaun Dunia membicarakan 10 hal penting:

1. Kontribusi kepariwisataan untuk membangun saling pengertian dan saling menghormati di antara penduduk dan masyarakat
2. Kepariwisataan sebagai media untuk memenuhi kebutuhan kualitas hidup baik secara perseorangan maupun secara kolektif
3. Kepariwisataan sebagai faktor pembangunan berkelanjutan
4. Kepariwisataan sebagai pemakai warisan budaya kemanusiaan serta sebagai penyumbang pengembangan warisan budaya itu sendiri
5. Kepariwisataan adalah kegiatan yang menguntungkan bagi masyarakat dan negara penerima wisatawan
6. Kewajiban para pemangku kepentingan pembangunan kepariwisataan
7. Hak dasar berwisata

8. Kebebasan bergerak wisatawan
9. Hak para pekerja dan pengusaha dalam industri pariwisata
10. Pelaksanaan prinsip-prinsip Kode Etik Kepariwisata
Dunia

Terkait dengan hal tersebut, Bali DWE selain ditujukan sebagai media bagi masyarakat desa ikut mendesain kepariwisataan di Bali dan sebagai mekanisme pertahanan diri dalam menjaga keberadaan dan keseimbangan Bali, juga diharapkan bisa mendukung program pemerintah serta mendukung kepariwisataan dunia yang juga sudah beralih ke arah wisata beretika atas alam dan masyarakat lokal.

Bali DWE di Mata Pakar Kepariwisataan

Hal lain yang kemudian menjadi catatan penting adalah pariwisata di Bali tidak pernah didesain orang Bali. Pariwisata yang berkembang dan dikembangkan adalah pariwisata yang didesain orang luar, dan orang Bali hanya mengamini. Satu kondisi yang dilihat Picard (1996:116) dan dibenarkan I Gede Ardika yang saat ini menjabat sebagai anggota Komite Kode Etik UNWTO (World Tourism Organisation).

I Gede Ardika mengatakan, kehadiran organisasi Asosiasi Bali Desa Wisata Ekologis (Bali DWE) adalah suatu keniscayaan, jika melihat paradigma kepariwisataan Indonesia seperti tercantum dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Paradigma tersebut menyatakan empat hal:

1. Bahwa pembangunan kepariwisataan adalah untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan pembukaan

Undang-Undang Dasar 1945.

2. Bahwa berwisata itu merupakan hak asasi manusia.
3. Bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan dalam rangka mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat.
4. Bahwa kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip-prinsip menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dan sesama manusia, hubungan manusia dan lingkungan; menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal; memberdayakan masyarakat setempat; mematuhi kode etik kepariwisataan dunia; serta memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paradigma kepariwisataan di tingkat dunia juga sudah bergeser, dari kepariwisataan yang semata-mata sebagai industri, bergeser ke aspek nilai-nilai kemanusiaan, lingkungan, dan sosial budaya. Bahkan pada Sidang Umum PBB 21 Desember 2001 dinyatakan kepariwisataan memiliki dimensi kemanusiaan, lingkungan, sosial budaya, termasuk di dalamnya turut andil memberantas kemiskinan dan menjalin perdamaian dunia.

Sedangkan paradigma kepariwisataan di Bali, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1991 jo. Perda Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pariwisata Budaya, menetapkan pembangunan kepariwisataan di Bali adalah pembangunan “pariwisata budaya”. Yaitu kepariwisataan yang dalam perkembangan dan pengembangannya menggunakan kebudayaan daerah Bali yang dijiwai agama Hindu, dengan landasan falsafah Tri Hita Karana.

Keseluruhan paradigma kepariwisataan tersebut menjadi visi dan cita-cita Asosiasi Bali Desa Wisata Ekologis (Bali DWE), asosiasi yang beranggotakan desa-desa di Bali dalam mengembangkan diri sebagai “wisata pedesaan”. Dengan dilandasi tekad yang kuat, asosiasi ini memiliki komitmen untuk mewujudkan “paradigma baru” kepariwisataan dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan “wisata pedesaan” di tiap-tiap desa anggotanya. Dengan demikian terlihat secara nyata fungsi kepariwisataan secara kesisteman dan keberkelanjutan dalam pelestarian budaya, lingkungan, pemberantasan kemiskinan, perkuatan jati diri bangsa, dan penciptaan perdamaian. Oleh karena itu, Asosiasi Bali DWE mempunyai keunikan yang sekaligus menjadikannya sebagai kekuatan organisasi.

Pada tataran nasional, Bali DWE turut mewujudkan masyarakat “Pancasilais” melalui kegiatan kepariwisataan di lingkungan desa sebagai kesatuan terkecil masyarakat bangsa. Di tataran lokal Bali DWE turut mewujudkan masyarakat Bali yang berpegang teguh pada adat, budaya, dan agama Hindu baik itu tatwa, susila, maupun upacara. Kesemuanya diwujudkan melalui kegiatan “wisata pedesaan” yang menggunakan paradigma baru kepariwisataan tersebut. Dengan demikian, “wisata pedesaan” akan menjadi benteng dalam melestarikan tradisi, adat, budaya yang dijiwai agama Hindu, dan sekaligus akan menjadi keunggulan kompetitif produk pariwisata Bali.

Asosiasi Bali DWE dewasa ini menjadi satu-satunya asosiasi dalam bidang kepariwisataan di Bali yang menggunakan norma agama Hindu dan nilai budaya Bali sebagai landasan organisasi. Asosiasi ini menyerap tata nilai dan praktik yang ada dalam desa pekraman, subak, banjar dalam praktik pelaksanaan organisasi. Hal ini dimaksudkan sebagai wujud nyata dalam melestarikan, dengan memelihara, menggunakan, dan mengembangkan adat

istiadat dan kebudayaan Bali. Pasalnya, ketangguhan adat istiadat, tradisi, dan budaya ditentukan oleh mampu tidaknya menjaga keluhuran nilai dasar adat istiadat, tradisi, dan budaya tersebut. Sekaligus mampu mengadakan adaptasi atas tuntutan perkembangan dan perubahan. Pelestarian seperti inilah yang akan dilakukan Asosiasi Bali DWE sebagai pelopor di bidang kepariwisataan.

Pada tataran praktis, Asosiasi Bali DWE mempunyai tekad untuk memelopori penerapan tata nilai dan tata upacara yang sudah diterapkan desa pekraman, banjar, subak dalam praktik kegiatan kepariwisataan, yaitu kepariwisataan yang berbasis pada budaya Bali. Bahwa praktik seperti itu masih harus ditumbuhkembangkan agar menjadi kebiasaan dan membudaya. Bahkan pada sisi fungsi rehabilitasi, dapat pula menjadi pelopor untuk menegakkan kembali tata sosial seperti subak yang karena lahan persawahan/pertanian beralih fungsi menjadi tempat kegiatan pariwisata, membawa akibat hilangnya struktur dan fungsi subak.

Kegiatan pariwisata yang meminggirkan kearifan lokal seperti itu tentu sangat berlawanan dengan paradigma “Pariwisata Budaya” yang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah. Kepariwisataan Bali harus mampu mengembalikan sukma dan fungsi subak, walaupun lahannya sudah beralih fungsi. Namun hakikat subak yang sudah menjadi produk sosial budaya bernilai tinggi tidak boleh hilang. Harus dilakukan rehabilitasi dan revitalisasi.

Asosiasi Bali DWE yang baru berdiri ini masih harus menempuh jalan panjang, masih akan menghadapi berbagai tantangan dalam perjalanannya. Tetapi langkah pertama telah diayun. Semua pihak, masyarakat, pelaku usaha pariwisata, pemerintah, media massa hendaknya dapat bergandengan bersama dalam mewujudkan cita-cita luhur ini, untuk kemajuan

kepariwisataan Bali dalam meningkatkan kesejahteraan, martabat, dan keadaban masyarakatnya.

Pustaka

Ashrama, Berata dan Jackie Ingham. 2002. *Tri Hita Karana Tourism Awards and Acreditations 2002, Hand Out*. Denpasar: Bali Travel News

Ardhana, I Ketut. 1994. “Bali dalam Kilasan Sejarah” dalam E Gde Pitana (ed.), *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*. Hal 17 – 42. Denpasar: BP

Bali Post. 11 November 2002. *Kuta Dulu dan Kini (1): Bermula dari Catatan Harian Pelaut Belanda*

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI. 2008. *Kode Etik Kepariwisataaan Dunia*

Hanna, Willard A. 1976. *Bali Profile: People, Events, Circumstances 1001 – 1976*. Lebanon, New Hampshire: Whitman Press Inc.

Kompas. 29 Oktober 2009. *2010, Depbudpar Bangun 200 Desa Wisata*. Kompas.com

Lindsey, Timothy. 1997. “The Romance of Ktut Tantri and Indonesia” dalam *Inside Indonesia* No. 52, October – December 1997. www.insideindonesia.org/edit52/ktut.htm

Panji Tisna, I Gusti Raka. 2003. “Hilangnya Surga Terakhir?: Alam-Budaya dan Godaan Ekonomi” dalam Urs Ramseyer dan I Gusti Raka Panji Tisna (eds.). *Bali dalam Dua Dunia: Potret Diri yang Kritis*. Hal 17 – 28. Bali: MatameraBook

Picard, Michael. 1995. Bali: *Cultural Tourism and Touristic Culture*. Singapore: Archipelago Press

Demokrasi, buat Siapa?

*Simpul Bandung – FBB Prakarsa Rakyat*¹

Pemilihan Umum 2009 berlangsung damai di Jawa Barat. Sebuah kenyataan yang melegakan banyak pihak, karena banyak ketegangan terjadi di berbagai daerah lain berkenaan dengan pelaksanaan ataupun hasil pemilu tersebut. Keberhasilan ini dinilai beberapa pihak sebagai bukti demokrasi telah berjalan, setidaknya di Jawa Barat. Demokrasi yang konon membawa mandat suara rakyat.

Sungguhkah demikian? Sungguhkah rakyat Jawa Barat yang telah melaksanakan ”pesta demokrasi” akbar ini telah terwakili segenap suara dan kepentingannya bersamaan dengan terpilihnya para anggota legislatif dan administrasi pemerintahan nasional yang baru? Bagaimana dengan permasalahan-permasalahan kerakyatan yang selama ini diperjuangkan oleh berbagai gerakan rakyat di Jawa Barat? Jika demokrasi memang telah berjalan mulus, masihkah gerakan rakyat dibutuhkan sebagai alat juang?

1 Tulisan dipersiapkan oleh Desy Budiyantri dari Jaringan Mitra Perempuan Bandung.

Hasil Akhir ‘Pesta Demokrasi’ di Jawa Barat

Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah pemilih paling banyak pada Pemilu 2009. Di sisi ini, kelancaran proses pemilihan umum di Jawa Barat memang patut diakui sebagai hasil kerja keras berbagai pihak yang layak diapresiasi.

Ada beberapa hal yang patut menjadi catatan. Misalnya dari aspek penyelenggaraan, Komisi Pemilihan Umum sebagai pelaksana utama penyelenggaraan pemilu tentu tidak mungkin bergerak sendirian, tetapi pasti mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak. Pemilu di Jawa Barat dapat berlangsung lancar atas kerja sama antara penyelenggara, peserta, pemerintah, juga berbagai organisasi masyarakat/kerakyatan di Jawa Barat.

Sangatlah keliru jika ada yang menyimpulkan pelaksanaan sebuah perhelatan politik besar semacam pemilu hanya membutuhkan kesiapan teknis. Dibutuhkan kedewasaan — terutama pihak-pihak yang ”memperebutkan” suara rakyat — untuk siap menang dan siap kalah. Itulah sebabnya perhelatan politik ini memiliki potensi konflik yang sangat besar. Kontribusi pihak-pihak di luar panitia pemilu dan pemerintahan, terutama media dan organisasi-organisasi masyarakat/kerakyatan, sangatlah besar dalam mengendalikan potensi konflik tersebut. Adapun kontribusi utama dari media dan organisasi-organisasi kerakyatan yang paling signifikan adalah sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat umum.

Salah satu hal yang cukup membanggakan dari hasil Pemilu 2009 adalah meningkatnya angka perolehan kursi anggota legislatif perempuan. Sebanyak 25 dari 100 kursi di DPRD ditempati perempuan. Sebuah peningkatan yang signifikan, mengingat pada periode 2004-2009 hanya 9 perempuan (9%) yang menjadi anggota legislatif Jawa Barat. Hal ini membangkitkan

harapan akan lebih lantangya kepentingan kaum perempuan di Jawa Barat disuarakan.

Namun, di balik lancarnya semua proses pelaksanaan Pemilu 2009, angka golput yang mencapai 27% tetap harus menjadi catatan penting. Bagaimanapun ini bukti masih banyak masyarakat Jawa Barat yang merasa memiliki alasan untuk tidak menggunakan haknya dalam peristiwa nasional yang didengungkan sebagai "pesta demokrasi" ini.

Di balik semua catatan tentang pelaksanaan pemilu tersebut, kawasan Jawa Barat, khususnya Bandung, memiliki persoalan-persoalan yang masih jauh dari penyelesaian. Tentu saja persoalan-persoalan tersebut tak mungkin sekonyong-konyong terselesaikan dengan usainya pemilu yang dinilai sukses dilaksanakan.

Mendung di Utara Bandung

Bandung dilingkung ku gunung (Bandung dikelilingi gunung). Demikian warga Bandung tempo dulu melukiskan wilayah kota Bandung yang tenang dan sejuk. Memang, Jawa Barat, khususnya kota Bandung, terletak di daerah pegunungan dan perbukitan yang pernah asri. Kini kondisi lingkungan Bandung sangat jauh dari kesan asri.

Persoalan lingkungan menjadi perkara pelik bagi warga Jawa Barat, khususnya Bandung. Perusakan lingkungan dengan label "pembangunan" di kawasan utara Bandung yang selama ini menjadi daerah resapan air, sudah sangat memprihatinkan. Ancaman kekeringan pada musim kemarau senantiasa mengintai. Banjir pun kerap datang tanpa ampun pada musim hujan. Rakyat Bandung seakan-akan tak pernah lepas dari deraan bencana dari musim ke musim.

Sebagian besar kawasan Bandung Utara yang seharusnya menjadi daerah konservasi dan resapan air, kini dialihfungsikan menjadi daerah permukiman dan wisata (resor). Dengan adanya pembangunan permukiman dan kawasan wisata di Bandung Utara, air hujan yang semestinya meresap ke dalam tanah, tertahan oleh tembok-tembok beton, dan akhirnya menjadi aliran permukaan. Saat ini hutan di kawasan Bandung Utara sudah jauh berkurang luasnya.

Butuh ketegasan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Namun, walaupun acap kali mendapatkan protes keras dari berbagai elemen masyarakat, pemerintah daerah tetap saja memberikan izin pembangunan bagi para pengembang yang ingin "membangun" kawasan ini. Ironisnya, para anggota dewan yang sudah dipilih rakyat untuk menyuarakan aspirasinya juga nyaris tak bersuara melihat kenyataan ini.

Kawasan Bandung Utara yang semestinya menjadi daerah konservasi, kini sudah mengalami perubahan pemetaan. Misalnya saja kawasan Lembang yang dahulu termasuk kawasan Bandung Utara, sekarang menjadi bagian dari Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Menjadi Daerah Otonom di Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, kawasan Bandung Utara secara umum dan Lembang khususnya, berada di wilayah pengelolaan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Bandung Utara memang kawasan yang potensial memberikan keuntungan, baik dari segi ekonomi maupun segi lingkungan. Dari segi ekonomi, kawasan Bandung Utara adalah objek wisata andalan bagi pendapatan asli daerah. Bandung Utara merupakan tujuan wisata bagi masyarakat dari dalam dan luar kota. Dari segi lingkungan, Bandung Utara adalah daerah resapan air yang menjadi penyangga sumber air untuk Cekungan Bandung.

Wilayah lain yang termasuk kawasan Bandung Utara adalah Dago Atas. Namun, Dago Atas yang dulu masih rimbun, kini sebagian besar sudah berubah wujud menjadi kawasan permukiman dan tempat usaha. Misalnya saja di sekitar Terminal Dago atau Curug Dago. Wilayah tersebut kini sudah menjadi kawasan perumahan. Dago Pakar yang dulu masih terbilang kawasan hutan, kini sudah berubah menjadi "hutan" vila dan rumah mewah. Entah apa pula jadinya jika rencana pembangunan jalan yang menghubungkan Dago - Lembang jadi direalisasikan.

Pembangunan kawasan perumahan dan wisata di daerah ini bukannya tanpa perlawanan. Masyarakat di perkampungan yang berdekatan dengan kawasan Dago Atas berulang kali melancarkan aksi protes. Sebab, selain dihadapkan pada masalah lingkungan, masyarakat Bandung juga harus berhadapan dengan soal sengketa tanah dan penggusuran yang sulit dilepaskan dari pembangunan di kawasan Bandung Utara.

Rahmat Jabaril, aktivis yang giat mengadvokasi warga yang terancam digusur pembangunan berbagai hotel dan perumahan, khususnya di Bandung Utara, punya banyak pengalaman seputar usaha perlawanan rakyat di kawasan ini. Dalam sebuah obrolan, dia menuturkan pengamatannya bahwa kaum perempuan lebih gigih melawan jika ada antek pengembang yang mendatangi kampung mereka untuk membujuk ataupun memaksa. Kami sampai pada simpulan sementara bahwa bisa jadi hal itu dikarenakan keterikatan kebanyakan perempuan pada wilayah domestik jauh lebih erat. Namun, tentu saja simpulan sementara ini masih membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk dipaparkan sebagai fakta ilmiah.

Tangkuban Parahu dalam Genggaman Kaban

Selain isu lingkungan dan penggusuran di kawasan Bandung Utara, perkara pengelolaan kawasan wisata Tangkuban Parahu

juga menjadi persoalan yang berlarut-larut. Masyarakat Jawa Barat diresahkan oleh keputusan Menteri Kehutanan MS Kaban yang memberikan izin pengelolaan kawasan wisata Tangkuban Parahu kepada pihak swasta, yakni PT Graha Rani Putra Persada (GRPP) milik Putra Kaban.

Pada awal Oktober 2009, PT GRPP sudah mendapatkan izin dari Menteri Kehutanan berkenaan dengan hak pengelolaan kawasan wisata Tangkuban Parahu dengan luas lebih-kurang 250 hektare. PT GRPP juga berhak mengelola kawasan Hutan Lindung Cikole.

Terlepas dari kekhawatiran masyarakat Jawa Barat, Departemen Kehutanan mengaku tidak pernah menerima pernyataan keberatan baik dari masyarakat maupun Pemerintah Daerah Jawa Barat. Tentu saja hal ini mengundang reaksi. Sejumlah aktivis lingkungan menolak pengusahaan kawasan pengelolaan Taman Wisata Alam Tangkuban Parahu oleh PT GRPP. Para aktivis bersama sejumlah organisasi seperti Walhi dan Sarekat Hijau menolak pengusahaan Tangkuban Parahu karena sebagian kawasan yang akan dikelola PT GRPP termasuk kawasan lindung. Apalagi perusahaan tersebut akan membangun wisata terpadu. Termasuk puluhan cottage, restoran, club house, kolam renang, dan ruang pertemuan. Tempat parkir juga akan diperluas hingga kawasan Jayagiri. Ada pula jalur khusus untuk hiking dan lahan untuk kegiatan outbond. Para pedagang kaki lima, termasuk asongan liar, juga akan ditata.

Dikhawatirkan, pembangunan tempat wisata terpadu di kawasan Tangkuban Parahu akan menyedot persediaan air tanah, sehingga mengurangi jatah air bagi warga Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang. Sebab, Taman Wisata Alam Tangkuban Parahu terletak di dua kabupaten itu.

Bukan hanya para aktivis lingkungan yang memprotes pengelolaan Taman Wisata Alam Tangkuban Parahu oleh PT GRPP. Pada 31 Mei 2010 sekitar 500 aktivis Aliansi Pejuang Lingkungan dan Budaya Jawa Barat berunjuk rasa di halaman gedung Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung untuk menegaskan penolakan.

Persoalan pengelolaan Taman Wisata Alam Tangkuban Parahu memang aneh. Di satu sisi PT GRPP memiliki Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 306/Menhut/II/2009. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Gubernur Ahmad Heryawan dan Wakil Gubernur Yusuf Macan efendi atau Dede Yusuf menganggap SK tersebut cacat hukum karena prosesnya tidak mendapatkan rekomendasi dari Gubernur. Maka, Gubernur Jawa Barat mengeluarkan SK Gubernur Nomor 912/Kep.1478-Hukham/2009 yang isinya menghentikan sementara pembangunan kawasan wisata Gunung Tangkuban Parahu oleh PT GRPP. Selain itu, Gubernur juga menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja menutup dan menyegel di kawasan tersebut. Akibatnya, saat ini terjadi dualisme hukum terkait Tangkuban Parahu, karena SK Menteri Kehutanan yang dipegang PT GRPP belum ditarik.

Tentu saja dualisme hukum tersebut semakin membuat resah masyarakat, terutama penduduk yang mata pencahariannya usaha kecil-kecilan di kawasan wisata Tangkuban Parahu.

Sikap Gerakan Rakyat

Menghadapi berbagai persoalan tersebut, masyarakat Jawa Barat tidak bisa begitu saja menggantungkan nasib pada pemerintah. Terbukti sampai saat ini administrasi Pemerintah provinsi Jawa Barat yang terpilih secara langsung dalam Pilkada

2008 dan para anggota Dewan yang sudah terpilih dalam Pemilu 2009 masih belum juga melakukan tindakan yang secara signifikan memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Perusakan lingkungan, pengalihan fungsi wilayah konservasi menjadi perumahan atau hotel mewah, pengelolaan kawasan wisata yang membingungkan, semua itu masih saja menjadi beban rakyat hingga kini. Ketika kesuksesan "pesta demokrasi" hanya menghasilkan deretan elite politik yang sibuk sendiri, mau tak mau gerakan akhirnya menjadi semacam parlemen jalanan. Walau saat ini masih jauh dari harapan, tetap menjadi tumpuan harapan bagi mereka yang dibungkam.

Namun, tak lantas berarti gerakan rakyat bebas dari problema. Perkara soliditas, keselarasan aksi, dan persilangan kepentingan menjadi sulur-sulur tak tampak yang menjerat langkah gerakan rakyat. Belum lagi jika ada pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan, coba-coba memperlalat demi kepentingan pribadi atau kelompok.

Mengenai hal ini, Mat Don, wartawan yang juga aktif menelisik liku-liku gerakan rakyat di Bandung dan Jawa Barat, membagi kesaksiannya. "Saya sering melihat orang-orang berdemo tentang satu isu yang sama, tapi terpisah-pisah. Mereka membuat 'panggung' sendiri-sendiri. Padahal, jika mereka bergerak bersama dalam sebuah aksi yang bersatu, pasti suara mereka lebih lantang. Bisa dibbilang tidak ada koordinasi yang baik di antara berbagai elemen gerakan kerakyatan di Bandung ini," katanya.

Ia juga tak jarang melihat bagaimana rakyat dari daerah diperalat. "Saya pernah meliput sebuah demonstrasi di Gedung Sate. Ketika itu massa cukup banyak. Mereka datang dari beberapa daerah di sekitar Bandung. Tapi ketika saya mewawancarai beberapa orang dari mereka, ternyata mereka tidak tahu akan disuruh demo. Mereka dibohongi, diajak main ke kebun binatang

di Bandung. Sesampai di Bandung malah disuruh ikut demo,” kata Mat Don.

Konsolidasi gerakan lantas menjadi solusi paling logis untuk menyelaraskan langkah. Selain itu, konsolidasi dibutuhkan sebagai proses seleksi alamiah untuk mengikis kehadiran pihak-pihak yang memiliki niatan buram untuk memeralat rakyat demi kepentingan pribadi atau kelompok. Dibutuhkan ruang-ruang yang terbuka bagi berbagai pihak yang mempunyai kepedulian terhadap nasib rakyat untuk berkumpul, saling mengenal, dan berdiskusi mengenai beragam permasalahan yang dihadapi rakyat.

Di Bandung, Ultimus menyediakan ruang terbuka untuk berkumpul dan berdiskusi para penggiat gerakan di Bandung. Ultimus sudah mencoba membuka ruang bebas tersebut sejak awal dalam 9 tahun perjalanannya. Tentu saja tidak berarti usaha tersebut berjalan tanpa halang dan rintang. Namun, dengan solidaritas dan kebersamaan semua kawan dalam komunitas Ultimus, besar harapan untuk tetap tersedia ruang terbuka itu demi konsolidasi dan kebaikan bersama. Diharapkan komunitas Ultimus dapat menjadi salah satu tempat terkonsolidasinya gerakan rakyat untuk selalu berpihak pada rakyat dengan segala ketidakadilan yang menyertainya.

Pilar Demokrasi Diruntuhkan Eksploitasi: Belajar dari Masyarakat Pulau Talaga dalam Mempertahankan Hak

*Simpul Sulawesi Tenggara – FBB Prakarsa Rakyat*¹

Masuknya perusahaan tambang nikel yang dimotori Pemerintah Kabupaten Buton membawa harapan besar bagi masyarakat Kecamatan Talaga Raya. Harapan itu dilatarbelakangi kondisi ekonomi yang hanya mengandalkan hasil pertanian, rumput laut, dan sebagian berdagang antarpulau. Masuknya perusahaan tambang nikel diharapkan membawa perubahan kondisi ekonomi masyarakat menjadi lebih baik.

1 Tulisan dipersiapkan oleh M. Abdi Hayat dari Perkumpulan Sekolah Rakyat Butuni, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara.

Mereka berlomba menjadi tenaga yang lebih produktif di perusahaan tambang nikel.

Perusahaan nikel PT Argo Morini Indah melakukan eksploitasi dengan luas lahan pengelolaan 80,67 kilometer persegi. Pada 24 Agustus 2007 dimulai pembangunan berbagai sarana infrastruktur untuk mempermudah proses pengapalan nikel. Namun, lambat laun setelah proses pengangkutan dimulai dan ganti rugi lahan belum juga diberikan, masyarakat mulai mempertanyakan itikad perusahaan nikel dan harapan mendapatkan kesejahteraan.

Tidak hanya pemilik lahan yang dikelola langsung perusahaan tambang nikel yang merasa dirugikan. Warga pemilik lahan pertanian di sekitar area pertambangan dan petani budi daya rumput laut juga mendapatkan dampak dari aktivitas penambangan. Pada musim kemarau tanaman warga dipenuhi debu yang diterbangkan kendaraan dan alat berat perusahaan nikel. Produksi tanaman pun anjlok. Begitu pula rumput laut yang dibudidayakan petani tidak berkembang dengan baik, karena laut di sekeliling tempat menyebarkan rumput laut dipenuhi endapan lumpur.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Buton memandang masuknya PT Argo Morini Indah akan menghasilkan devisa besar. Hitung-hitungannya, dalam satu kali pengapalan atau pengiriman dengan kapal berkapasitas 50.000 ton, Pemerintah Kabupaten akan mengantongi pendapatan asli daerah (PAD) Rp 250 juta. Jika dalam satu tahun ada 10 kali pengapalan, akan mendapatkan Rp 2,5 miliar. Dengan masa kontrak yang telah disepakati selama 20 tahun, Pemerintah Kabupaten Buton akan mendapatkan Rp 50 miliar.

Aktivitas penambangan PT Argo Morini Indah menjadi persoalan serius bagi warga Kecamatan Talaga Raya. Masyarakat

menuntut ganti rugi lahan yang tak juga dibayarkan. Selain itu, sumber pendapatan masyarakat rusak akibat debu yang dihasilkan aktivitas alat berat dan lumpur yang mengubah kejernihan air laut. Di sisi lain, pemerintah daerah menginginkan peningkatan devisa dari sektor tambang.

Sejarah Pemerintahan dan Letak Geografis Talaga

Pulau Talaga merupakan salah satu pulau di wilayah Kabupaten Buton. Sebelumnya pulau ini masuk wilayah Kecamatan Kabaena, Kabupaten Buton. Setelah pemekaran pada 18 Desember 2003 Pulau Kabaena masuk wilayah Kabupaten Bombana. Sedangkan Pulau Talaga tetap menjadi salah satu kecamatan di Kabupaten Buton dengan nama Kecamatan Talaga Raya.

Kecamatan Talaga Raya terdiri atas 5 desa, yaitu Kelurahan Talaga I sekaligus menjadi ibu kota kecamatan, Desa Talaga II, Talaga Besar, Desa Kokoe, dan Desa Wulu. Camat pertama Waode Hanasia, sejak 22 Februari 2003. Kemudian digantikan oleh Laode Mursal Zubair, Laode Albakri, dan sejak 1 Maret 2008 dijabat oleh Laode Kamaluddin. Kecamatan ini beberapa kali mendapat penghargaan dari pemerintah pusat atas keberhasilan KUD Mina Bahari sebagai peringkat empat nasional.

Secara geografis, Pulau Talaga berbatasan dengan Kecamatan Mawasangka di sebelah timur, dengan Laut Flores di sebelah selatan, dengan Teluk Bone di sebelah barat, dan di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana. Kecamatan seluas 71,31 kilometer persegi ini berpenduduk 12.045 jiwa atau 2.331 keluarga. Berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Buton tahun 2007 – 2027, Kecamatan Talaga Raya akan dijadikan pusat pertambangan dan industri serta pusat penangkapan ikan dan budi daya perairan.

Sengketa Lahan atas Ekspansi Pertambangan

Sengketa lahan warga Kabupaten Buton dengan perusahaan tambang nikel PT Argo Morini Indah dimulai sejak tahun 2008. Saat itu warga mengajukan syarat yang disanggupi perusahaan, yaitu ganti rugi lahan Rp 5.000 per meter, tanaman Rp 500.000 per pohon, serta warga diterima sebagai tenaga kerja. Namun, setelah dua tahun kesepakatan tersebut tidak dipenuhi dan upaya lobi tidak berhasil, masyarakat pun melakukan berbagai aksi.

Konflik warga Talaga dengan PT Argo Morini Indah dimulai sejak warga mulai mempertanyakan ganti rugi lahan pada akhir tahun 2009. Berbagai pendekatan dilakukan untuk mendapatkan ganti rugi sesuai dengan harga tanah yang telah dijanjikan.

Upaya menuntut ganti rugi tanah ini mendapat tanggapan Pemerintah Kabupaten Buton. Pada 19 April 2010 Bupati Sjafei Kahar berkunjung bersama staf Asisten II, Dinas Pertambangan, Dinas Pertanahan, Dinas Kehutanan, Kapolres Bau-Bau, Komandan Koramil, Camat Talaga Raya, Kepala Desa Talaga Raya, Kepala Satpol PP, dan delegasi perusahaan PT Argo Morini Indah. Kedatangan rombongan besar itu untuk memberikan keputusan final terhadap tuntutan pemilik lahan, karena lahan yang diklaim warga selama ini merupakan hutan produksi terbatas (HPL). Dalam pertemuan ini Bupati Buton menyatakan ganti rugi lahan akan diberikan dalam bentuk membebaskan pajak bumi dan bangunan selama satu tahun. Ada pula informasi bahwa akan diberikan bantuan beras untuk warga miskin.

Informasi itu menjadikan kemarahan warga memuncak, karena tuntutan tidak sesuai dengan kenyataan. Warga kemudian melakukan berbagai aksi menuntut kejelasan informasi. Aksi tidak hanya di Pulau Talaga, tetapi juga di rumah dinas Bupati di Kota

Bau-Bau pada 24 April 2010 saat peringatan hari jadi Kabupaten Buton.

Pada aksi ini seorang aktivis Liga Mahasiswa Nasional Demokrat (LMND) dipukul. Para demonstran kemudian membubarkan diri untuk membangun kekuatan lebih besar. Mereka juga mengadakan pemukulan tersebut ke Polres Bau-Bau.

Setelah aksi LMND bersama SRMI di depan rumah dinas Bupati Buton tidak mendapatkan tanggapan dari Bupati, warga bersama elemen pro demokrasi lainnya kembali ke Talaga untuk menyusun strategi baru. Warga bersama LMND dan SRMI yang melakukan aksi melebur menjadi Komite Aksi Perjuangan Masyarakat Talaga (Kompak). Kompak menyampaikan “hasil” aksi di Kota Bau-Bau kepada masyarakat seperjuangan di semua desa di Kecamatan Talaga Raya.

Warga dari semua desa bersama elemen pro demokrasi kemudian melakukan pertemuan untuk menyusun strategi. Disepakati tetap melanjutkan perjuangan dengan melakukan aksi di Kecamatan Talaga Raya. Mereka juga akan mengadakan pertemuan dengan pihak perusahaan untuk menuntut hak. Kompak melalui perwakilan mahasiswa dan warga meminta Camat Talaga Raya memediasi pertemuan dan hasil pertemuan disampaikan kepada pejabat yang lebih tinggi.

Koordinasi yang dilakukan mahasiswa dan warga membuahkan aksi di kantor PT AMI. Aksi ini diikuti seluruh warga desa Kecamatan Talaga Raya, yaitu Desa Talaga Besar, Talaga II, Wulu, Kokoe, dan Kelurahan Talaga I. Aksi dilakukan pada 5 Mei 2010 dengan tuntutan ganti rugi dari perusahaan tidak diganti dengan beras jatah warga miskin, tetapi dibayarkan sesuai dengan kesepakatan awal PT AMI saat akan masuk wilayah perkebunan mereka. Dalam aksi ini warga mendapat banyak

teror dari preman yang diduga keras orang bayaran PT AMI. Menurut warga, preman yang didatangkan sedikitnya 42 orang. Namun, karena massa tidak terpancing dan tidak meladeni ulah para preman. Massa menawarkan kepada perusahaan untuk melakukan pertemuan pada 7 Mei 2010, dengan mediator Pemerintah Kabupaten Buton.

Pada 7 Mei 2010 atau dua hari setelah tawaran tersebut belum juga ada tanggapan dari perusahaan, maka perwakilan warga menanyakan rencana pertemuan tersebut. PT AMI menyatakan pihak yang akan mewakili pertemuan sedang sakit. Perwakilan warga kemudian membuat kesepakatan baru dengan perusahaan agar pertemuan tetap dilaksanakan. Dalam negosiasi, perusahaan kemudian menyepakati pertemuan akan dilaksanakan 9 Mei 2010 di Kecamatan Talaga Raya.

Pada Sabtu 9 Mei 2010 sejak pagi warga telah berkumpul di depan Kecamatan Talaga Raya. Namun, hingga waktu yang ditetapkan, pukul 09.00, perwakilan PT AMI belum datang. Bahkan sampai pukul 16.00 warga tetap menunggu agar pertemuan tetap dilaksanakan. Karena sudah beberapa kali dibohongi, maka warga meminta Camat Talaga Raya memediasi pertemuan. Permintaan warga direspons dengan baik oleh Camat Mursal Zuabair.

Direncanakan kembali mengadakan pertemuan pada 13 Juli 2010. Warga meminta Camat mengundang seluruh warga dengan agenda pembentukan forum mediasi, karena yang diundang hanya 5 orang, yaitu 4 orang perwakilan warga dan 1 orang perwakilan mahasiswa. Walau mendapat desakan dari massa dan perwakilan warga, Camat tetap mengharapakan pertemuan dilaksanakan. Massa yang sudah hadir kemudian membatalkan pertemuan ini.

Kesabaran rakyat untuk mendapatkan hak sebagai pemilik dan pewaris tanah tetap menemui jalan buntu di hadapan

Pemerintah Kabupaten Buton dan pihak perusahaan. Warga bersepakat melakukan aksi besar-besaran agar perjuangan mereka selama ini menjadi perhatian semua pihak. Pada 15 Mei 2010 massa yang berjumlah sekitar 1.000 orang berkumpul di lapangan sepak bola Kelurahan Talaga I kemudian berjalan kaki menuju kantor Camat Talaga Raya untuk melakukan penyegelan, karena mereka beranggapan pemerintah kecamatan sebagai pelindung rakyat seharusnya membantu memperjuangkan tuntutan ini. Tidak puas dengan penyegelan kantor kecamatan, massa kemudian melanjutkan berjalan kaki ke kantor PT AMI. Dalam perjalanan menuju PT AMI massa juga melakukan orasi di depan Polsek Talaga Raya. Mereka mengingatkan kepolisian agar tidak ikut campur dalam proses menuntut hak mereka. Mereka menuntut karena aparat kepolisian telah mengintervensi warga, dan minta polisi kembali pada tugas pokoknya menjaga keamanan. Massa juga membacakan tuntutan agar aksi premanisme seperti terjadi pada aksi 5 Mei 2010 dihentikan.

Kantor PT AMI di Desa Wulu, terpisah daratan dengan Pulau Talaga. Massa pun menggunakan sampan menuju Desa Wulu di Pulau Kabaena.² Setiba di dermaga PT AMI yang digunakan sebagai tempat pengangkutan kapal, massa membagi kelompok. Ibu-ibu menggelar aksi di pelabuhan untuk menghentikan pengangkutan bijih nikel, sedangkan para laki-laki yang berjumlah sekitar 200 orang menuju kantor PT AMI. Kelompok laki-laki ini akan melakukan penyegelan seperti pada aksi di kantor camat. Setiba di depan kantor PT AMI warga dihadang aparat kepolisian yang telah berjaga-jaga bersama preman yang diduga didatangkan perusahaan.

2 Pulau Kabaena merupakan wilayah Kabupaten Bombana, namun di wilayah ini tersisa satu desa yaitu desa Wulu yang masih merupakan wilayah kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton.

Penghadangan membuat situasi tidak terkendali. Massa tetap memaksa untuk menyegel kantor PT AMI dan polisi bersikukuh mencegah. Saat situasi kacau, terjadi pelemparan dari kantor PT AMI terhadap massa. Warga pun mengamuk dengan melempari kantor perusahaan. Akhirnya massa berhasil melakukan penyegelan. Saat kembali ke dermaga mereka dihadang oleh beberapa orang yang tidak dikenal. Pecah bentrok. Massa kemudian merusak kaca pos penjagaan. Aksi berakhir sekitar pukul 17.00. Sebagian warga kembali ke Talaga dan sebagian lagi mendirikan tenda di sekitar dermaga untuk menunggu warga lainnya yang akan datang esoknya.

Pada 16 Mei 2010 datang lagi massa dengan jumlah yang lebih besar, sekitar 1.000 orang. Di dermaga mereka dihadang aparat kepolisian yang didatangkan dari Kendari. Polisi memeriksa warga yang baru datang, namun tidak menemukan seorang pun yang membawa senjata tajam atau sejenisnya yang dapat dianggap melanggar hukum. Personel gabungan Brimob Kendari dan Polres Bau-bau melanjutkan menggeledah kapal atau sampan warga. Di kapal ditemukan sebilah parang yang belakangan diketahui milik Supirman (14 tahun).

Runtuhnya Kepercayaan Rakyat

Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Buton pada tahun 2008 merupakan pemilihan langsung yang dianggap sebagai pilar awal untuk melaksanakan demokrasi di Pulau Buton. Secara tradisional,³ pemerintahan lokal pulau ini telah melaksanakan proses demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka. Namun proses demokrasi tradisional ini hanya menjadi kenangan bagi masyarakat Buton setelah Indonesia menjadi Negara Kesatuan

3 Pemilihan raja dipulau buton dimasa lampau dilakukan dalam beberapa tahapan baik ditingkat kadie maupun

Republik Indonesia. Tidak terkecuali bagi masyarakat Talaga yang merupakan bagian Kabupaten Buton, baik pada masa kerajaan/kesultanan maupun pada masa kemerdekaan.

Daerah ini merupakan salah satu basis kemenangan Partai Golkar yang diketuai Syafei Kahar, yang telah mengantarkannya menjadi Bupati Buton. Pemilihan langsung daerah ini juga menghasilkan anggota legislatif dari pulau ini.

Saat kampanye, calon legislatif dan calon bupati Talaga Raya berlomba meraih simpati masyarakat. Berbagai janji dilontarkan agar rakyat memilih mereka. Bahkan mereka memberikan berbagai bantuan, baik materi maupun non-materi.

Saat sosialisasi masuknya perusahaan tambang nikel PT AMI di pulau ini mengatasnamakan kesejahteraan agar lahan rakyat yang telah bertahun-tahun menopang kehidupan mereka diberikan kepada pemerintah untuk dikelola oleh perusahaan tambang nikel tersebut. Secara sepihak kemudian pemerintah mengizinkan perusahaan untuk mengolah lahan pertanian. Bahkan, saat rakyat yang telah menjadi tim sukses bagi pemenangnya berlutut meminta segera mempercepat ganti rugi tidak juga dipedulikan.

Di sisi lain, meletusnya konflik ini juga disebabkan sebagian warga yang juga tanahnya dikorbankan dengan mudah mendapatkan ganti rugi, sedangkan warga yang seharusnya diperlakukan sama tidak merasakan adanya perlindungan. Bahkan, tanah yang telah digarap bertahun-tahun dianggap sebagai tanah negara. Warga ini seharusnya diperlakukan sama dengan warga lain yang telah mendapat ganti rugi.

Begitu pula dengan berbagai alasan persyaratan yang ditetapkan pemerintah, yang menyatakan tanah yang akan diberikan ganti rugi adalah tanah yang sedang dikelola perusahaan

saat itu. Dalam kenyataannya sebagian warga yang telah mendapatkan ganti rugi sebenarnya lahan pertaniannya belum dikelola perusahaan.

Harga diri rakyat juga menjadi terabaikan saat pemerintah menjanjikan lahan akan diganti dengan pembebasan pajak dan beras untuk warga miskin. Setelah informasi ini menyebar ke berbagai media dan mendapat tanggapan dari DPRD Provinsi, dinyatakan beras itu tidak ada hubungan dengan penggantian tanah atau program-program lainnya. Humas Pemkab Buton Lutfi Hasmar mengklarifikasi bahwa tidak benar beras miskin sebagai pengganti lahan warga Talaga.

Aparat kepolisian yang selama ini dianggap warga sebagai pelindung masyarakat dari rasa ketakutan dan keonaran di tiap komunitas, ternyata menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai intimidasi terhadap warga. Padahal, saat melakukan tuntutan, warga bersama aktivis pro demokrasi mengingatkan polisi agar tetap menjaga korps sebagai pelindung masyarakat.

Pihak perusahaan juga ikut berperan menambah kemarahan rakyat karena tidak memenuhi janji yang telah disepakati dengan warga. Juga perusahaan tidak menghadiri pertemuan, walaupun dengan alasan saat pertemuan perwakilan perusahaan sedang sakit. Namun, setidaknya ada perwakilan perusahaan yang dapat mewakili menghadiri pertemuan untuk menemukan solusi bersama.

Permasalahan menurunnya hasil pertanian dan rumput laut budi daya warga masih menggantung. Warga merasa, sesuai dengan pengetahuannya, menurunnya hasil pertanian dan rumput laut akibat debu dan lumpur yang dihasilkan aktivitas perusahaan. Hal itu tidak menjadi pertimbangan bagi Bappedalda yang secara fungsional bertugas mempertimbangkan keluhan warga di sekitar area pertambangan nikel PT Argo Morini Indah.

Gerakan Perlawanan Suku Malamoi Papua: Mencari Keadilan atas Sumber Daya Alam dan Identitas Budaya

*Simpul Kepala Burung Papua – FBB Prakarsa Rakyat*¹

Pengantar

Nama Sorong diambil dari nama perusahaan Belanda yang pada masa penjajahan mengelola dan mengeksploitasi minyak di wilayah Kepala Burung Tanah Papua, yaitu Seismic Ondersub Oil Nieuw Guinea atau disingkat Sorong. Secara umum Kepala Burung tanah Papua terbagi menjadi dua wilayah ekosistem utama, yaitu wilayah kepulauan yang disebut Kepulauan Raja Ampat dan pulau-pulau kecil lainnya di pesisir selatan dan utara, serta wilayah daratan atau tanah besar yang terdiri atas daratan rendah, perbukitan,

1 Tulisan dipersiapkan oleh Macx Binur, Danarti Wulandari, Charles Tawaru dan Fredik Sedik yang saat ini aktif di Proton dan Belantara, Sorong.

lereng, pegunungan, dan puncak gunung. Di bagian utara terdapat sebuah gunung yang tingginya 3.000 meter di atas permukaan laut, yaitu puncak Gunung Tambrau, sedangkan di bagian selatan umumnya didominasi daerah datar dan berawa (hutan bakau). Jenis tanahnya pun bervariasi, mulai dari organosol, aluvial, lotosal, podsolik merah kuning, dan podsolik cokelat kelabu.

Wilayah Kepala Burung Tanah Papua awalnya hanya satu kabupaten, yaitu Kabupaten Sorong. Saat ini telah dimekarkan menjadi beberapa wilayah administratif, antara lain: Kota Madya Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Tambrauw. Saat ini direncanakan lagi pemekaran wilayah baru, yaitu Kabupaten Malamoi di wilayah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat pun sedang gencar mempersiapkan pemekaran menjadi satu wilayah administratif baru. Dua wilayah rencana pemekaran baru yang disebutkan terakhir ini masih menjadi wacana dan sedang dilakukan usaha-usaha (lobi politik) ke arah pemekaran dua wilayah tersebut oleh kelompok-kelompok kepentingan yang tersingkir dari jabatan birokrasi dan legislatif setelah pemilu baik di Kota Madya maupun Kabupaten Sorong.

Peta Gerakan Perlawanan Wilayah Kepala Burung Tanah Papua

